

Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
2015-2019



Bendungan Logung
Jawa Tengah



Dr. Ir. Hari Suprayogi, M. Eng
Direktur Jenderal Sumber Daya Air
Kementerian PUPR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015), yang telah disesuaikan dengan Nawacita (visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden) sebagai agenda prioritas nasional. Selanjutnya, agenda tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian PUPR.

Mengacu pada hal tersebut diatas, selanjutnya disusun dan ditetapkan Renstra Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2015-2019, dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika perkembangan lingkungan strategis yang terjadi begitu cepat, melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

Memasuki tahun keempat pelaksanaan Renstra tersebut, terjadi banyak perubahan lingkungan strategis dan konstelasi kebijakan termasuk adanya

perubahan struktur organisasi Kementerian PUPR. Selain itu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra sampai dengan tahun ketiga, terdapat kebutuhan untuk penajaman dan penyesuaian arah pembangunan 1 (satu) tahun terakhir Renstra yaitu tahun 2019 untuk meminimalkan backlog target Renstra yang sudah ditetapkan, termasuk juga melakukan restrukturisasi terhadap sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, sebagai penerjemahan pengintegrasian sistem perencanaan, pemrograman dan informasi kinerja sebagaimana diamanatkan pada Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja (KRISNA).

Dengan dilakukannya revisi Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, rencana kinerja pencapaian outcome dan output diharapkan dapat mencapai kinerja yang lebih baik dan memenuhi aspek akuntabilitas berlandaskan kepada sistem akuntansi dan barang milik negara, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta sistem penganggaran berbasis kinerja.

Dengan izin Allah SWT serta kerjasama dan dukungan seluruh jajaran Direktorat Jenderal SDA dan seluruh pihak, besar harapan hasil revisi ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDA dalam menyusun perencanaan dan pemograman (RENJA-K/L) dan penganggaran (RKA-K/L), serta perjanjian kinerja dan evaluasi kinerja (PK dan LAKIP).

Jakarta, Oktober 2019

Direktur Jenderal Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Dr. Ir. Hari Suprayagi, M. Eng

Daftar Isi

02

Bab 1

Pendahuluan

- | | | |
|-----|---------------------------------------|-----------|
| 1.1 | Kondisi Saat Awal Periode Perencanaan | 06 |
| 1.2 | Capaian Pelaksanaan Hingga Tahun 2018 | 26 |

42

Bab 2

Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 2.1 | Visi Dan Misi Kementerian PUPR | 45 |
| 2.2 | Penjabaran Visi, Misi Dan Tujuan
Kementerian PUPR Ke Dalam Tujuan
Direktorat Jenderal SDA | 46 |
| 2.3 | Sasaran Strategis, Sasaran Program,
Dan Sasaran Kegiatan | 48 |
| 2.4 | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 53 |

56

Bab 3

**Arah Kebijakan, Strategi,
Kerangka Regulasi, Dan Kerangka Kelembagaan**

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 3.1 | Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Nasional | 58 |
| 3.2 | Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian PUPR | 61 |
| 3.3 | Arah Kebijakan Umum Direktorat Jenderal SDA | 73 |
| 3.4 | Arah Kebijakan Pengembangan SDA Per Pulau | 75 |
| 3.5 | Arah Kebijakan Dukungan Terhadap Pengembangan
Daerah Tertinggal Dan Perbatasan | 76 |
| 3.6 | Arah Kebijakan Dukungan Terhadap Pengembangan
Sektor Lainnya | 77 |



Daftar Isi



56

Bab 3

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Dan Kerangka Kelembagaan

3.7	Arah Kebijakan Perwujudan Proyek Strategis Nasional	78
3.8	Strategi Operasional	79
3.9	Dukungan Internal Process	89
3.10	Operasionalisasi Strategi Ke Dalam Program Dan Kegiatan	90
3.11	Kerangka Regulasi	91
3.12	Kerangka Kelembagaan	94

102

Bab 4

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

4.1	Program Dan Kegiatan	104
4.2	Target Kinerja	105
4.3	Kerangka Pendanaan	105

108

Bab 5

Penutup

5.1	Perkiraan Pendanaan Hingga Tahun 2019	110
5.2	Perkiraan Capaian Sasaran Pokok Pembangunan Nasional Hingga Tahun 2019	111
5.3	Perkiraan Capaian Sasaran Strategis Dan Sasaran Program Hingga Tahun 2019	114
5.4	Penutup	115

Daftar Gambar

Gambar 1	Kondisi Irigasi Permukaan Di Indonesia	07
Gambar 2	Pengembangan PLTA Berpotensi Menurunkan Emisi CO ₂	10
Gambar 3	Biaya Operasi Pembangkit Rata-rata/kwh Per Jenis Pembangkit (Rp/kwh) Tahun 2012	10
Gambar 4	Kontribusi Ketersediaan Air Permukaan Pada Kepulauan Tahun 2016	11
Gambar 5	Neraca Air Setiap Pulau Di Indonesia Tahun 2016	12
Gambar 6	Ketersediaan Air Permukaan Potensial Di Indonesia Tahun 2016	13
Gambar 7	Sebaran <i>Idle Capacity</i> Penyediaan Air Baku Hingga 013	14
Gambar 8	Kapasitas Tampung Per Kapita Beberapa Negara Di Dunia	15
Gambar 9	Daerah Irigasi Yang Airnya Bersumber Dari Waduk Hingga Tahun 2014	16
Gambar 10	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Sasaran Pokok Pembangunan Nasional Pada Pelaksanaan RPJMN 2015-2019 Tahun Ke-4	33
Gambar 11	Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Sda 2015-2018	37
Gambar 12	Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Infrastruktur Irigasi Tahun 2015-2018	40
Gambar 13	Pembangunan, Peningkatan Dan Rehabilitasi Daerah Irigasi Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015-2018	40
Gambar 14	Peta Strategi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019	49
Gambar 15	Peta Strategi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	50
Gambar 16	Tahapan Pembangunan Nasional	59
Gambar 17	Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019	60
Gambar 18	Konsepsi Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)	70
Gambar 19	Sebaran 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)	71
Gambar 20	Zonasi Pengembangan Sumber Daya Air	76
Gambar 21	Prosedur Perijinan Pengusahaan Atas Air	87
Gambar 22	Proses Pengajuan Izin Menggunakan <i>E-rekomtek</i> Dan SI-REPER-SDA	88
Gambar 23	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal SDA	100
Gambar 24	Perkiraan Penganggaran Hingga Tahun 2019	110





Bendungan Raknamo
Nusa Tenggara Timur

Daftar Tabel

Tabel 1	Capaian Renstra 2005-2009 Dan Renstra 2010-2014	22
Tabel 2	Capaian Sasaran Strategis Tahun 2015-2018	34
Tabel 3	Capaian Sasaran Program Tahun 2015-2018	37
Tabel 4	Keterkaitan Sasaran Program Dan Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal SDA	51
Tabel 5	Perkiraan Capaian Sasaran Pokok Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019	112
Tabel 6	Perkiraan Sasaran Strategis 2015-2019	116
Tabel 7	Perkiraan Sasaran Program (SP2. Meningkatnya Ketahanan Air)	116
Tabel 8	Perkiraan Sasaran Program (SP3. Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo)	117

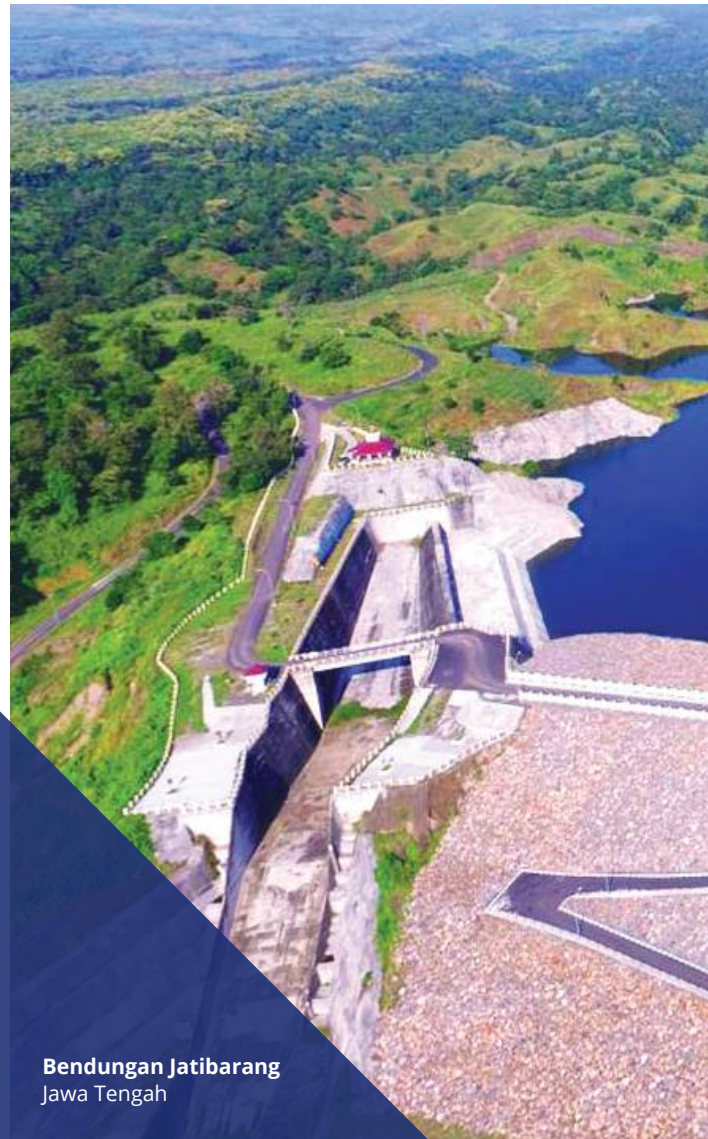
Daftar Lampiran

Lampiran 1	Daftar Daerah Tertinggal 2015-2019
Lampiran 2	Daftar Daerah Perbatasan 2015-2019
Lampiran 3	Daftar Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) 2015-2019
Lampiran 4	Arsitektur Dan Informasi Kinerja (ADIK)
Lampiran 5	Cara Perhitungan
Lampiran 6	Matriks Target Dan Pendanaan



Bendungan Teritip
Kalimantan Timur

bab 1
Pendahuluan



Bendungan Jatibarang
Jawa Tengah





DI. Randangan
Gorontalo

Pembangunan infrastruktur mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemenuhan Hak Dasar Rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Infrastruktur merupakan modal sosial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi serta peningkatan daya saing di dunia internasional. Pembangunan infrastruktur mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat, kualitas lingkungan dan pengembangan wilayah.

Ke depan, tuntutan dan dinamika perkembangan lingkungan strategis yang terjadi begitu cepat, menjadi tantangan pembangunan infrastruktur, antara lain:

- a. Adanya tuntutan peningkatan daya saing global, kualitas hidup manusia, dan kemandirian ekonomi, disparitas antar-wilayah.
- b. Perubahan dasar hukum pelaksanaan pengelolaan SDA sebagai tindak lanjut Keputusan MK terkait UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- c. Target kinerja yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal SDA meningkat 3 kali lipat.
- d. Perubahan struktur organisasi, baik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun di lingkungan Direktorat Jenderal SDA.
- e. Restrukturisasi program dan kegiatan mengacu pada anggaran berbasis kinerja yang sasaran kinerjanya disusun berdasarkan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) yang diselaraskan dengan perubahan struktur organisasi dalam rangka pencapaian target kinerja oleh seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDA.

Direktorat Jenderal SDA sebagai salah satu unit Eselon I di Kementerian PUPR, berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2019 bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan SDA sesuai dengan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal SDA menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sumber air permukaan, dan pendayagunaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya air;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya air;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan Perpres Nomor 21 tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang kemudian diubah lagi menjadi Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2019, tugas

dan fungsi Direktorat Jenderal SDA bertambah dengan dibentuknya Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS). PPLS bertugas untuk melaksanakan pengendalian lumpur Sidoarjo dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana umum, rencana teknis serta program dan anggaran pengendalian lumpur Sidoarjo;
- b. pelaksanaan pengendalian lumpur Sidoarjo dan penataan lingkungan;
- c. penyiapan serta pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo;
- d. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo;
- e. pengendalian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat lumpur Sidoarjo;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil pengendalian lumpur Sidoarjo;
- g. penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- h. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan dan umum.

1.1. Kondisi Saat Awal Periode Perencanaan

1.1.1. Kedaulatan pangan

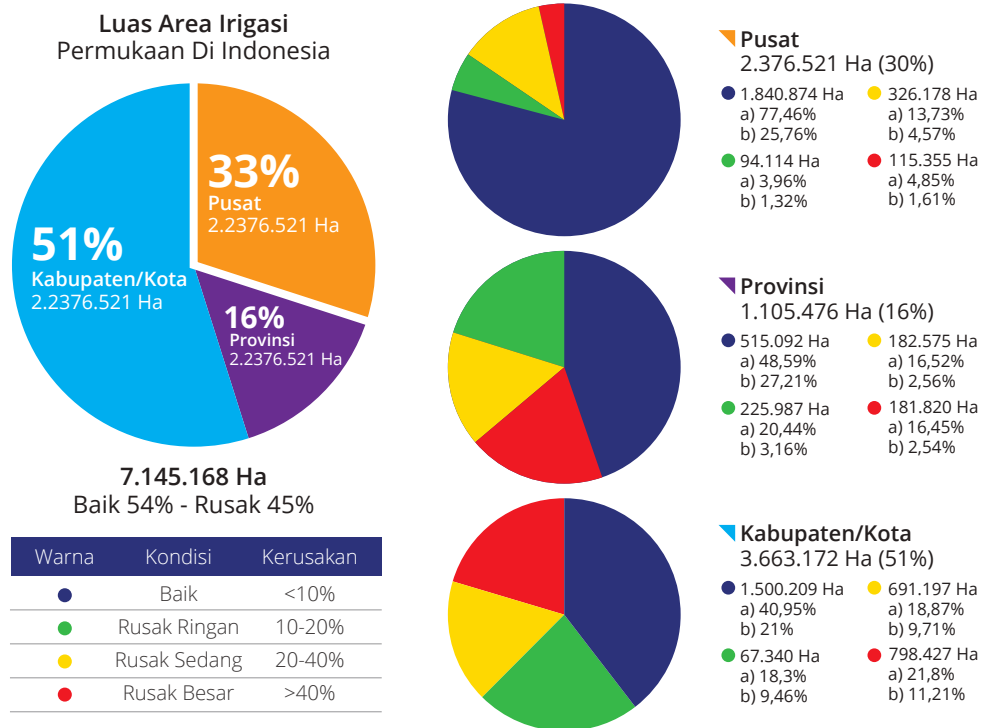
Kedaulatan pangan (*food sovereignty*) adalah pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dari 7,15 juta hektar areal irigasi permukaan yang telah dibangun, hanya sekitar 11% (\pm 760 Hektar) yang ketersediaan airnya dapat dijamin melalui bendungan, sedangkan sisanya masih mengandalkan debit sungai atau mata air (*free intake*). Sebagian jaringan irigasi tidak berfungsi optimal akibat bencana alam serta belum lengkapnya sistem jaringan irigasi. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian produktif semakin tinggi, pada kurun waktu 2006-2013 mencapai 100-110 ribu hektar per tahun¹. Pengembangan lahan rawa sebagai alternatif lahan irigasi baru masih terbatas. Di sisi lain, penggunaan air irigasi cenderung boros karena rendahnya efisiensi. Keterbatasan pendanaan serta masih rendahnya kuantitas dan kualitas

¹ Sebagaimana diberitakan di <http://psp.pertanian.go.id/> dan <http://bappeda.jatimprov.go.id/>

sumber daya manusia menyebabkan rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Selain itu, partisipasi masyarakat petani dan kinerja kelembagaan pengelolaan irigasi belum optimal.

Dari luas daerah irigasi permukaan di Indonesia sekitar 7,15 juta hektar, sekitar 46% diantaranya dalam kondisi rusak. Kerusakan terbesar pada jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah. Lebih dari 50% jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah mengalami kerusakan. Di sisi lain, pembangunan jaringan irigasi baru relatif sulit dilakukan, karena keterbatasan ketersediaan lahan dan petani.



Gambar 1 Kondisi Irigasi Permukaan di Indonesia

Hingga tahun 2014, peningkatan dukungan kedaulatan pangan diperkirakan baru mencapai 45,83%, melalui pencapaian indikator peningkatan layanan air baku untuk irigasi. Hingga tahun 2014, sasaran strategis kegiatan irigasi dan rawa yang telah dicapai meliputi:

1. Pembangunan jaringan irigasi permukaan dengan target mengairi 425.000 ha daerah irigasi, telah tercapai bahkan melebihi target, yakni 429.739 ha.
2. Pembangunan jaringan irigasi rawa dan jaringan irigasi air tanah dengan target 237.000 ha, berhasil mencapai 216.406 ha.
3. Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan dengan target mengairi 1.700.000 ha daerah irigasi telah berhasil mencapai 2.021.439 ha.
4. Rehabilitasi jaringan irigasi rawa dan jaringan irigasi air tanah dengan target 663.000 ha, dan berhasil melebihi target, yakni mencapai 697.568 ha.

Selain itu, dalam rangka mempertahankan tingkat layanan, mengoptimalkan fungsi, dan membangun prasarana sistem irigasi yang menjadi kewenangan kab/kota dan provinsi khususnya pada daerah lumbung pangan nasional (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah) untuk mendukung program kedaulatan pangan nasional, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK merupakan salah satu wujud intervensi Pemerintah Pusat terhadap penanganan irigasi kewenangan daerah. Alokasi rata-rata DAK selama ini adalah Rp 13 Milyar per provinsi dan Rp 2,4 Milyar per kabupaten/kota memang teramat kecil bila dibandingkan dengan skala kerusakan infrastruktur irigasi yang terjadi di lapangan, yang mencapai lebih dari 50%.

Dari tahun 2009 hingga tahun 2014, melalui DAK telah ditangani 492.538 hektar daerah irigasi yang rusak, dengan total pendanaan Rp 2,3 Trilyun. Ke depan, pengalokasian DAK akan ditingkatkan. Prioritas pemanfaatan DAK ini sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 03/PRT/M/2015 adalah:

- Rehabilitasi jaringan irigasi, yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan layanan irigasi.

- Peningkatan jaringan irigasi, yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
- Pembangunan baru yang selektif, yang bertujuan untuk menyediakan jaringan irigasi baru, bilamana jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota sudah berfungsi dengan baik.

1.1.2. Ketahanan energi

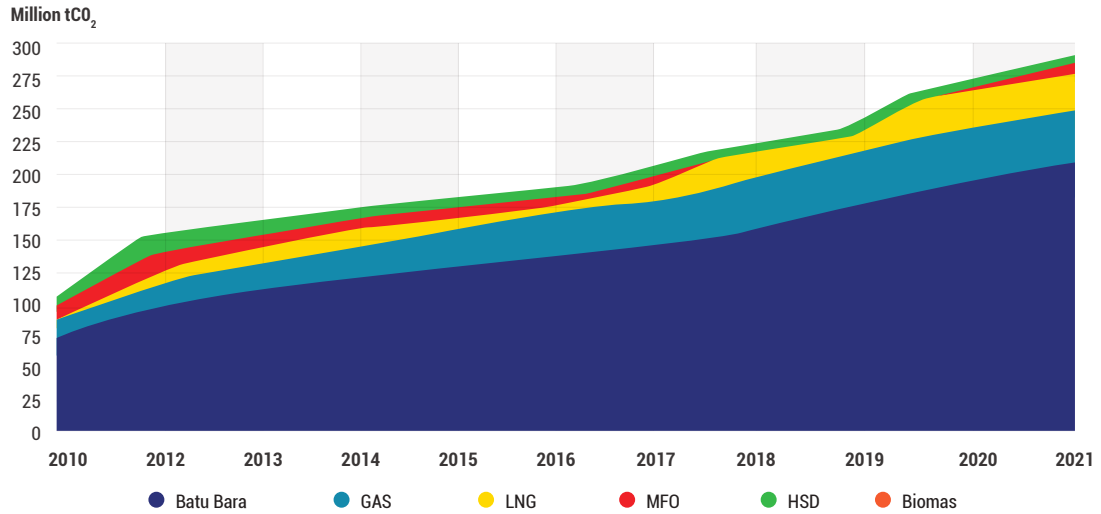
Pada tahun 2014, total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional mencapai 53.065 MW, sekitar 10%-nya (5.059 MW) adalah PLTA². Kapasitas terpasang dari PLTA ini adalah 40,7% dari total potensi PLTA yang ada saat ini (12.411,24 MW).³

Dari 208 bendungan yang ada di Indonesia hingga tahun 2014, terdapat potensi sumber energi sekitar 8.653 MW. Dari 208 bendungan tersebut, 178 bendungan adalah milik Kementerian PUPR.

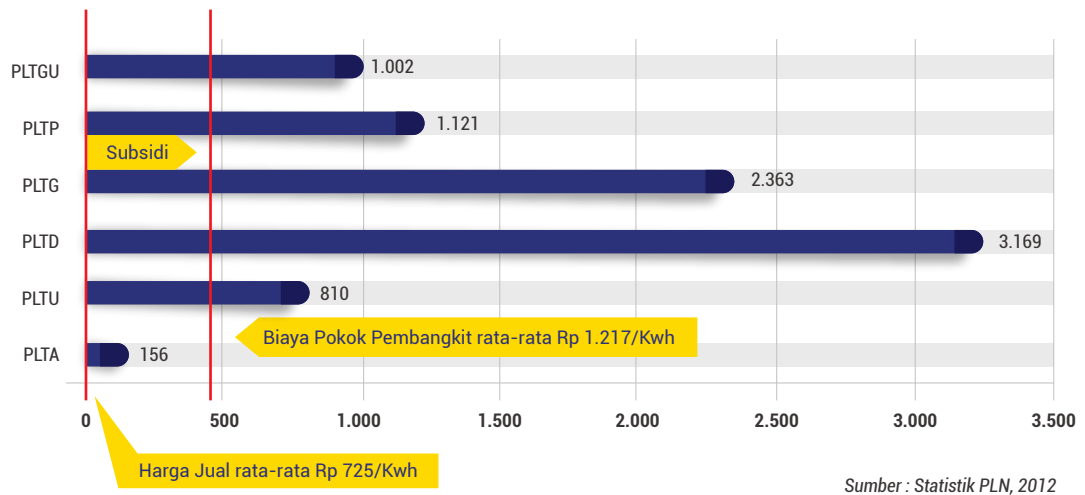
Potensi PLTA yang dimiliki oleh bendungan eksisting dan akan dibangun tersebut merupakan potensi listrik yang cukup besar. Pengembangan PLTA diharapkan dapat menurunkan emisi CO². Biaya operasi PLTA merupakan biaya operasi terendah dibandingkan biaya pembangkitan lainnya. Percepatan pembangunan PLTA akan menurunkan biaya produksi listrik dan subsidi karena biaya produksi listrik menurun.

² Berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2015-2034, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Draft, 2015).

³ Data dari Badan Geologi (2014) sebagaimana tercantum pada LAMPIRAN RUKN 2015-2034.



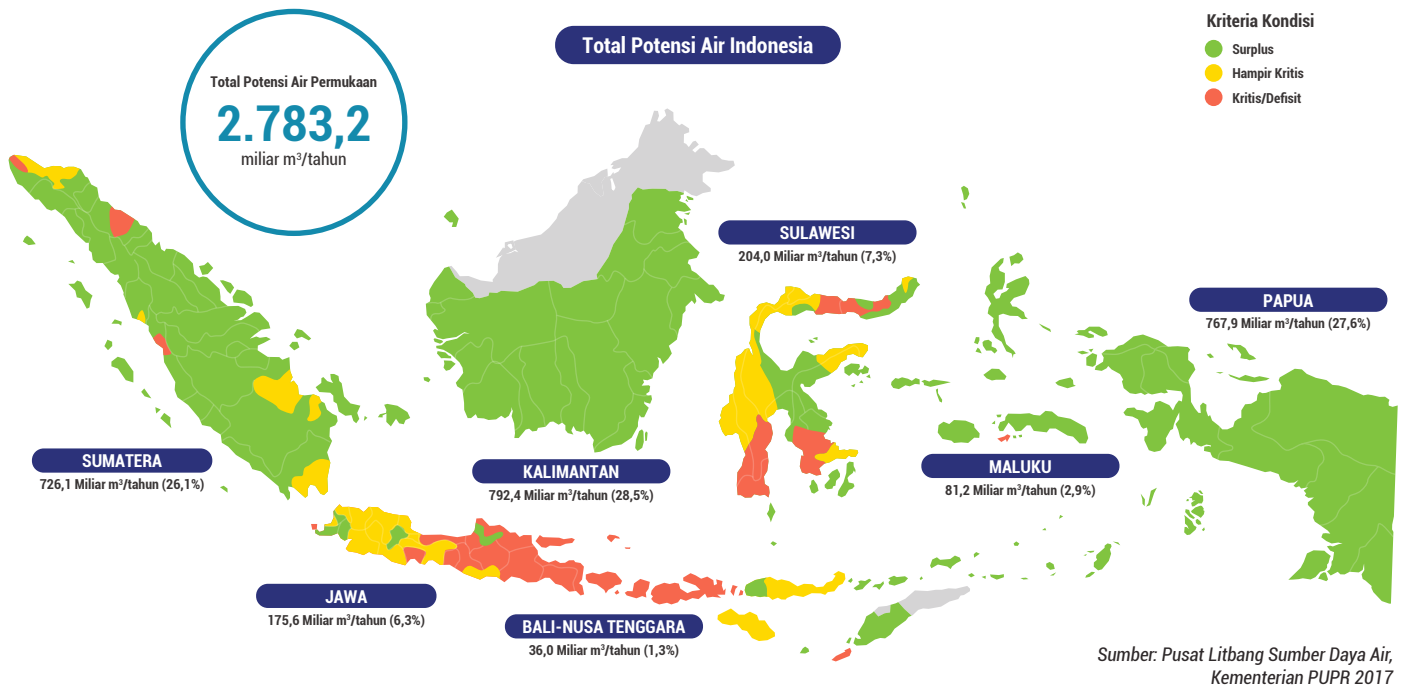
Gambar 2 Pengembangan PLTA Berpotensi Menurunkan Emisi CO₂



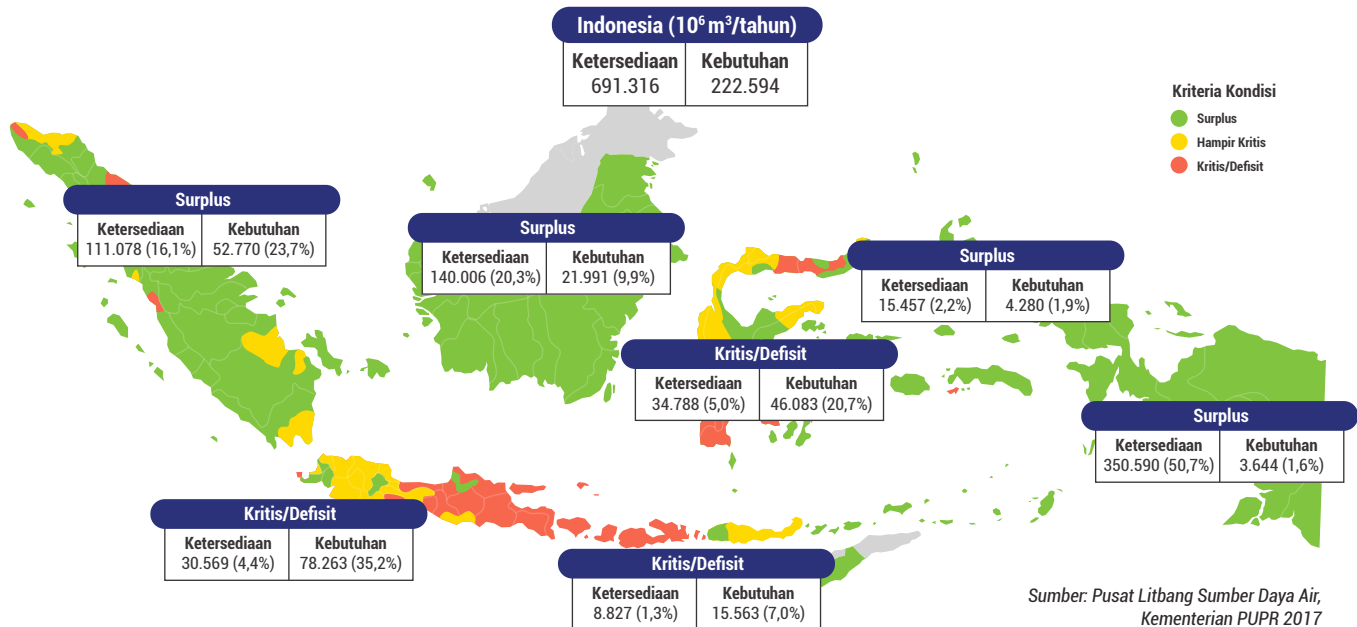
Gambar 3 Biaya Operasi Pembangkit Rata-rata/kWh per Jenis Pembangkit (Rp/kWh) Tahun 2012

1.1.3. Peningkatan Ketahanan Air

Hasil studi tahun 2016, perhitungan Litbang Sumber Daya Air Kementerian PUPR menunjukkan bahwa ketersediaan air permukaan di Indonesia adalah 2,78 trilyun m³/tahun, dengan potensi yang dapat dimanfaatkan sekitar 691,3 milyar m³/tahun (24,84%) dan sudah dimanfaatkan baru sekitar 222,59 milyar m³/tahun. Pemanfaat terbesar adalah irigasi (79,6%) atau sekitar 177,13 milyar m³/tahun.



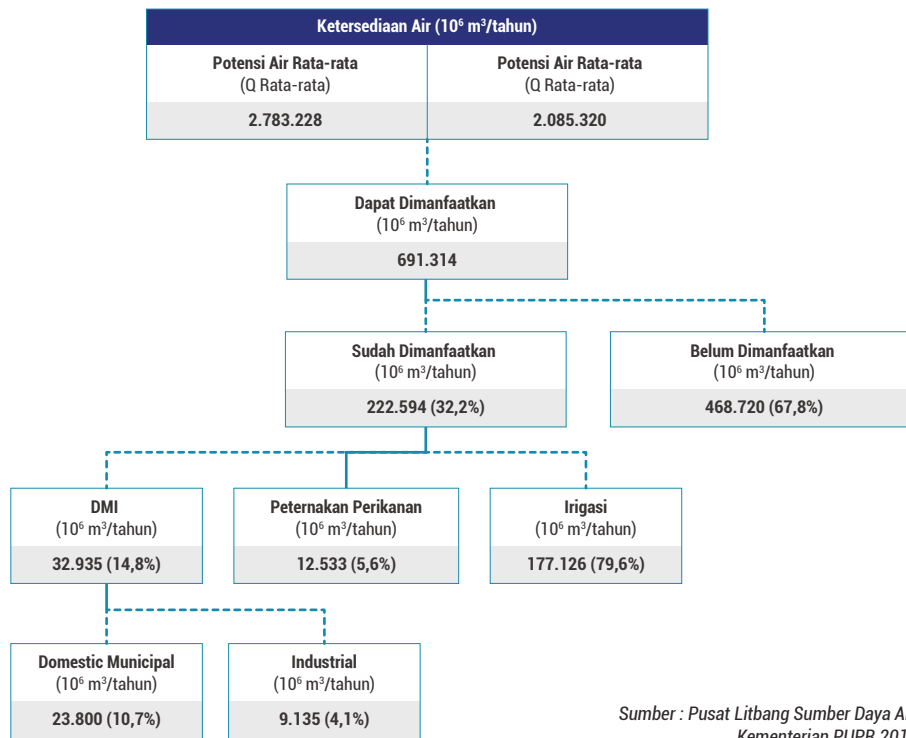
Gambar 4 Kontribusi Ketersediaan Air Permukaan pada Kepulauan Tahun 2016



Gambar 5 Neraca Air Setiap Pulau di Indonesia Tahun 2016

Hal ini menunjukkan bahwa masih ada air cukup besar yang belum dimanfaatkan. Namun disisi lain, ketersediaan air tersebut juga tidak merata. Pulau Kalimantan merupakan pulau dengan ketersediaan air terbesar (28,5%), sedangkan Pulau Jawa (6,3%) dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memiliki ketersediaan air terkecil setelah Bali dan Nusa Tenggara (1,3%) dan Maluku (2,9%).

Ketahanan air didefinisikan sebagai suatu keadaan yang menggambarkan keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan yang berkelanjutan untuk kehidupan serta kemampuan dalam mengurangi resiko yang berkaitan dengan air. Ketahanan air menjadi prioritas utama dan program utama yang merupakan prasyarat bagi tercapainya kedaulatan pangan nasional. Dengan ketahanan air, kualitas hidup masyarakat meningkat, perekonomian menjadi produktif, lingkungan menjadi aman, nyaman dan berkelanjutan, sehingga akhirnya visi mencapai Indonesia sejahtera dapat tercapai.



Gambar 6 Ketersediaan Air Permukaan Potensial di Indonesia tahun 2016

Hingga tahun 2014, peningkatan dukungan ketahanan air diperkirakan baru mencapai 28,95%, melalui pencapaian 3 (tiga) indikator, yaitu:

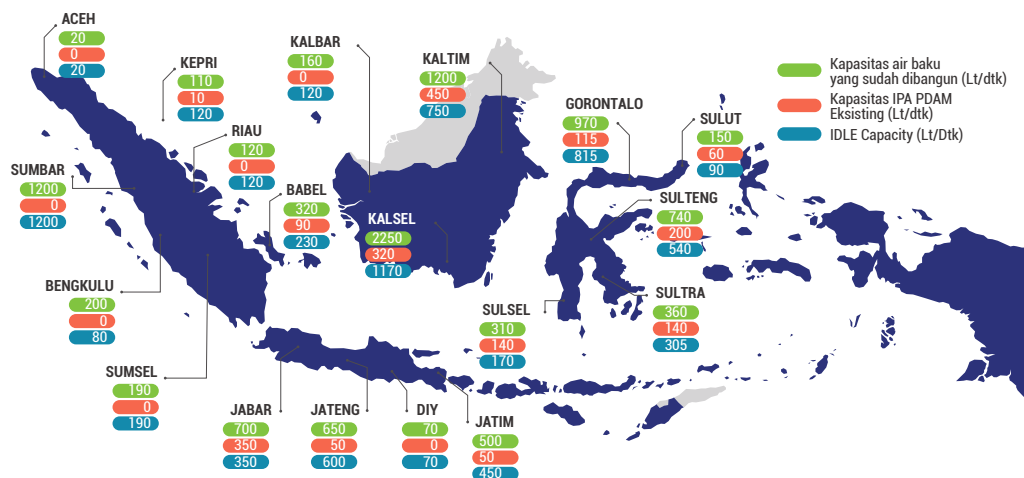
- Pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan sehari-hari (66,35%). Angka ini dihitung berdasarkan asumsi bahwa untuk mendukung pencapaian target MDGs 68% pada tahun 2015, dibutuhkan dukungan air baku sebesar $56 \text{ m}^3/\text{detik}$, sementara hingga tahun 2014 dukungan air baku baru $51,44 \text{ m}^3/\text{detik}$ atau setara dengan pemenuhan sebesar 66,35%.
- Peningkatan kapasitas tampung per kapita (2,5%). Angka ini dihitung berdasarkan kapasitas tampung di Indonesia adalah hingga tahun 2014 adalah 12,8 milyar m^3 (termasuk bendungan, embung dan situ), atau sekitar 50 m^3 per kapita per tahun, dimana angka ini hanya 2,5% dari angka ideal tampungan per kapita di suatu negara (1.975 m^3 per kapita per tahun).

- c. Peningkatan layanan infrastruktur pengendali daya rusak air (18%). Angka ini dihitung berdasarkan capaian hingga tahun 2014 sudah dibangun 1.447 km prasarana pengendali banjir atau melindungi sekitar 36.199 Ha (LAKIP 2014) atau sekitar 18% dari 200 ribu hektar yang harus dilindungi.

A. PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BAKU UNTUK KEBUTUHAN SEHARI-HARI

Dalam upaya meningkatkan layanan air baku bagi kebutuhan rumah tangga, industri, dan perkotaan, sampai dengan saat ini telah dibangun jaringan air baku dengan kapasitas layanan 51,44 m³/detik, yang belum memenuhi target kapasitas yang direncanakan (56 m³/detik).

Disisi lain, hingga Desember 2013, masih terdapat sekitar 7,04 m³/detik kapasitas air baku yang belum dimanfaatkan (*idle capacity*) untuk menjadi air bersih oleh pengelola air bersih/air minum (baru dimanfaatkan sebesar ± 36,83 m³/detik). Hal ini perlu mendapat perhatian pada pengembangan air baku ke depan.

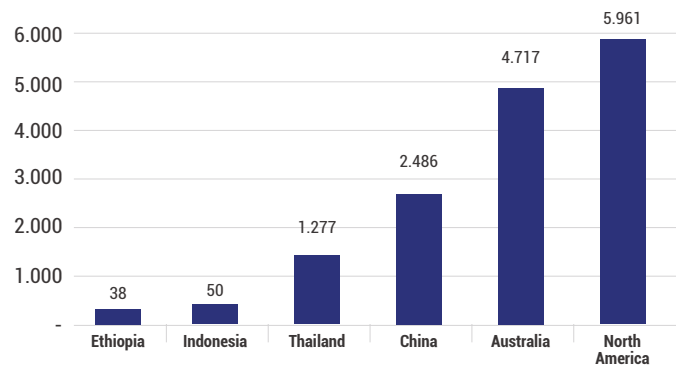


Gambar 7 Sebaran Idle Capacity Penyediaan Air Baku hingga 013

Suplai air baku semakin terbatas akibat menurunnya debit pada sumber-sumber air dan tingginya laju sedimentasi pada tampungan-tampungan air, seperti bendungan, embung, danau, dan situ. Selain itu, kualitas air semakin rendah akibat tingginya tingkat pencemaran pada sungai dan sumber-sumber air lainnya. Di sisi lain, kebutuhan air baku semakin tinggi akibat pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri, berkembangnya aktivitas manusia, dan tidak efisiennya pola pemanfaatan air. Rendahnya ketersediaan prasarana air baku, terutama di perdesaan, daerah terpencil, kawasan perbatasan, kawasan pariwisata, dan pulau-pulau terdepan menyebabkan tingginya eksploitasi air tanah yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan air minum dan kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga menyebabkan *land subsidence* dan intrusi air laut.

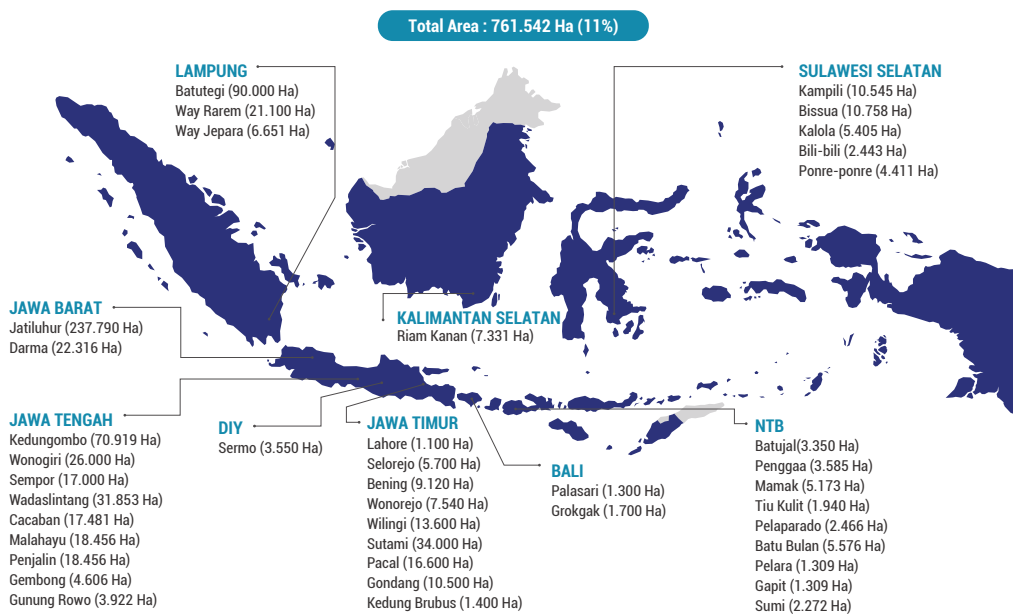
B. PENINGKATAN KAPASITAS TAMPUNG PER KAPITA

Hingga tahun 2014 baru ± 12,8 milyar m³ atau sekitar 50 m³ per kapita per tahun yang dapat dikelola melalui tampungan bendungan serta situ dan embung (208 bendungan, 1.728 embung dan 543 situ). Angka ini jauh lebih rendah dari Thailand (1.277 m³/kapita) dan satu tingkat di atas Ethiopia (38 m³/kapita). Hal ini berarti kapasitas tampung di Indonesia masih rawan untukantisipasi kekritisn air dan ketahanan pangan ke depan. Ke depan, dibutuhkan pembangunan tampungan-tampungan baik berupa bendungan maupun embung/situ/bangunan penampung air lainnya.



Gambar 8 Kapasitas Tampung per Kapita Beberapa Negara di Dunia

Untuk mendukung ketahanan pangan, kapasitas tampung air yang ada saat ini baru dapat mengairi jaringan irigasi waduk seluas sekitar 760 ribu hektar atau sekitar 11% dari luas daerah irigasi yang ada. Areal irigasi yang diairi oleh waduk akan terjamin keandalan tersedianya airnya, sehingga produksi pangan lebih terjamin. Ke depan, hal ini perlu ditingkatkan, sehingga dapat mengantisipasi kekritisannya air untuk pangan.



Gambar 9 Daerah Irigasi yang Airnya Bersumber dari Waduk Hingga Tahun 2014

Sebagai upaya meningkatkan kapasitas tampung sumber-sumber air dalam rangka mendukung ketahanan air, pada tahun 2010-2014, telah dilaksanakan beberapa upaya diantaranya: pelaksanaan pembangunan 21 waduk, 3 (tiga) diantaranya selesai. Waduk yang selesai dibangun hingga tahun 2014 adalah Waduk Gonggang (2011); Waduk Pandanduri (2014); dan Waduk Jatibarang (2014). Dengan demikian, hingga tahun 2014, total bendungan di Indonesia adalah 208 buah dengan total kapasitas tampung adalah 12,6 milyar m³, yang

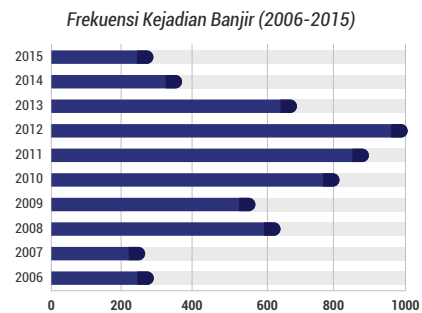
dimanfaatkan untuk air baku, irigasi, pengendalian banjir, serta sebagian untuk PLTA. Selain itu juga dilakukan rehabilitasi 82 bendungan, yang beberapa diantaranya dilaksanakan melalui pendanaan *Dam Operational Improvement / Safety Project (DOISP)*.

Pembangunan tampungan lainnya adalah berupa embung/situ/bangunan penampung air lainnya. Dari 730 buah yang ditargetkan untuk dibangun pada tahun 2010-2014, tercapai 1.332 buah pembangunan embung/situ/bangunan penampung air lainnya. Ke depan, pembangunan tampungan skala kecil masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air, baik untuk irigasi maupun untuk kebutuhan sehari-hari.

C. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR PENGENDALI DAYA RUSAK AIR

Selain mempunyai fungsi yang berdaya guna, sumber daya air juga mempunyai potensi daya perusak dalam bentuk banjir, banjir lahar/sedimen, dan abrasi pantai. Selain itu, dalam rangka pelestarian sumber daya air, aspek kualitas air juga perlu diperhatikan, dampak dari pencemaran perlu diminimalkan.

Frekuensi dan intensitas bencana banjir, kekeringan dan abrasi pantai meningkat, akibat kerusakan daerah tangkapan air dan perubahan iklim seperti terjadi pada DAS Ciliwung, Citarum dan Bengawan Solo. Tahun 2005 bencana banjir terjadi di 27 provinsi sebanyak 248 kejadian, dan meningkat menjadi 356 kejadian pada tahun 2007. Angka ini menunjukkan kecenderungan meningkat terus hingga kini.



Penanganan banjir di kota-kota besar juga masih perlu dioptimalkan, seperti: Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi,

Bandar Lampung, Pontianak, dll. Banjir di kawasan perkotaan tersebut disebabkan oleh buruknya sistem drainase mikro dan pembuangan sampah di badan sungai. Penambangan bahan mineral yang tidak terkendali di beberapa sungai memicu terjadinya degradasi dasar sungai serta erosi tebing sungai.

Disisi lain, tidak meratanya distribusi dan pola hujan di Indonesia menyebabkan beberapa wilayah mengalami kekeringan, seperti di Prov. NTT dan NTB. Pada daerah-daerah tersebut perlu dibangun tampungan-tampungan air skala kecil sehingga air dapat tetap ada pada saat musim kemarau.

Alih fungsi lahan, khususnya pada kawasan tangkapan air (hulu) yang menyebabkan kerusakan DAS juga berkontribusi pada kondisi kuantitas (debit) air sungai menjadi fluktuatif antara musim penghujan yang mengakibatkan banjir dan musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan. Hal lain yang menjadi penyebab bencana ini adalah perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan pola hujan di Indonesia, perubahan suhu permukaan wilayah daratan, kenaikan suhu permukaan laut, kenaikan tinggi muka air laut dan tren kejadian cuaca dan iklim ekstrim. Peningkatan erosi pada daerah hulu yang mengakibatkan sedimentasi di hilir juga menjadi penyebab banjir karena kapasitas sungai di hilir menjadi berkurang.

Terkait dengan hal tersebut, hingga tahun 2014 telah dilaksanakan:

- a. Pengendalian banjir yang terdiri dari pembangunan (1.450 km) dan rehabilitasi bangunan pengendali banjir (1.100 km).
- b. Pengendalian sedimen dan lahar yang terdiri dari pembangunan (150 buah) dan rehabilitasi bangunan pengendali lahar (140 buah).
- c. Pengaman pantai yang terdiri dari pembangunan (270 km) dan rehabilitasi bangunan pengaman pantai (20 km).

Pelaksanaan monitoring kualitas air oleh 33 BBWS/BWS, dengan kegiatan meliputi: 1) penentuan lokasi sampel; 2) pengambilan sampel dan pengukuran beberapa parameter di lapangan, serta pengawetan sampel; 3) analisis

sampel di laboratorium; serta 4) analisa data kualitas air. Monitoring kualitas air masih difokuskan pada sungai-sungai utama karena keterbatasan SDM dan pendanaan.

1.1.4. Dukungan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan

Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan (O&P) infrastruktur SDA mendukung upaya perwujudan kedaulatan pangan dan ketahanan air. Saat ini, pelaksanaan O&P belum optimal, antara lain disebabkan oleh: manual OP yang belum seluruhnya tersedia; kurangnya fasilitas OP; kurangnya kesiapan kelembagaan dan personil pelaksana OP; belum seluruhnya pedoman dan Angka Kebutuhan Nyata OP (AKNOP) tersedia; dan keterbatasan penganggaran kegiatan OP sesuai dengan AKNOP. Hal ini mengakibatkan belum semua infrastruktur SDA di-OP secara mantap, menyebabkan umur fungsional infrastruktur tersebut tidak sesuai dengan umur rencana. Kerusakan yang terjadi pun, jika tidak cepat tertangani, menyebabkan kebutuhan akan rehabilitasi meningkat dan hal ini membutuhkan dana yang lebih besar daripada pelaksanaan OP itu sendiri.

Guna menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur SDA, dilaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) seluruh infrastruktur SDA yang telah dibangun. Hingga tahun 2014, pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan meliputi:

1. OP jaringan irigasi seluas 3.79 juta hektar, yang terdiri dari irigasi permukaan seluas 2,4 juta hektar; irigasi rawa seluas 1,2 juta hektar; irigasi air tanah seluas 43.840 hektar; serta irigasi tambak seluas 155.098 hektar.
2. OP waduk/embung/situ/bangunan penampung air lainnya sebanyak 1.207 buah, yang terdiri atas 178 bendungan dan 1.029 embung/situ/bangunan penampung air lainnya.
3. OP sarana dan prasarana air baku dengan kapasitas 47,47 m³/detik.
OP sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 2.091,81 km, OP sarana dan prasarana pengendali sedimen/lahar gunung berapi sebanyak 293 buah, serta OP sarana dan prasarana pengaman pantai sepanjang 142,03 km.

1.1.5. Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air

Pelaksanaan pengelolaan SDA secara terpadu sebagaimana prinsip Integrated Water Resources Management (IWRM), saat ini belum terlaksana secara optimal.

Beberapa isu yang masih harus dihadapi terkait pengelolaan SDA secara terpadu dan menyeluruh, antara lain:

- a. **Koordinasi** antarinstansi, antarpemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota), dan antarpemilik kepentingan belum optimal akibat pendekatan yang bersifat sektoral dan pembagian urusan/tanggung jawab masih tumpang tindih dan kurang jelas. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, potensi konflik pengelolaan sumber daya air yang secara alamiah berbasis wilayah sungai, dapat terjadi akibat ketersediaan air yang tidak merata antarwilayah administrasi. Wadah-wadah koordinasi dibentuk sebagai upaya mengatasi hal ini, yaitu: Dewan SDA di tingkat Nasional dan provinsi serta Tim Koordinasi Pengelolaan SDA (TKPSDA) di tingkat wilayah sungai. Hingga 2014, sudah terbentuk 30 dewan SDA provinsi, masih 4 provinsi lagi yang belum membentuk dewan SDA (Prov. Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara). Sementara TKPSDA pada WS kewenangan Pusat sudah dibentuk pada 41 WS, masih 23 WS lagi yang belum terbentuk TKPSDA-nya.
- b. **Kesadaran dan partisipasi** masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air masih rendah, karena kurangnya pemahaman atas fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari air.
- c. **Kelembagaan** pengelolaan SDA baik di tingkat Pusat (Direktorat Jenderal SDA, BBWS/BWS), di tingkat daerah (Dinas, Balai Provinsi, Balai Kabupaten), hingga di tingkat unit khusus (PJT, pengelola irigasi, pengelola bendungan), perlu ditata dan diperkuat, untuk mencapai pemisahan fungsi yang jelas dengan tetap menjaga sinergi antarfungsi. Perkuatan ini juga harus didukung dengan SDM yang berkualitas dan kompeten.
- d. **Pendanaan** yang tidak berkelanjutan menyebabkan ketidakpastian akan pelaksanaan pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Keterbatasan pendanaan menuntut adanya penetapan skala prioritas berdasarkan urgensi dan kesiapan pelaksanaan serta terbatasnya pendanaan dari APBN yang memerlukan pembiayaan dari pemegang izin (Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air/BJPSDA).
- e. **Pengelolaan data dan informasi SDA**, perlu ditingkatkan keakuratannya sehingga dapat menjadi dasar bagi penyusunan rencana pengelolaan yang efisien dan tepat sasaran.

- f. Pasca pembatalan UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi (Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2015), pengelolaan SDA **kembali mengacu pada UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan**. Praktek pengelolaan sumber daya air yang selama ini mengacu kepada UU No. 7 tahun 2004 perlu segera direview dan diberikan payung hukumnya sementara Rancangan UU pengganti akan disusun, dengan pertimbangan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan, lembaga pengelolaan yang sudah ada saat ini harus tetap ada, dan kesepakatan/kontrak dengan pihak ke-3 harus tetap berjalan sampai akhir kontrak.

Sehubungan dengan hal tersebut, payung hukum pengelolaan SDA yang kembali mengacu pada UU No. 1 tahun 1974 dilaksanakan dengan dengan mengharmonisasikan dengan UU lain yang terkait pengelolaan SDA serta peraturan pelaksanaan UU No. 11 tahun 1974 yang telah mengakomodasi isu-isu kekinian sambil melaksanakan penyusunan RUU pengelolaan SDA yang baru.

Hingga 2015, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan SDA dan Peraturan Pemerintah No. 122 tentang Penyelenggaraan SPAM dan 21 Peraturan Menteri PUPR.

Pada tahun 2016 ditetapkan 1 (satu) Peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan SDA dan Penggunaan SDA.

- g. **Penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA pada masing-masing WS** masih perlu percepatan. Hingga tahun 2015, dari 64 WS kewenangan Pusat sudah 44 Pola Pengelolaan SDA WS kewenangan pusat yang ditetapkan oleh Menteri PU, sedangkan sisanya 5 (lima) Pola masih dalam proses penetapan dan 12 Pola masih dalam proses perbaikan. Adapun 3 Pola untuk WS yang baru menjadi kewenangan pusat berdasarkan Permen PUPR No.4/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan WS masih belum disusun. Sementara Rencana Pengelolaan SDA WS sudah ditetapkan 1 (satu) buah yaitu Rencana PSDA WS Bengawan Solo, sedangkan 6 Rencana masih dalam proses penetapan, 48 Rencana masih dalam proses perbaikan, dan sisanya 9 Rencana masih dalam proses penyusunan termasuk 3 Rencana untuk WS baru.

Tabel 1

Capaian Renstra 2005-2009 dan Renstra 2010-2014

No	Program/Sasaran Strategis /IKU/Ouput	Satuan	Realisasi Periode Kabinet Indonesia Bersatu I					
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERKELANJUTAN)							
A	Pendayagunaan Air Dalam Rangka Ketahanan Pangan							
1	Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi dan Rawa							
	a. Pembangunan/Peningkatan							
	1 Jaringan irigasi yang terbangun/ditingkatkan	ha	160.601	58.786	116.072	118.520	67.640	
	2 Jaringan irigasi air tanah yang terbangun	ha	1.435	1.490	13.88	1.060	2.548	
	3 Jaringan rawa yang terbangun/ditingkatkan	ha						
	4 Jaringan tata air tambak yang terbangun/ditingkatkan	ha						
	b. Rehabilitasi							
	1 Jaringan irigasi yang di rehabilitasi	ha	322.278	495.356	265.658	238.609	173.495	
	2 Jaringan irigasi air tanah yang di rehabilitasi	ha	2.062	599	2.580	675	3.033	
	3 Jaringan rawa yang di rehabilitasi	ha	63.976	110.000	187.388	459.234	194.608	
	4 Jaringan tata air tambak yang di rehabilitasi	ha						
	c. Operasi dan Pemeliharaan							
	1 Jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	ha	425.216	1.902.936	1.956.302	2.039.336	2.091.528	
	2 Jaringan irigasi air tanah yang dioperasikan dan dipelihara	ha	2.780	1.987	900	751	3.000	
	3 Jaringan rawa yang dioperasikan dan dipelihara	ha	207.470	257.856	451.291	365.505	637.954	
	4 Jaringan tata air tambak yang dioperasikan dan dipelihara	ha						

	Total S.D 2009*)	Target RPJMN 2010-2014	Target Review Renstra 2010-2014	Realisasi Periode Kabinet Indonesia Bersatu II				Program 2014
				2010	2011	2012	2013	
				Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	
9	10	11	12	13	14	15	16	
	521.619,32	129.380	425.000	115.000	66.249	94.792	77.741	75.957
	7.921,00	70 sumur /1400 ha	12.000	2.246	3.027	3.467	1.960	3.320
	-	10.000	225.000	8.080	70.509,53	49.043	32.632	42.121
	-	1.000	38.000	1.021	10.706	6.623	6.279	7.077
	1.495.396,00	1.340.000	1.700.000	293.044	284.137	589.443	523.361	331.454
	8.949,00	1.875 sumur /37.500 ha	38.000	8.882	10.790	7.634	8.465	6.360
	1.015.206,00	450.000	625.000	79.373	120.810	194.951	119.073	141.230
	-	175.000	60.000	2.800	7.297	27.945	10.118	34.900
	2.091.528,00	2.315.000	2.315.000	2.315.000	2.143.589	2.164.000	2.278.510	2.479.412
	3.000,00	2.192 sumur /43.840 ha	43.840	9.180	2.733	7.820	12.787	43.840
	637.954,00	1.200.000	1.100.000	1.107.996	1.040.005	1.033.000	1.027.393	1.275.352
	-	-	72.000	550	64.993	19.097	64.792	155.098

Tabel 1

Capaian Renstra 2005-2009 dan Renstra 2010-2014

No	Program/Sasaran Strategis /IKU/Output	Satuan	Realisasi Periode Kabinet Indonesia Bersatu I					
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERKELANJUTAN)								
B Ketahanan Air (Konservasi dan Penyediaan Air Baku)								
1	Peningkatan Kapasitas Tampung Sumber Air							
	a. Kapasitas Layanan Air Baku							
	1 Prasarana dan sarana air baku yang terbangun	m ³ /detik	2,89	0,69	0,99	3,95	4,14	
	2 Prasarana air baku yang di rehabilitasi	m ³ /detik						
	3 Prasarana dan sarana air baku yang di operasikan dan dipelihara	m ³ /detik						
	b. Pembangunan/Peningkatan							
	1 Waduk - Selesai dibangun	waduk	-	2	4	3	2	
	- Dalam Pelaksanaan	waduk						
	2 Embung/situ/bangunan penampung air lainnya yang dibangun	buah	69	130	121	111	12	
	c. Rehabilitasi							
	1 Waduk yang di rehabilitasi	waduk						
	2 Embung/situ/bangunan penampung air lainnya yang di rehabilitasi	buah						
	d. Operasi dan Pemeliharaan							
	1 Embung/situ/bangunan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara	buah	16	9	47	119	54	
	2 Kawasan sumber air yang dilindungi/dikonservasi	kawasan						
C Berkurangnya Luas Kawasan yang Terkena Dampak Banjir								
1	Luas Kawasan yang Terlindungi dari Bahaya Banjir							
	a. Prasarana dan sarana pengendali banjir							
	2 Rehabilitasi							
	a) Prasarana Pengendali banjir yang direhabilitasi	km						

	Total S.D 2009*)	Target RPJMN 2010-2014	Target Review Renstra 2010-2014	Realisasi Periode Kabinet Indonesia Bersatu II				Program 2014
				2010	2011	2012	2013	
				Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	
9	10	11	12	13	14	15	16	
	12,66	43,40	56,00	6,31	8,60	14,94	13,39	8,20
	-	12,30	24,00	3,76	4,74	4,52	15,56	5,54
	-	44,75	44,75	9,88	13,17	15,16	23,61	47,47
	11,00	11	8	-	1	-	1	2
					Gonggang			Jatibarang, Pandanduri
	-	1	21	7	8	9	21	28
	443,00	158	730	32	105	175	509	511
	-	29	91	12	18	13	29	10
	-	289	300	21	41	74	132	74
	119,00	166	1.200	65	298	411	706	1.207
	-	15	36	7	9	10	36	12
	-	386	1.100	171,19	143,62	321,84	302,24	192,83

Tabel 1

Capaian Renstra 2005-2009 dan Renstra 2010-2014

No	Program/Sasaran Strategis /IKU/Output	Satuan	Realisasi Periode Kabinet Indonesia Bersatu I				
			2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERKELANJUTAN)						
C	Berkurangnya Luas Kawasan yang Terkena Dampak Banjir						
	yang direhabilitasi						
	b) Pengendali sedimen/lahar yang direhabilitasi	buah					
	c) Prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi	km					
3	Operasi dan Pemeliharaan						
	a) Prasarana Pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara	km	123,00	225,00	139,28	48,24	163,15
	b) Pengendali sedimen/lahar yang dioperasikan dan dipelihara	buah					
	c) Prasarana pengaman pantai yang dioperasikan dan dipelihara	km					

- h. Adanya keterpaduan dengan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Berdasarkan Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, telah ditetapkan 35 WPS yang menjadi panduan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR, baik antar Eselon I di lingkungan Kementerian PUPR maupun antar K/L terkait. Dengan adanya keterpaduan pembangunan infrastruktur di dalam 1 (satu) WPS dapat menjadi pengungkit ekonomi yang bersinergi dengan potensi dan kekurangan wilayah tersebut serta selaras dengan kelestarian lingkungan.

1.2. Capaian Pelaksanaan Hingga Tahun 2018

1.2.1. Capaian Sasaran Pokok Pembangunan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, diamanatkan

	Total S.D 2009*)	Target RPJMN 2010-2014	Target Review Renstra 2010-2014	Realisasi Periode Kabinet Indonesia Bersatu II				Program 2014
				2010	2011	2012	2013	
				Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	
9	10	11	12	13	14	15	16	
-	85	140	5	18	49	57	11	
-	50	20	3,00	2,45	4,46	4,87	3,32	
225,00	2.000	2.000	611,00	648,00	1.228,00	1.168,71	2.091,81	
-	150	150	11	5	47	76	293	
-	100	100	10,00	25,35	26,00	62,10	142,03	

bahwa evaluasi RPJMN dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN. Evaluasi pelaksanaan RPJMN perlu dilakukan untuk menilai kinerja dari suatu program dan dilaksanakan paling sedikit satu kali dan paling lambat satu tahun sebelum berakhirnya periode RPJMN.

Guna memenuhi amanat tersebut, maka pada tahun 2017 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melaksanakan Evaluasi Paruh Waktu berdasarkan hasil pembangunan dua tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Evaluasi Paruh Waktu disusun untuk melihat capaian pembangunan dalam rangka melaksanakan Nawacita yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dengan fokus pada capaian sasaran pokok pembangunan.

Evaluasi dilakukan pada sasaran pokok pembangunan Nasional sebagaimana

tercantum pada RPJMN Buku I Tabel 5.1. Sasaran pokok pembangunan Nasional yang terkait dengan Direktorat Jenderal SDA meliputi:

1. Sasaran pembangunan sektor unggulan : kedaulatan pangan, melalui:
 - a. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi air permukaan, air tanah, dan rawa (juta hektar)
 - b. Rehabilitasi jaringan irigasi air permukaan, air tanah, dan rawa (juta hektar)
 - c. Pembangunan dan peningkatan irigasi tambak (ribu hektar)
 - d. Pembangunan waduk (waduk)
2. Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas : ketahanan air, melalui:
 - a. Kapasitas air baku nasional
 - b. Pembangunan waduk (kumulatif 5 tahun)
 - c. Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk
 - d. Kapasitas/daya tampung
 - e. Pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi (permukaan, air tanah, pompa, rawa, dan tambak)
 - f. Rata-rata kapasitas desain pengendalian struktural dan non-struktural banjir

Terdapat 4 (empat) notifikasi yang digunakan Bappenas mengevaluasi capaian sasaran pokok pembangunan nasional, yaitu:

- | | |
|--|--|
|  Perlu kerja keras |  Sangat sulit tercapai |
|  Sudah tercapai / <i>on-track</i> |  Belum dapat diberikan notifikasi |

Pada tahun 2015-2018, dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan sektor unggulan kedaulatan pangan, sudah dilaksanakan:

- a. Pembangunan jaringan irigasi dengan layanan seluas 865.393 Ha jaringan irigasi dari target 1 juta hektar, bersama-sama dengan Pemerintah Daerah melalui pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pembangunan ini meliputi jaringan irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, dan irigasi tambak.
- b. Rehabilitasi jaringan irigasi dengan layanan seluas 2,65 juta hektar, dari target 3 juta hektar, bersama-sama dengan Pemerintah Daerah melalui pendanaan

DAK. Rehabilitasi ini meliputi jaringan irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, dan irigasi tambak.

- c. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tambak dengan layanan seluas 84.313 Ha atau kumulatif 274 ribu hektar dari target 304,75 ribu hektar.
- d. Melanjutkan pembangunan 16 bendungan on-going dari periode Renstra sebelumnya dan melaksanakan pembangunan 37 bendungan baru dari target 49 bendungan, antara lain Bendungan Keureuto di Aceh, Bendungan Lau Simeme di Sumatera Utara, Bendungan Sindangheula di Banten, Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Jawa Barat, Bendungan Ladongi di Sulawesi Tenggara, serta Bendungan Tanju dan Mila di NTB, dll.

Pelaksanaan sasaran pokok tersebut dihadapkan pada beberapa kendala, antara lain:

1. Dari 7,15 juta ha areal irigasi permukaan yang telah dibangun hingga tahun 2014:
 - a. Sekitar 11% (\pm 760 ha) luasan daerah irigasi yang ketersediaan airnya dapat dijamin melalui bendungan, sedangkan sisanya masih mengandalkan debit sungai atau mata air (melalui bendung).
 - b. Sebesar 46% jaringan irigasi permukaan dalam kondisi rusak. Kerusakan terbesar pada jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah (lebih dari 50% jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah mengalami kerusakan).
 - c. Sebagian jaringan irigasi tidak berfungsi optimal akibat bencana alam serta belum lengkapnya sistem jaringan irigasi.
2. Alih fungsi lahan pertanian produktif semakin tinggi, pada kurun waktu 2006-2013 mencapai 100-110 ribu ha/tahun. Keterbatasan lahan dan petani menjadikan pembangunan jaringan irigasi baru relatif sulit dilakukan.
3. Penggunaan air irigasi cenderung boros karena rendahnya efisiensi namun dengan adanya kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan maka efisiensi saluran secara rerata diharapkan meningkat 5-10%.
4. Partisipasi masyarakat petani dan kinerja kelembagaan pengelolaan irigasi belum optimal.
5. Permasalahan lahan serta penolakan warga dalam pembangunan bendungan.

Keterlambatan penyediaan alokasi dana untuk pembebasan tanah dari LMAN, proses pembebasan lahan yang tidak tuntas atau belum dilaksanakan oleh Pemda, waktu pembayaran ganti rugi tanah yang tidak cukup, menyebabkan pelaksanaan fisik di lapangan tidak berjalan dengan optimal.

6. Permasalahan pada kegiatan-kegiatan yang bersumber dari pinjaman luar negeri (*loan*), antara lain keterlambatan proses pengefektifan loan sehingga waktu persiapan lelang terbatas, prosedur administrasi pengadaan yang berkaitan dengan penyiapan pelaksanaan lelang ditingkat lembaga Donor memakan waktu panjang sehingga waktu pelelangan tidak mencukupi.
7. Terdapat konflik dalam pemrograman antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah akibat perbedaan data luas Daerah Irigasi yang masih menggunakan data tabular.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan terkait dengan kendala yang dihadapi tersebut, diantaranya:

1. Pembangunan bendungan *multipurpose* untuk meningkatkan keberlanjutan layanan air untuk irigasi. Pada tahun 2015-2019 ditargetkan dengan selesainya pembangunan 29 bendungan, layanan air untuk irigasi dari bendungan meningkat dari 11% menjadi 14,28%.
2. Meningkatkan penerapan pengelolaan irigasi partisipatif bersama petani setempat dan mulai menerapkan konsep Modernisasi Irigasi yang menyentuh *hard* dan *soft component* masing-masing Daerah Irigasi sehingga diharapkan tercapai efisiensi optimal.
3. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk penerapan irigasi hemat air, contohnya melalui SRI (*System of Rice Intensification*).
4. Melakukan koordinasi dengan Pemda untuk penanganan jaringan irigasi yang rusak, salah satunya dengan memfokuskan pendanaan DAK untuk penanganan jaringan rusak tersebut.
5. Bersama (mendorong) Pemda dan Kementerian terkait lainnya dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pemilik lahan tentang program-program Pemerintah, menjelaskan maksud dan tujuan program pembangunan yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas (*soft approach*).

6. Melaksanakan perbaikan data luasan dengan pendekatan data spasial melalui kegiatan *One Map Policy*, sehingga konflik pemrograman terkait kewenangan masing-masing Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dapat dihindari.

Sementara, dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan sektor unggulan ketahanan air, infrastruktur dasar, dan konektivitas, sudah dilaksanakan:

- a. Peningkatan kapasitas layanan air baku, dari 51,44 m³/detik menjadi 76,36 m³/detik dari target 118,6 m³/detik.
- b. Pembangunan 37 bendungan baru dari target 49 bendungan baru.
- c. Penyediaan air irigasi permukaan bersumber dari waduk, dari 11% areal terlayani menjadi 12%.
- d. Pembangunan jaringan irigasi dengan layanan seluas 865.393 Ha jaringan irigasi dari target 1 juta hektar.
- e. Pelaksanaan rata-rata kapasitas desain pengendalian struktural pada kapasitas 2-50 tahun dari target kapasitas 10-100 tahun.

Pelaksanaan sasaran pokok tersebut dihadapkan pada beberapa kendala, antara lain:

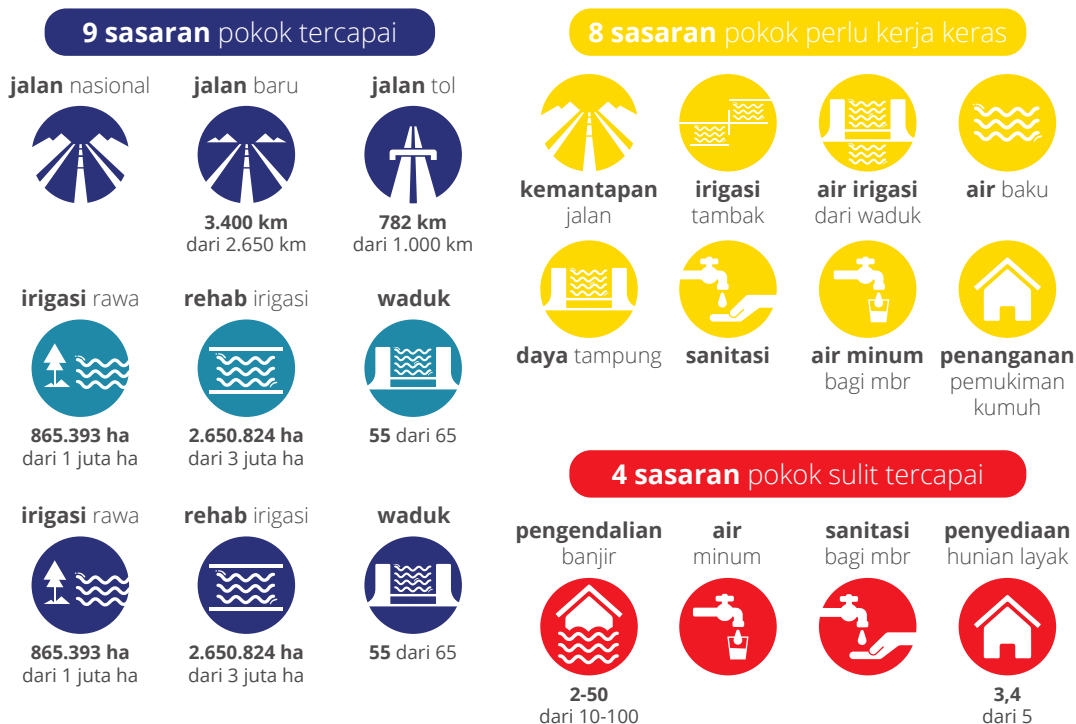
1. Pembebasan lahan terkendala akibat okupasi masyarakat di tanah Negara, penolakan oleh masyarakat, ketidakjelasan kepemilikan tanah serta bersinggungan dengan tanah karakteristik khusus (tanah wakaf, tanah kas desa, tanah kehutanan, dll). Keterlambatan pembebasan lahan dikarenakan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data kepemilikan tanah yang berulang akibat ketidaktepatan data, dan belum adanya kesepakatan bentuk atau nilai ganti rugi kepada masyarakat. Di samping itu terdapat masalah administrasi seperti loan yang belum efektif dan keterlambatan ijin kontrak tahun jamak (*multiyears contract*, MYC).
2. Dalam hal penyediaan air baku untuk air bersih, masih terdapat permasalahan terkait pemanfaatan air baku menjadi air bersih dan air minum. Di beberapa wilayah, air baku yang sudah disiapkan belum diolah lebih lanjut di *Water Treatment Plant* (WTP) dan disalurkan melalui pipa distribusi PDAM, sehingga manfaatnya belum sampai hingga masyarakat.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan terkait dengan kendala yang dihadapi tersebut, diantaranya:

1. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif secara langsung dengan masyarakat pemilik lahan dengan menjelaskan maksud dan tujuan program pembangunan yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas (*soft approach*), serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara berkala antara pelaksana pengadaan tanah dengan K/L terkait.
2. Percepatan pemanfaatan bendungan selesai untuk irigasi dan air baku, sehingga dapat meningkatkan layanan waduk untuk irigasi dan meningkatkan kapasitas layanan air baku.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Pemerintah Daerah untuk percepatan pemanfaatan kapasitas air baku yang sudah disediakan.
4. Perencanaan dilakukan secara terintegrasi dan mempertimbangkan faktor *climate change* dan perubahan tata guna lahan.

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa indikator sasaran pokok yang perlu kerja keras untuk mencapai target dan ada sasaran pokok yang akan sulit tercapai hingga tahun 2019:

- Sasaran pokok perlu kerja keras: layanan irigasi dari waduk (14 % dari target 20 %), pembangunan sarana prasarana penyediaan air baku (81,36 m³/detik dari target 118,6 m³/detik), dan penambahan kapasitas daya tampung (14,91 milyar m³ dari target 19 milyar m³).
- Sasaran pokok sulit tercapai: kapasitas desain pengendalian banjir (2-50 tahun dari target 10-100 tahun).



Gambar 10 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Sasaran Pokok Pembangunan Nasional pada Pelaksanaan RPJMN 2015-2019 Tahun ke-4

1.2.2. Capaian Sasaran Sasaran Strategis dan Sasaran Program

Berdasarkan peta strategi Kementerian PUPR 2015-2019, Direktorat Jenderal SDA mendukung Sasaran Strategis (SS), yaitu SS2 meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. SS ini didukung oleh 2 (dua) Sasaran Program (SP), yaitu: SP2 yaitu meningkatnya ketahanan air dan SP3 yaitu meningkatnya pengendalian lumpur Sidoarjo.

Pada tahun 2015 telah dicapai SS sebesar 52,67%, lalu meningkat menjadi 53,14% pada tahun 2016 dan menjadi 54,51% pada tahun 2017. Tahun 2018, capaian SS mencapai 82,94%. Peningkatan yang cukup signifikan ini disebabkan oleh adanya perubahan cara mengukur SS dan SP. Pengukuran tersebut

menggunakan sistem *cascading*, dimana capaian SS dibentuk oleh capaian 2 (dua) Sasaran Program (SP) yang membentuknya, dan capaian SP dibentuk oleh capaian Sasaran Kegiatan (SK) pada level dibawahnya.

Tabel 2
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2015-2018

Sasaran Strategis	2015	2016	2017	2018
SS2 meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi	52,67	53,14	54,51	82,94

SS2 dibentuk oleh 2 (dua) Sasaran Program (SP), yaitu: SP2. Meningkatnya ketahanan air dan SP3. Meningkatnya pengendalian lumpur Sidoarjo. SP2. Meningkatnya ketahanan air diukur oleh 6 (enam) indikator, yaitu:

1. Tingkat layanan sarana prasarana air baku
Hingga tahun 2018, kapasitas layanan sarana prasarana air baku mencapai 76,36 m³/detik atau terdapat tambahan kapasitas layanan sebesar 24,92 m³/detik dari tahun 2014.
2. Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air
Hingga tahun 2018, terdapat 9 (sembilan) bendungan yang selesai dibangun, yaitu: Rajui dan Payaseunara (Aceh), Bendungan Jatigede (Jawa Barat), Bajulmati dan Nipah (Jawa Timur), Titab (Bali), Raknamo (NTT) dan Tanju (NTB) serta Teritip (Kalimantan Timur). Dengan selesainya bendungan tersebut ditambah dengan terbangunnya 942 embung, kapasitas tampung sumber air meningkat menjadi 13,65 milyar m³, atau meningkat sekitar 1,096 milyar m³.
3. Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak
Hingga tahun 2018, dalam rangka meningkatkan kapasitas pengendalian daya rusak air, telah dilaksanakan:
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 882,41 Km, berupa normalisasi sungai, tanggul sungai, tebing, kanal banjir.
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana pengamanan pantai sepanjang 159,27 Km, berupa *breakwater* dan *seawall*.

- c. Pembangunan sarana dan prasarana pengendali sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 253 buah, berupa check dam dan sabo dam.
4. Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA

Hingga tahun 2018, dalam rangka keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA dilaksanakan, diukur indeks *River Basin Organization* (RBO Index) yang menggunakan 14 indikator RBO *Benchmarking*. Tahun 2015 RBO index adalah 2,24 dan tahun 2018 meningkat menjadi 2,94. Hal ini didukung oleh pelaksanaan:

 - a. Penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pusat. Hingga tahun 2018 sudah ditetapkan 58 dokumen pola dan 24 dokumen rencana pengelolaan SDA dari 64 WS kewenangan Pemerintah Pusat.
 - b. Pengelolaan data hidrologi dan kualitas air.
 - c. Pengelolaan dan peningkatan kelembagaan pengelolaan SDA. Hingga tahun 2018, sudah terbentuk wadah-wadah koordinasi dalam rangka pengelolaan SDA, antara lain:
 - Pembentukan 48 Tim Koordinasi Pengelolaan SDA (TKPSDA), sebagai wadah koordinasi seluruh stakeholder terkait pengelolaan sungai pada WS kewenangan Pemerintah Pusat.
 - Pembentukan Komisi Irigasi (Komir) sebagai wadah koordinasi dan komunikasi Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), dan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) dalam pengelolaan irigasi di suatu wilayah. Hingga tahun 2018 baru ada sekitar 18 Komir ditingkat provinsi (dari 34 provinsi) dan sekitar 95 Komis ditingkat kabupaten/kota (dari 514 kabupaten/kota di Indonesia).
Komisi Irigasi menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Lamongan, Himpunan Petani Pemakai Air/Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air pada tingkat daerah irigasi dan penggunaan jaringan irigasi untuk keperluan lainnya di Kabupaten Lamongan
 - d. Penyusunan rekomtek pemanfaatan SDA sebagai dasar pemberian izin penggunaan dan pengusahaan SDA.

5. Tingkat kinerja layanan irigasi (%)
Hingga tahun 2018, dalam rangka meningkatkan kinerja layanan irigasi, telah dilaksanakan:
 - a. Pembangunan jaringan irigasi untuk melayani daerah irigasi seluas 865.393 hektar, terdiri atas:
 - Melalui pendanaan APBN seluas 311.420 hektar, meliputi irigasi permukaan (234.613 hektar), irigasi rawa (58.901 hektar), irigasi air tanah (7.557 hektar), dan irigasi tambak (10.349 hektar).
 - Melalui pendanaan DAK seluas 553.973 hektar, meliputi pembangunan (47.787 hektar) dan peningkatan (506.186 hektar).
 - b. Rehabilitasi jaringan irigasi untuk melayani daerah irigasi seluas 2.650.824 hektar, terdiri atas:
 - Melalui pendanaan APBN seluas 1.212.201 hektar, meliputi irigasi permukaan (868.646 hektar), irigasi rawa (251.284 hektar), irigasi air tanah (18.307 hektar), dan irigasi tambak (73.964 hektar).
 - Melalui pendanaan DAK seluas 1.438.623 hektar.
6. Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan (%)
Hingga tahun 2018, dalam rangka meningkatkan kinerja operasi dan pemeliharaan, telah dilaksanakan operasi dan pemeliharaan terhadap seluruh infrastruktur SDA, baik berupa aset bangunan, maupun wadah alami seperti danau dan situ.

Sementara dalam rangka mewujudkan SP3. Meningkatnya pengendalian lumpur Sidoarjo, terdapat 1 (satu) indikator, yaitu: Tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo (%). Sasaran Program (SP3) ini menjadi bagian kinerja Direktorat Jenderal SDA mulai tahun 2017, yaitu sejak dileburnya fungsi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) ke dalam fungsi Direktorat Jenderal SDA (Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015).

Hingga tahun 2018, upaya peningkatan layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo dilaksanakan melalui:

- a. Pengaliran lumpur Sidoarjo ke Kali Porong sebanyak 112 juta m³/tahun dari target 140 juta m³/tahun slurry.

- b. Peningkatan tanggul 2-2,5 Km untuk mempertahankan fungsi tanggul sebagai penahan lumpur pada tinggi rata-rata elevasi ± 11 m dpl.
- c. Upaya pemulihan kehidupan sosial masyarakat melalui pengurangan dampak sosial masyarakat.

Tabel 3

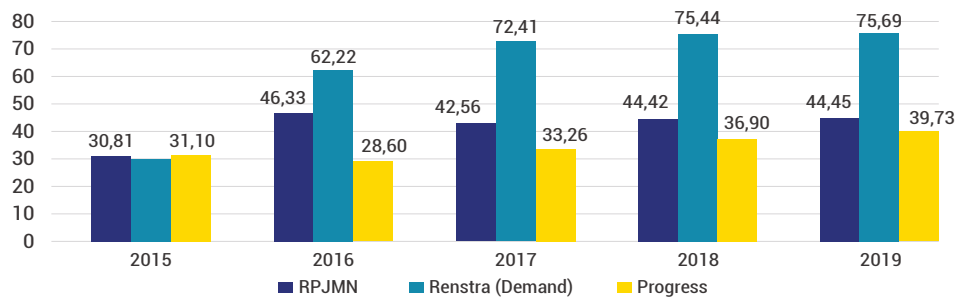
Capaian Sasaran Program Tahun 2015-2018

Sasaran Strategis	2015	2016	2017	2018
SP2. Meningkatnya ketahanan air (%)	39,45	42,61	45,32	82,7*
SP3. Meningkatnya pengendalian lumpur Sidoarjo (%)	-	-	60	85,75

* Dihitung berdasarkan cara pengukuran yang baru

1.2.3. Evaluasi Pendanaan

Pendanaan pengelolaan SDA melalui anggaran Direktorat Jenderal SDA pada tahun 2015-2018 cenderung mengalami peningkatan. Namun, dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum pada Renstra Direktorat Jenderal SDA 2015-2019, rata-rata alokasi anggaran tersebut adalah separuh dari anggaran yang dibutuhkan.



Gambar 11 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal SDA 2015-2018

Implikasi dari keterbatasan ini adalah Direktorat Jenderal SDA perlu menentukan prioritas diantara banyak kebutuhan dan isu yang harus ditangani. Prioritas dilakukan berdasarkan urutan prioritas untuk kemudian dilakukan penyaringan berdasarkan kriteria penyaringan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional, maka pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak lagi dapat menjadi satu-satunya yang dapat diandalkan. Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat berkontribusi strategis terhadap pencapaian sasaran-sasaran tersebut, terutama dalam pencapaian target pembangunan 1 juta hektar irigasi dan rehabilitasi 3 juta hektar irigasi. Sasaran lainnya yang juga memerlukan dukungan Pemerintah Daerah adalah penyediaan air baku untuk air bersih. Sektor swasta juga dapat berperan, misalnya dalam hal pemanfaatan sumber air sebagai sumber energi.

Ke depan, perlu optimalisasi pemanfaatan alternative pembiayaan selain dari APBN untuk mendanai pembangunan, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya air.

1.2.4. Dukungan Pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pencapaian target pembangunan 1 juta hektar daerah irigasi dan rehabilitasi 3 juta hektar daerah irigasi tidak hanya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal SDA (Pemerintah Pusat) melalui APBN, namun juga didukung pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah, baik melalui APBD maupun DAK. Mekanisme DAK selama 3 (tiga) tahun belakangan ini sudah mengalami peningkatan, kriteria teknis juga semakin dipertajam.

DAK merupakan Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur, terdapat 5 (lima) sub bidang penggunaan DAK di Kementerian PUPR, yaitu, sub bidang jalan, sub bidang infrastruktur irigasi, sub bidang air minum, sub bidang sanitasi, dan sub bidang perumahan. Sub bidang infrastruktur irigasi sendiri ditujukan untuk mendukung pemenuhan ketahanan pangan melalui kegiatan pembangunan, peningkatan, serta rehabilitasi jaringan irigasi.



Bendungan Logung
Jawa Tengah

DAK sub bidang infrastruktur irigasi terbagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu: DAK regular untuk provinsi dan kabupaten/kota; DAK afirmasi untuk kabupaten/kota daerah tertinggal, perbatasan, terluar, wilayah Indonesia; DAK infrastruktur publik daerah; serta DAK Penugasan untuk urusan daerah dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional dengan menu yang terbatas dan subjek yang ditentukan.

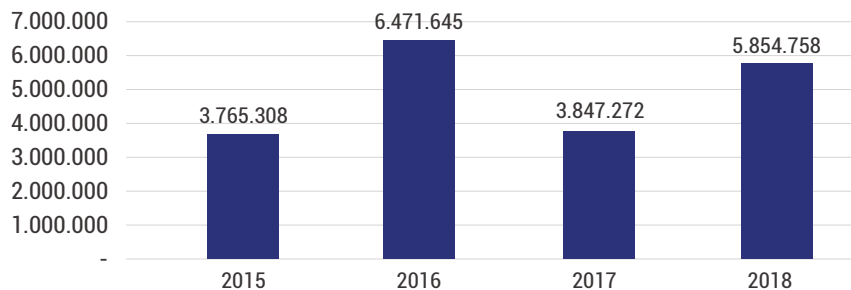
Pada tahun 2015, alokasi DAK untuk sub bidang infrastruktur irigasi adalah Rp 3,76 Trilyun. Pada tahun 2016, alokasi ini meningkat menjadi Rp 6,47 Trilyun. Pada tahun 2017, alokasi DAK untuk sub bidang infrastruktur irigasi adalah 3,85 Trilyun, sementara pada tahun 2018 mencapai Rp

Kenaikan pendanaan melalui DAK ini cukup baik dalam mendukung pencapaian target pembangunan 1 juta hektar dan rehabilitasi 3 juta hektar. Pada tahun 2015 dilaksanakan pembangunan jaringan irigasi untuk melayani daerah irigasi seluas sekitar 4 ribu hektar, peningkatan jaringan irigasi pada daerah irigasi seluas sekitar 114 ribu hektar dan rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi seluas sekitar 685 ribu hektar.

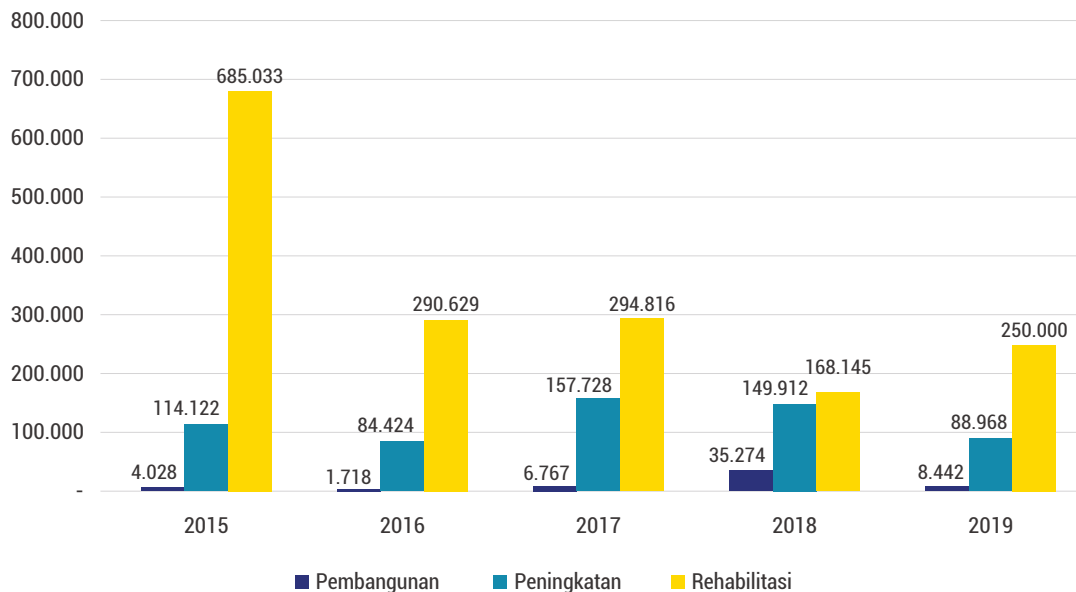
Sementara pada tahun 2016, dilaksanakan pembangunan jaringan irigasi untuk melayani daerah irigasi seluas sekitar 1.700 hektar, peningkatan jaringan irigasi pada daerah irigasi seluas sekitar 84 ribu hektar dan rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi seluas sekitar 290 ribu hektar.

Di tahun 2017, dilaksanakan pembangunan jaringan irigasi untuk melayani daerah irigasi seluas hampir 6 ribu hektar, peningkatan jaringan irigasi pada daerah irigasi seluas sekitar 157 ribu hektar dan rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi seluas sekitar 294 ribu hektar.

Pada tahun 2018, sudah dilaksanakan pembangunan jaringan irigasi untuk daerah irigasi seluas 35 ribu hektar, peningkatan jaringan irigasi untuk daerah irigasi seluas 149 ribu hektar, dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk daerah irigasi seluas 168 ribu hektar.



Gambar 12 Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Infrastruktur Irigasi Tahun 2015-2018



Gambar 13 Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Daerah Irigasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015-2018



DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Halaman ini sengaja dikosongkan

bab 2
Visi, Misi, Tujuan
Dan Sasaran
Strategis

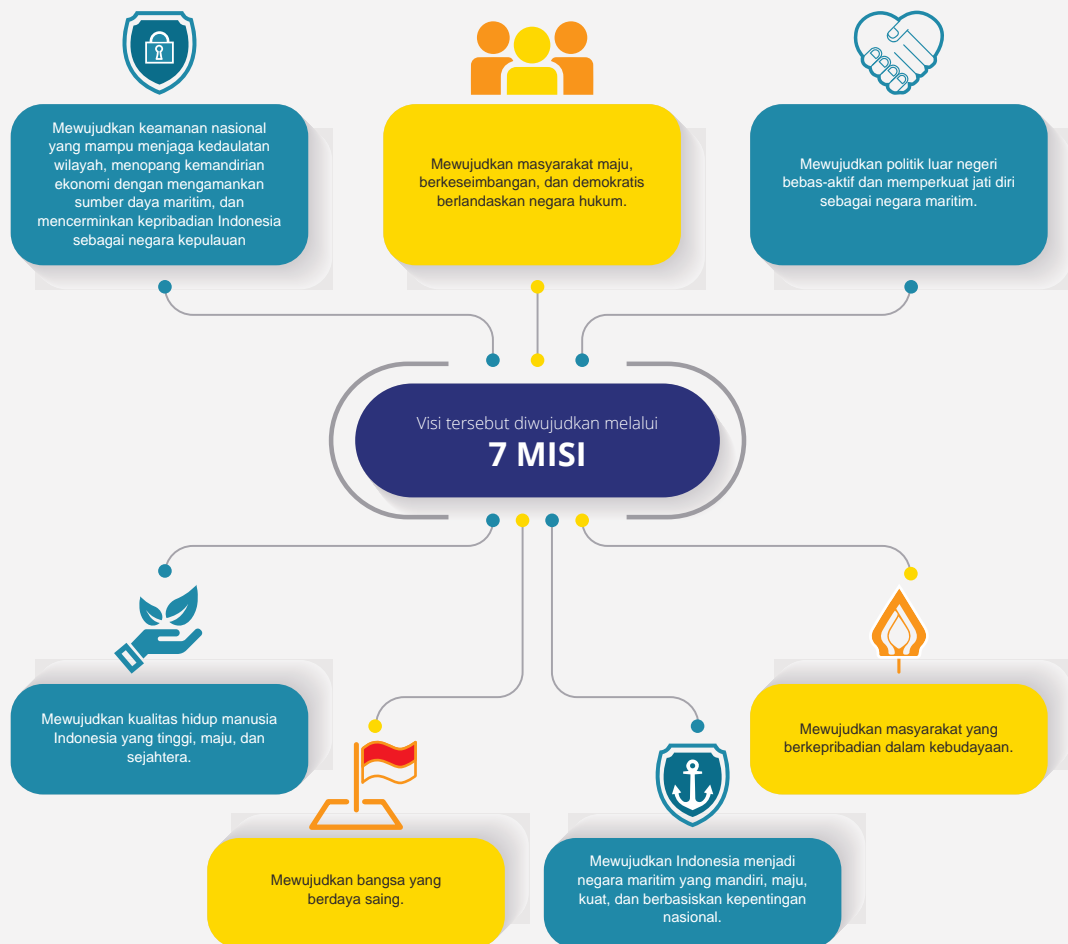


DI. Colo
Jawa Tengah



Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan seperti apa yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi pembangunan nasional sebagaimana tercantum pada RPJMN 2015-2019 adalah:

Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong



2.1. VISI DAN MISI KEMENTERIAN PUPR

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 – 2019 sebagaimana tercantum pada Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.”

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

Guna mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai rumusan umum mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi, yang harus dapat menjembatani penjabaran visi ke dalam tujuan. Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 – 2019 adalah:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan

- energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua';
 4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
 5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, sebagai bagian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung pencapaian visi kementerian melalui pencapaian misi ke-1, yaitu: *“mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.”*

2.2. PENJABARAN VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN PUPR KE DALAM TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL SDA

Untuk mewujudkan visi Kementerian PUPR tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menjabarkan visi Kementerian PUPR tersebut ke dalam tujuan dan sasaran program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya. Penjabaran visi dan misi tersebut juga mempertimbangkan pencapaian pembangunan terkait bidang Sumber

Daya Air 2010-2014, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun ke depan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015-2019.

Dari visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dirumuskan tujuan-tujuan yang akan dilaksanakan selama periode Renstra Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tahun 2015 – 2019 dalam rangka mendukung upaya pencapaian target dukungan kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketahanan air serta keterpaduan pembangunan bidang PUPR dengan pengembangan wilayah, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PUPR sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis.

Tujuan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian PUPR untuk pencapaian mencapai sasaran dan tujuan Kementerian PUPR serta sasaran-sasaran Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2015-2019 meliputi:

1. Tujuan 1 : Menyelenggarakan pembangunan Infrastruktur PUPR bidang sumber daya air untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
2. Tujuan 2 : Menyelenggarakan keterpaduan tatakelola pengelolaan SDA yang terpadu dan berkelanjutan untuk mengurangi disparitas pembangunan wilayah guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
3. Tujuan 3 : Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi Direktorat Jenderal SDA yang meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung, pengendalian dan pengawasan, serta sumber daya yang lainnya untuk meningkatkan kehandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat bidang sumber daya air yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2.3. SASARAN STRATEGIS, SASARAN PROGRAM, DAN SASARAN KEGIATAN

Berdasarkan Peta Strategi Kementerian PUPR 2015-2019, terdapat 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

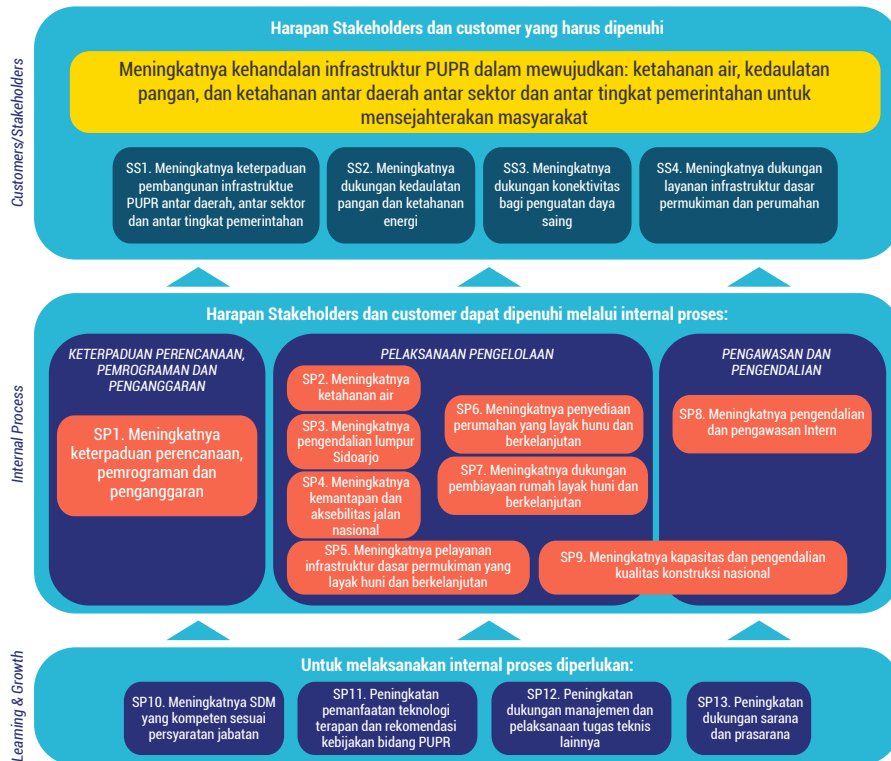
1. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan (SS1).
2. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi (SS2).
3. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing (SS3).
4. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan (SS4).

Berdasarkan hal tersebut, **Direktorat Jenderal SDA mendukung perwujudan SS2. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, Direktorat Jenderal SDA menetapkan 2 (dua) sasaran program yang menggambarkan kinerja Direktorat Jenderal SDA yang akan dicapai dalam rangka pencapaian sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya ketahanan air (SP2)
2. Meningkatnya pengendalian lumpur Sidoarjo (SP3)





Gambar 14 Peta Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019

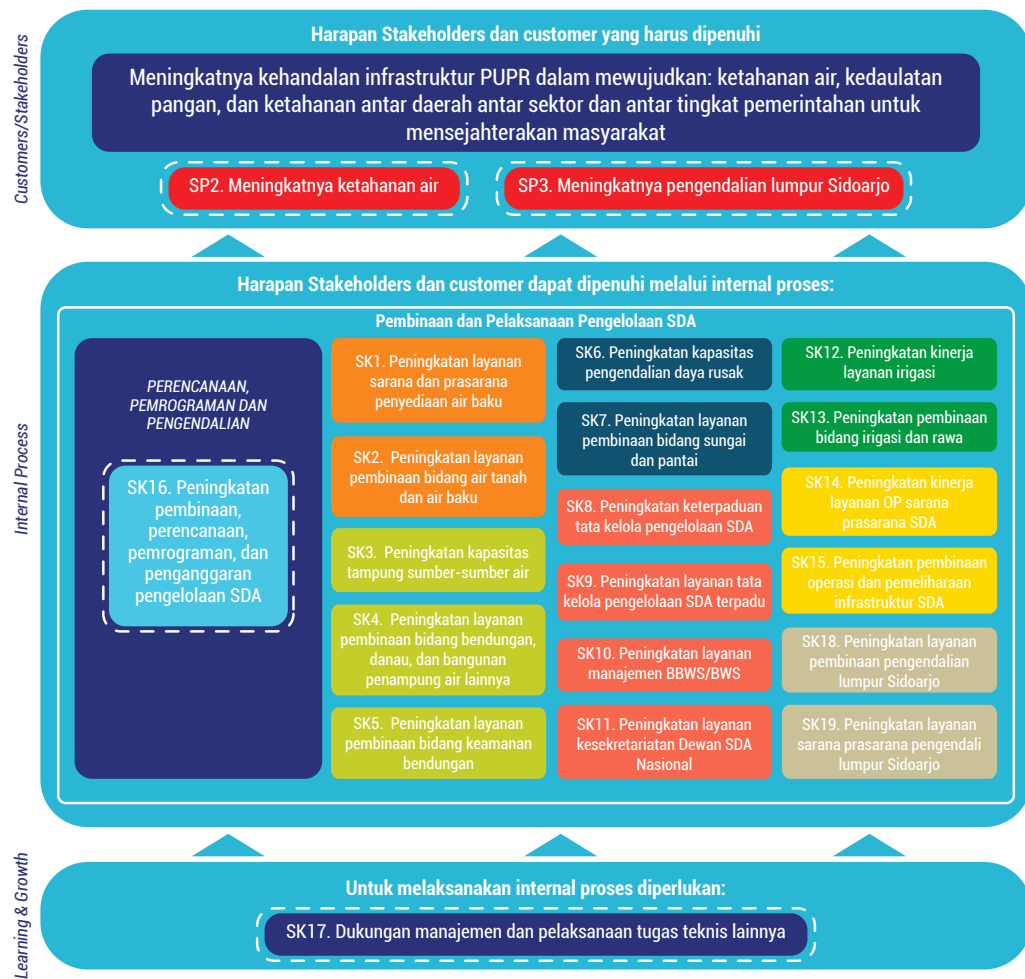
Guna mewujudkan sasaran program, pada internal process dilakukan beberapa kegiatan, yang masing-masing kegiatan tersebut memiliki sasaran kegiatan (SK) guna mencapai sasaran program tersebut. Masing-masing sasaran program memiliki indikator yang masing-masing indikator tersebut didukung oleh sasaran-sasaran kegiatan terkait.

Dalam rangka mewujudkan SP2. Meningkatnya ketahanan air, terdapat 6 (enam) indikator, yaitu:

1. Tingkat layanan sarana prasarana air baku (%)
2. Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air (%)
3. Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak (%)
4. Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA (%)

5. Tingkat kinerja layanan irigasi (%)
6. Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan (%)

Sementara dalam rangka mewujudkan SP3. Meningkatnya pengendalian lumpur Sidoarjo, terdapat 1 (satu) indikator, yaitu: Tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo (%).



Gambar 15 Peta Strategi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Masing-masing indikator tersebut didukung oleh pencapaian sasaran-sasaran kegiatan secara *cascade*. Masing-masing sasaran kegiatan diwujudkan oleh kegiatan yang dilaksanakan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, baik di Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, Pusat, maupun di BBWS/BWS. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat, Direktorat dan Pusat fokus pada pengaturan, pembinaan dan pengawasan (Turbinwas), sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS fokus pada pelaksanaan (konstruksi serta operasi dan pemeliharaan).

Masing-masing sasaran kegiatan yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian sasaran program melalui indikator-indikator terkait, sesuai dengan bobot yang telah disepakati. Bobot ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya:

- a. Dukungannya terhadap perwujudan prioritas nasional.
- b. Alokasi anggaran tiap tahunnya.
- c. Pertimbangan beban target terhadap perwujudan sasaran program dan sasaran strategis.

Lebih lanjut terkait pembobotan ini dapat dilihat pada LAMPIRAN 5.

Berdasarkan Peta Strategi Direktorat Jenderal SDA 2015-2019, sasaran kegiatan (SK) yang mendukung indikator berjumlah 19, dengan keterkaitan terhadap indikator sasaran program (SP) secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4

Keterkaitan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal SDA

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT
SP2. Meningkatkan ketahanan air		
Indikator 1: Tingkat layanan sarana prasarana air baku (%)	SK1. Peningkatan layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	BBWS/BWS
	SK2. Peningkatan layanan pembinaan bidang air tanah dan air baku	Pusat Air Tanah dan Air Baku

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT
SP2. Meningkatkan ketahanan air		
Indikator 2: Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air (%)	SK3. Peningkatan kapasitas tampung sumber-sumber air	BBWS/BWS
	SK4. Peningkatan layanan pembinaan bidang bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya	Pusat Bendungan
	SK5. Peningkatan layanan pembinaan bidang keamanan bendungan	Balai Bendungan
Indikator 3: Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak (%)	SK6. Peningkatan kapasitas pengendalian daya rusak	BBWS/BWS
	SK7. Peningkatan layanan pembinaan bidang sungai dan pantai	Direktorat Sungai dan Pantai
Indikator 4: Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA (%)	SK8. Peningkatan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA	BBWS/BWS
	SK9. Peningkatan layanan pembinaan tata kelola pengelolaan SDA terpadu	Direktorat Bina Penatagunaan SDA
	SK10. Peningkatan layanan manajemen BBWS/BWS	BBWS/BWS
	SK11. Peningkatan layanan kesekretariatan Dewan SDA Nasional	Sekretariat Dewan SDA Nasional
Indikator 5: Tingkat kinerja layanan irigasi (%)	SK12. Peningkatan kinerja layanan irigasi	BBWS/BWS
	SK13. Peningkatan layanan pembinaan bidang irigasi dan rawa	Direktorat Irigasi dan Rawa
Indikator 6: Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan (%)	SK14: Peningkatan kinerja layanan OP sarana prasarana sumber daya air	BBWS/BWS
	SK15. Peningkatan pembinaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA	Direktorat Bina O&P

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT
SP2. Meningkatkan ketahanan air		
Indikator : Tingkat pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA (%)	SK16. Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA	Direktorat Pengembangan Jaringan SDA
SP3. Meningkatnya pengendalian lumpur Sidoarjo		
Indikator : Tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo (%)	SK18. Peningkatan layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo	Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo
	SK19. Peningkatan layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo	
Pendukung SP2. dan SP3. Pada Learning Growth		
Indikator : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (%)	SK17. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Sekretariat Direktorat Jenderal SDA

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Peraturan Pemerintah No. 8/2006 tentang Peran Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan kinerja sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja terukur dengan menggunakan indikator, baik indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan dan IKU.

Pengertian Indikator Kinerja Utama dalam Perpres No. 29/2014 tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. IKU dibutuhkan untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja. IKU disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip: SMART (*Specific, Measurable, Agreeable, Reliastic, Time-bound*).

Berdasarkan hal tersebut, IKU Direktorat Jenderal SDA 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku (%)
2. Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air (%)
3. Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak (%)
4. Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA (%)
5. Tingkat kinerja layanan irigasi (%)
6. Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan (%)
7. Tingkat layanan pengendalian lumpur Sidoarjo (%)



DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Halaman ini sengaja dikosongkan

bab 3

Arah Kebijakan, Strategi,

Kerangka Regulasi,
Dan Kerangka
Kelembagaan



Bendungan Napun Gete
Nusa Tenggara Timur



3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam RPJMN. Saat ini, kita telah memasuki tahap ketiga dari 4 (empat) tahap pelaksanaan RPJP Nasional. RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu dengan memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Strategi pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 berdasarkan kepada :

1. Norma Pembangunan, meliputi antara lain:
 - a. membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
 - b. setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan;
 - c. aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
2. Dimensi Pembangunan; meliputi:
 - a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat. Pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat.
 - b. Dimensi pembangunan sektor unggulan. Hal ini meliputi kedaulatan pangan, ketahanan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri. Terkait dengan kedaulatan pangan, Indonesia mempunyai modal untuk memenuhi kebutuhannya, agar tidak tergantung kepada negara lain. Potensi sumber daya air yang besar dan terbarukan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan ketahanan energi dan ketenagalistrikan, sedangkan potensi kemaritiman dan kelautan harus dapat dimanfaatkan secara optimal. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan

- modal pengembangan pariwisata nasional, sedangkan potensi industri untuk penciptaan nilai tambah.
- c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan. Pembangunan harus meminimalkan kesenjangan, baik antar kelompok pendapatan, maupun antar wilayah, serta untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dengan prioritas pada wilayah desa, wilayah pinggiran, luar Jawa, dan Kawasan Timur.
3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil, meliputi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tatakelola dan reformasi birokrasi.
 4. *Quickwins*, dilakukan agar output pembangunan segera dapat terwujud dan dirasakan hasilnya dan sekaligus dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Partisipasi Masyarakat.



Gambar 18 Tahapan Pembangunan Nasional

Untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.



Gambar 19 Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019

Direktorat Jenderal SDA berkontribusi pada cita ke-7, melalui dukungan terhadap kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi.

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

1. Sasaran Makro: meliputi pembangunan manusia dan masyarakat serta ekonomi makro.
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat: meliputi kependudukan dan keluarga berencana; pendidikan; kesehatan; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; serta perlindungan anak.
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan: meliputi kedaulatan pangan; ketahanan energi; maritim dan kelautan; pariwisata dan industri manufaktur; serta ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas.
4. Sasaran Dimensi Pemerataan: meliputi penurunan kesenjangan antar kelompok ekonomi; serta peningkatan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PUPR

Sejalan dengan Strategi Pembangunan Nasional yang dirumuskan dalam norma pokok pembangunan serta Prioritas Nasional yang dibagi ke dalam 3 Dimensi Pembangunan dan satu kondisi perlu serta fokus tahunan yang tercermin dalam tema-tema pembangunan serta *quickwin*, Kementerian PUPR juga menerapkan Norma Pembangunan dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yaitu meliputi:

- Pertama. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR ditujukan untuk kepentingan kehidupan manusia dan masyarakat yang mendiami serta lingkungan hidup di wilayah yang dibangun, mendorong pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha baik baru maupun yang sudah berjalan.
- Kedua. Setiap kebijakan Pembangunan infrastruktur bidang PUPR baik dalam kerangka kebijakan maupun kerangka regulasi yang tertuang sebagai kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan di selenggarakan secara holistik komprehensif dengan memperhatikan seluruh dimensi pembangunan yang terkait untuk didukung,

diarahkan dan ditujukan untuk memastikan pencapaian pembangunan bagi manusia serta untuk mengurangi ketimpangan baik antarwilayah maupun antarkelompok pendapatan.

- Ketiga. Setiap langkah penyusunan rencana, program dan kegiatan prioritas mengedepankan akuntabilitas teknokratik, agar rencana pembangunan infrastruktur bidang PUPR dapat disusun secara substansi logis, benar dan etis, secara teknis dapat dilaksanakan, dan secara operasional dapat diukur pencapaian kerjanya.
- Keempat. Kebijakan pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah melalui proses partisipatif yang melibatkan hampir seluruh pemangku kepentingan dengan memperhatikan kebutuhan/kepentingan masyarakat luas, serta diterima secara proporsional oleh para pemangku kepentingan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang PUPR yang terintegrasi, tepat manfaat, tepat sasaran, serta pencapaian kinerja yang terukur.
- Kelima. Program dan kegiatan pembangunan infrastruktur bidang PUPR di sinergiskan/diterpadukan dan disinkronkan antarsektor, antarpemerintahan dan antardaerah serta dengan Visi Presiden terpilih dan amanat RPJMN tahun 2015-2019.
- Keenam. Rencana dan anggaran pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah diselaraskan dan disinkronkan dengan Visi Presiden terpilih dan prioritas pembangunan nasional sesuai amanat RPJMN tahun 2015-2019.

3.2.1. Arah Kebijakan Umum dan Strategi Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Pembangunan infrastruktur SDA sebagai bagian dari infrastruktur PUPR diarahkan sebagai berikut:

- Pertama. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur bidang PUPR dan standar layanan minimum dalam rangka peningkatan dukungan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, melalui strategi peningkatan pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan, peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, serta peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air,
- Kedua. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur bidang PUPR dan standar

layanan minimum dalam rangka peningkatan dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim melalui strategi peningkatan kemandirian dan konektivitas jalan nasional untuk menurunkan waktu tempuh pada koridor utama, serta peningkatan fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan;

- Ketiga. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur bidang PUPR dan standar layanan minimum dalam rangka peningkatan dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan, melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, melalui strategi peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, peningkatan penurunan kekurangan tempat tinggal (*backlog*) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.
- Keempat. Peningkatan upaya mewujudkan Prioritas Nasional dari semua dimensi pembangunan lainnya yang terkait melalui strategi peningkatan upaya menindaklanjuti pelaksanaan kebijakan Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016, yang kemudian di perbaharui dengan Peraturan Nomor 56 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Kelima. Peningkatan keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, akan dilakukan, melalui strategi peningkatan keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan, peningkatan

keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan; serta peningkatan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

- Keenam. Peningkatan tata kelola Kementerian PUPR yang meliputi: pengendalian dan pengawasan internal, sumber daya manusia yang kompeten, budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan akuntabel, regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, sarana dan prasarana serta kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR guna mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel akan dilakukan melalui strategi peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia PUPR sesuai dengan persyaratan jabatan, peningkatan pemanfaatan IPTEK bidang PUPR oleh stakeholders, peningkatan kualitas layanan teknis bidang PUPR kepada stakeholders, peningkatan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, peningkatan kualitas dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kementerian PUPR

Tujuan dari pembangunan wilayah adalah untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan, serta keadilan bagi seluruh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi/keunggulan dan daya dukung pengembangan wilayah. Potensi/keunggulan wilayah terdiri dari potensi/keunggulan komperatif dan potensi/keunggulan kompetitif. Sedangkan pengembangan wilayah dapat dilihat dari adanya produktivitas, daya saing dan konektivitas antarwilayah. Dengan demikian, pengembangan wilayah dengan memperhatikan potensi/keunggulan wilayah dapat dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Pertama. Pengembangan investasi yang produktif dan bernilai tambah tinggi dengan fokus wilayah, sektor dan komoditas unggulan yang jelas;
- Kedua. Pengembangan tenaga kerja, petani dan nelayan yang terdidik dan terampil;
- Ketiga. Pengembangan teknologi dan inovasi yang produktif untuk mendukung hilirisasi pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta pertambangan;

- Keempat. Pembangunan infrastruktur strategis : jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih, pasar, tempat pelelangan ikan dan lainnya; serta
- Kelima. Optimalisasi pariwisata daerah : destinasi wisata, hotel, restoran dan lainnya.

Dalam melakukan percepatan pembangunan wilayah, terdapat enam hal yang harus diperhatikan, yaitu: peningkatan kualitas jaringan infrastruktur wilayah, percepatan peningkatan kualitas SDM/tenaga daerah, perbaikan kualitas kelembagaan, peningkatan kapasitas dalam penataan ruang wilayah, pemberdayaan masyarakat/kelompok masyarakat termasuk UMKM/Koperasi, serta penguatan promosi daerah dan kerjasama antardaerah.

Peningkatan kualitas jaringan infrastruktur wilayah dapat dilakukan dengan cara memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur baik kewenangan Pusat maupun Pemerintah Daerah, memfasilitasi percepatan pembebasan lahan untuk infrastruktur strategis, serta memberikan kemudahan bagi investor swasta dan BUMN yang tertarik melakukan investasi di bidang infrastruktur.

Arah Kebijakan Kementerian PUPR dalam pembangunan wilayah tahun 2015-2019 untuk mewujudkan prioritas nasional dan mewujudkan visi, misi dan tujuan Kementerian PUPR adalah:

- Pertama. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang terpadu, bersinergi dan mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, dan rencana tata ruang wilayah.
- Kedua. Pengembangan infrastruktur wilayah bidang PUPR mengedepankan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan pihak swasta. Pengembangan infrastruktur wilayah bidang PUPR mengedepankan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan pihak swasta, mengingat pada kenyataannya kawasan yang sudah berkembang akan lebih menarik banyak investor daripada kawasan yang belum berkembang.

- Ketiga. Pengelolaan pengembangan infrastruktur wilayah bidang PUPR menggunakan pendekatan WPS, antar WPS pada Pulau/Kepulauan. Selanjutnya dalam konteks pengembangan wilayah mengingat sangat luasnya wilayah nasional Indonesia, maka untuk memudahkan pengelolaannya, pengembangan wilayah dibagi menurut tipe wilayah pengembangan yang diistilahkan “Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang di dalamnya melingkupi kawasan strategis perkotaan dan non perkotaan, kawasan industri, dan kawasan maritim serta berdasarkan pada tema atau potensi masing-masing wilayah dan pulau/kepulauan, sebagai berikut:

3.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Pada Masing-masing Pulau di Indonesia

Kebijakan pembangunan wilayah pada masing-masing pulau di Indonesia diarahkan dengan tema masing-masing berdasarkan potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Sebagai *tool* pengembangan wilayah, dikembangkan konsep Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

Pengembangan WPS tersebut berazaskan pada efisiensi yang berbasis daya dukung, daya tampung dan fungsi lingkungan fisik terbangun, manfaat dalam skala ekonomi (*economic of scale*) serta sinergitas dalam menyediakan infrastruktur transportasi untuk konektivitas dalam lingkup nasional maupun internasional, mengurangi kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan energi terbarukan untuk tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan layanan dasar permukiman yang layak bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, serta meningkatkan keandalan dan keberlanjutan layanan sumber daya air baik untuk pemenuhan air minum, sanitasi, dan irigasi guna menunjang ketahanan air dan pangan dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pada setiap WPS.

Konsepsi pengembangan WPS diilustrasikan yaitu pembangunan infrastruktur wilayah PUPR pada setiap WPS diarahkan untuk mempercepat pembangunan fisik di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan sesuai dengan klusternya, terutama WPS di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan

keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur dalam kawasan, antarkawasan maupun antar WPS.

1. Pulau Sumatera.

Tema besar pengembangan wilayah Pulau Sumatera adalah: Pintu Gerbang Perdagangan Internasional; Industri Berbasis Komoditas Kelapa Sawit, Karet, Timah, Bauksit, & Kaolin; Lumbung Energi Nasional, Termasuk Pengembangan Energi Terbarukan Biomassa; Hilirisasi Komoditas Batu Bara; dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Maritim (Kelautan). Pulau Sumatera terdapat 6 WPS yang terdiri dari 3 WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu dan 3 WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang. WPS di Pulau Sumatera sebagai berikut:

- a. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang dan Hinterland Sabang - Banda Aceh -Langsa.
- b. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Metro Medan – Tebing Tinggi – Dumai – Pekanbaru
- c. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Batam – Tanjung Pinang
- d. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Sibolga – Padang – Bengkulu
- e. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Jambi – Palembang – Pangkal Pinang –Tanjung Pandan
- f. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Merak – Bakauheni – Bandar Lampung – Palembang –Tanjung Api-api (MBBPT)

2. Pulau Jawa.

Tema besar pengembangan wilayah Pulau Jawa adalah: Sebagai Lumbung pangan nasional; Sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia; Sebagai Pendorong sektor industri dan jasa nasional; dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan). Pulau Jawa terdapat 8 WPS yang terdiri dari 1 WPS Konektivitas Keseimbangan Pertumbuhan sedang Berkembang, 4 WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu, dan 3 WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang. WPS di Pulau Jawa sebagai berikut:

- a. WPS Konektivitas Keseimbangan Pertumbuhan Sedang Berkembang Jakarta – Bogor –Ciawi – Sukabumi
- b. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Jakarta – Bandung – Cirebon – Semarang

- c. WPS Pertumbuhan Sedang Berkembang Tanjung Lesung – Sukabumi – Pangandaran – Cilacap
- d. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Yogyakarta – Solo – Semarang
- e. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Semarang – Surabaya
- f. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Yogyakarta – Prigi – Blitar – Malang
- g. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Malang – Surabaya – Bangkalan
- h. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Surabaya – Pasuruan – Banyuwangi

3. Pulau Bali dan Nusa Tenggara.

Tema Besar pada pengembangan Wilayah Bali adalah: Sebagai lumbung pangan nasional; Sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia; Sebagai pendorong sektor industri dan jasa nasional; dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan). Sedangkan tema besar pada pengembangan Wilayah Nusa Tenggara adalah: Pintu gerbang pariwisata ekologis; Pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; Pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung; dan Pengembangan industri mangan, dan tembaga. Pulau Bali dan Nusa Tenggara terdapat 5 WPS yang terdiri dari 1 WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu, 2 WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang, dan 2 WPS Pertumbuhan Baru. WPS di Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebagai berikut:

- a. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Gilimanuk – Denpasar – Padang Bay
- b. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Tanjung – Mataram – Mandalika
- c. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Sumbawa Besar – Dompu – Bima
- d. WPS Pertumbuhan Baru Waingapu – Labuan Bajo – Ende – Maumere
- e. WPS Pertumbuhan Baru Dan Perbatasan Kupang – Atambua

4. Pulau Kalimantan.

Tema besar pada pengembangan Wilayah Kalimantan adalah: Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia; Salah satu lumbung pangan nasional; Pengembangan industri berbasis komoditas

kelapa sawit, dan karet; dan Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon & pasir kuarsa. Pulau Kalimantan terdapat 4 WPS yang terdiri dari 1 WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu, 2 WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang, serta 1 WPS Pertumbuhan Baru Dan Perbatasan. WPS di Pulau Kalimantan sebagai berikut:

- a. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Ketapang – Pontianak – Singkawang – Sambas
- b. WPS Pertumbuhan Baru Temajak – Sebatik
- c. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Palangkaraya – Banjarmasin – Batulicin
- d. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Balikpapan – Samarinda – Maloy

5. Pulau Sulawesi.

Tema besar pada pengembangan Wilayah Sulawesi adalah: Pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi & gas bumi; Pintu gerbang perdagangan internasional & kawasan timur; Lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri kakao, padi, dan jagung; Pengembangan industri berbasis logistik; dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan & pariwisata bahari. Pulau Sulawesi terdapat 5 WPS yang terdiri dari 1 WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu, 2 WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang, dan 2 WPS Pertumbuhan Baru. WPS di Pulau Sulawesi sebagai berikut:

- a. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Bitung – Manado – Amurung – Kotamobagu
- b. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Gorontalo – Kotamobagu
- c. WPS Pertumbuhan Baru Palu – Banggai
- d. WPS Pertumbuhan Baru Mamuju – Makale – Palopo – Kendari – Bau bau – Wangi wangi
- e. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Makassar – Pare-Pare – Mamuju

6. Kepulauan Maluku.

Tema besar pada pengembangan Wilayah Maluku adalah: Produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional; Pengembangan industri berbasis komoditas

perikanan; Pengembangan industri pengolahan berbasis nikel, dan tembaga; dan Pariwisata bahari. Pulau Sulawesi terdapat 2 WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang, terdiri dari:

- a. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Ternate – Sofifi – Daruba
- b. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Ambon – Masohi

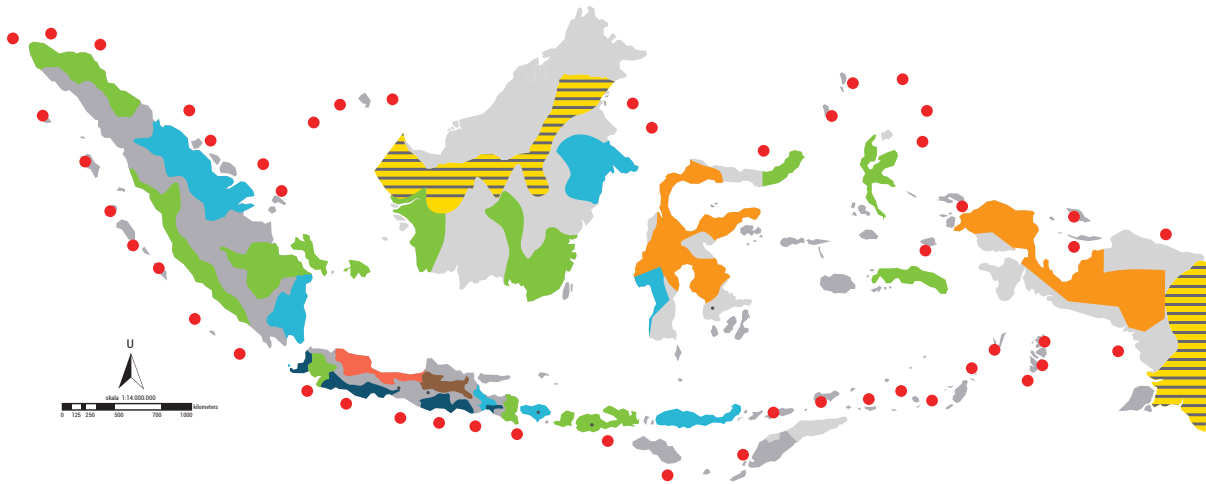
7. Pulau Papua.

Tema besar pada Wilayah Pulau Papua adalah: Percepatan Pengembangan Industri Komoditas Lokal Perkebunan, Peternakan, Kehutanan; Percepatan Pengembangan Ekonomi Kemaritiman; Percepatan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan, Migas & Tembaga; Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Masyarakat; Percepatan Pengembangan Pariwisata Budaya dan Alam; Peningkatan Kawasan Konservasi dan Daya Dukung Lingkungan; dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Wilayah Kampung Masyarakat Adat. Pulau Papua terdapat 4 WPS Pertumbuhan Baru, terdiri dari:

- a. WPS Pertumbuhan Baru Sorong – Manokwari
- b. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Biak – Manokwari – Bintuni
- c. WPS Pertumbuhan Baru Nabire – Enarotali – Wamena
- d. WPS Pertumbuhan Baru Jayapura – Merauke



Gambar 20 Konsep Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)



- | | | |
|--|--|--------------------------------|
| 1 Sabang - Banda Aceh - Langsa | 16 Gilimanuk - Denpasar - Padang Bay | 28 Soifi - Ternate - Manotai |
| 2 Medan - Tebing Tinggi - Dumai - Pekanbaru | 17 Pulau Lombok | 29 Ambon - Seram |
| 3 Batam - Bintan | 18 Pulau Sumbawa | 30 Sorong - Manokwari |
| 4 Sibolga - Padang - Bengkulu | 19 Labuan Bajo - Ende | 31 Manokwari - Bintuni |
| 5 Jambi - Pekanbaru - Bangka Belitung | 20 Kupang - Alambua | 32 Nabire - Enarotali - Wamena |
| 6 Merak - Bakauhuni - Bandar Lampung | 21 Ketapang - Pontianak - Singkawang - Sambass | 33 Jayapura - Merauke |
| 7 Palembang - Tanjung Api - Api | 22 Temajuk - Sebatik | 34 Pulau - Pulau Kecil Terluar |
| 8 Jakarta - Bogor - Ciawi - Sukabumi | 23 Palangkaraya - Banjarmasin - Batu Licin | |
| 9 Jakarta - Cirebon - Semarang | 24 Balik Papan - Samarinda - Maloy | |
| 10 Tanjung Lesung - Sukabumi - Pengandaran - Cilacap | 25 Bitung - Manado - Amurang | |
| 11 Yogyakarta - Solo - Semarang | 26 Gorontalo - Boang Mongodona | |
| 12 Semarang - Surabaya | 27 Pulau Banggai | |
| 13 Yogyakarta - Prigi - Blitar - Malang | 28 Mamuju - Mamasa - toraja - Kendari | |
| 14 Malang - Surabaya - Bangkalan | 29 Makassar - Pare-pare - Mamuju | |
| 15 Surabaya - Pasuruan - Banyuwangi | | |
-
- | | | |
|---|--|--|
| ■ wps pusat pertumbuhan tepadu | ■ wps pertumbuhan langsung | ● pulau - pulau kecil terluar |
| ■ wps pusat pertumbuhan sedang berlangsung | wps perbatasan darat negara | |

Gambar 21 Sebaran 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)

Selanjutnya pembangunan infrastruktur PUPR pada setiap WPS akan terpadukan dengan sasaran pokok dan program nasional sebagai berikut:

Pertama, dengan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Prioritas (KSPNP) di antaranya di Pulau Sumatera (KSPNP Danau Toba dsk); Pulau Jawa (KSPNP: Kep Seribu dsk, Kota Tua-Sunda Kelapa dsk, Borobudur dsk, dan Bromo-Tengger-Semeru dsk); Pulau Bali- Nusa Tenggara (KSPNP: Kintamani-Danau Batur dsk, Menjangan-Pemuteran dsk, Kuta-Sanur-Nusa Dua dsk, Rinjani dsk, Pulau Komodo dsk, dan Ende-Kelimutu dsk); Pulau Kalimantan (KSPNP Tanjung Puting dsk); Pulau Sulawesi (KSPNP: Toraja dsk, Bunaken dsk, dan Wakatobi dsk); dan Kepulauan Maluku (KSPNP Raja Ampat dsk).

Kedua, diterpadukan dengan program pengembangan Kawasan Industri Prioritas (KIP), di antaranya di Pulau Sumatera (KIP:Kuala Tanjung, Sei Mangkei, dan Tanggamus); Pulau Jawa (KIP: Tangerang, Cikarang, Cibinong, Karawang, Bandung, Cirebon, Tuban, Surabaya, dan Pasuruan); Kalimantan (KIP: Batulicin, Ketapang, dan Landak); Pulau Sulawesi (KIP: Palu, Morowali, Bantaeng, Bitung, dan Konawe); Kepulauan Maluku (KIP Buli/Halmahera Timur); dan Pulau Papua (KIP Teluk Bintuni).

Ketiga, diterpadukan dengan program Pengembangan Perkotaan KSN, PKW dan PKSN/ Kota Perbatasan di antaranya di Pulau Sumatera; Pulau Jawa-Bali; Kepulauan Nusa Tenggara; Pulau Kalimantan; Kepulauan Maluku dan Pulau lainnya.

Keempat, diterpadukan dengan program pengembangan Tol Laut (pelabuhan hub dan pelabuhan feeder) yang di antaranya di Pulau Sumatera (Malahayati, Belawan, Kuala Tanjung, Teluk Bayur, Panjang, Batu Ampar, Jambi: Talang Duku, dan Palembang: Boom Baru); Pulau Jawa (Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Tanjung Emas); Pulau Kalimantan (Sampit, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Kariangau, dan Pontianak); Pulau Bali dan Nusa Tenggara (Kupang); Pulau Sulawesi (Makasar, Pantoloan, Kendar dan Bitung); Kepulauan Maluku (Ternate: A. Yani dan Ambon); dan Pulau Papua (Sorong dan Jayapura).

3.2.4. Strategi Pencapaian Renstra Kementerian PUPR

Arah Kebijakan dan Strategi Umum Kementerian PUPR dalam mendukung

pencapaian sisa target prioritas pembangunan nasional dari seluruh dimensi pembangunan yang mengacu kepada RPJMN tahun 2015 - 2019 secara terpadu antarsektor, antarpemerintahan dan antardaerah sesuai dengan rumusan tujuan Kementerian PUPR, serta peraturan perundang-undangan terkait percepatan pembangunan proyek prioritas nasional, dilaksanakan dengan strategi:

1. Mengawal target sasaran yang telah *ontrack/* telah tercapai, yang meliputi penyiapan readiness criteria, pemanfaatan alternatif sumber pendanaan selain APBN Kementerian PUPR dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Badan Usaha baik BUMN maupun swasta serta masyarakat.
2. Menyelesaikan target sasaran yang diperkirakan dapat tercapai namun dengan kerja sangat keras, yang meliputi fokus pada kewenangan dan tanggung jawab Kementerian PUPR serta berkoordinasi dan membina Pemerintah Daerah, terutama untuk target-target yang membutuhkan dukungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.
3. Memprioritaskan target sasaran yang diperkirakan tidak akan tercapai, yang meliputi *re-focusing* terhadap lokus, diutamakan yang *urgents* diantara yang *importants* pada lokasi-lokasi yang benar-benar membutuhkan penanganan dan sudah siap *readiness criteria*-nya serta penuntasan pekerjaan yang sedang berjalan.

3.3. ARAH KEBIJAKAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SDA

Arah kebijakan umum Direktorat Jenderal SDA adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan *demand* dan pengelolaan *supply* yang berkeadilan serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang.
2. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dilaksanakan di tiap wilayah sungai kewenangan Pusat didasarkan pada rencana tata pengaturan air dan tata pengairan (pola pengelolaan SDA) dan rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan (rencana pengelolaan SDA), yang diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang bersangkutan.

3. Konservasi sumber air dilaksanakan dalam rangka mencapai keseimbangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.
4. Pengendalian pemanfaatan air tanah seiring dengan peningkatan penyediaan air baku dari air permukaan, pengembangan dan penerapan sistem *conjunctive use* antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah.
5. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan.
6. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan/defisit air, wilayah tertinggal dan wilayah strategis.
7. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir dilaksanakan selaras antara pendekatan struktural dan pendekatan non-struktural melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah, diutamakan pada daerah berpenduduk padat, konektivitas antar pusat ekonomi dan kawasan strategis.
8. Pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, kawasan permukiman, serta pusat kegiatan ekonomi untuk mengurangi disparitas pembangunan wilayah.
9. Mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim global, khususnya banjir, kekeringan dan kenaikan muka air laut.
10. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan terus diupayakan pada kegiatan konservasi, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA.
11. Penataan kelembagaan Direktorat Jenderal SDA melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan serta kemungkinan berbagi peran atau *role sharing* dalam pengelolaan SDA secara terpadu.
12. Penataan dan penguatan sistem pengelolaan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan dalam rangka

pelayanan data dan informasi, baik ke dalam maupun ke luar Direktorat Jenderal SDA.

13. Penerapan “*living in harmony with mud*” dalam pengendalian lumpur Sidoarjo. Hal ini dengan mempertimbangkan pendapat sebagian ahli Geologi bahwa semburan lumpur panas Sidoarjo tidak mungkin bisa dihentikan.

3.4. ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDA PER PULAU

Berdasarkan kondisi ketersediaan air, jumlah dan kepadatan penduduk, kejadian banjir, serta potensi pengembangan irigasi dan tampungan air, kebijakan pengelolaan SDA di masing-masing pulau di Indonesia secara umum diarahkan sebagai berikut:

1. Pulau Sumatera, dengan curah hujan memadai dan ketersediaan air cukup, pengembangan SDA ke depan diarahkan pada pengembangan jaringan irigasi dan rawa, penanganan banjir, serta pengembangan tampungan dengan kapasitas besar (bendungan).
2. Pulau Jawa, dengan ketersediaan air yang rawan, jumlah penduduk yang padat, pengembangan SDA diarahkan pada peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada, penanganan banjir secara menyeluruh dan terpadu, pengembangan tampungan dengan kapasitas besar (bendungan), pengembangan SPAM regional untuk penyediaan air baku untuk air bersih, serta pendekatan *demand management*.
3. Pulau Kalimantan, dengan ketersediaan air yang cukup, namun dipengaruhi oleh keberadaan rawa (payau) dan kejadian banjir di beberapa lokasi, pengembangan SDA diarahkan pada pengembangan jaringan irigasi dan rawa (secara terbatas), penanganan banjir di lokasi rawan banjir, serta pengembangan SPAM perkotaan.
4. Pulau Sulawesi, dengan ketersediaan air cukup dan kejadian banjir yang mulai meningkat di beberapa lokasi, pengembangan SDA diarahkan pada pengembangan ekstensif jaringan irigasi, penanganan banjir di lokasi rawan banjir, serta pengembangan tampungan besar (bendungan) dan SPAM regional sebagai upaya penyediaan air baku untuk air bersih.
5. Pulau Bali dan Nusa Tenggara, dengan curah hujan cenderung rendah dan ketersediaan air yang kritis, pengembangan SDA diarahkan pada pengembangan jaringan irigasi secara selektif, serta pengembangan tampungan sederhana (embung) dan pemanfaatan sumur air tanah sebagai alternatif sumber air baku.

6. Pulau Maluku dan Papua, dengan ketersediaan air tinggi, namun kepadatan penduduk rendah, serta potensi irigasi dan rawa terbatas, pengembangan SDA diarahkan pada pengembangan irigasi dan rawa dengan mempertimbangkan ketersediaan petani dan keberlanjutan lingkungan, penanganan banjir di lokasi rawan banjir, serta pengembangan air baku perkotaan dan distrik.



Gambar 22 Zonasi Pengembangan Sumber Daya Air

3.5. ARAH KEBIJAKAN DUKUNGAN TERHADAP PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL DAN PERBATASAN

Dukungan terhadap pengembangan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan diarahkan sebagai berikut:

1. Dukungan pengembangan daerah tertinggal difokuskan pada 122 daerah tertinggal sebagaimana ditetapkan pada RPJMN 2015-2019 sebagai upaya meminimalkan kesenjangan antarwilayah di Indonesia. Kedalaman lokus adalah kabupaten.
2. Dukungan yang diberikan pada daerah tertinggal tersebut mengacu pada 3 (tiga) pilar utama pengelolaan SDA, yaitu: konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air.
3. Dukungan pengembangan kawasan perbatasan difokuskan pada kawasan perbatasan dengan 10 negara tetangga sebagaimana ditetapkan pada RPJMN 2015-2019 (187 lokasi prioritas, termasuk didalamnya 92 pulau terluar). Kedalaman lokus adalah kecamatan perbatasan.
4. Dukungan yang diberikan pada kawasan perbatasan, selain mengacu pada 3 (tiga) pilar utama pengelolaan SDA, juga pada Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan sebagaimana ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).

3.6. ARAH KEBIJAKAN DUKUNGAN TERHADAP PENGEMBANGAN SEKTOR LAINNYA

Dukungan terhadap sektor lainnya, mencakup sektor pertanian dan agropolitan, perikanan (kemaritiman) pariwisata, dan pengarusutamaan gender diarahkan sebagai berikut:

1. Dukungan terhadap sektor pertanian dan agropolitan difokuskan pada kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi permukaan, irigasi rawa, dan irigasi air tanah.
2. Dukungan terhadap sektor perikanan (kemaritiman) difokuskan pada kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tambak pada lokasi yang disepakati dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Dukungan terhadap sektor pariwisata difokuskan pada kegiatan penyediaan air baku untuk air bersih, penanganan banjir, dan pengamanan pantai pada 10 lokasi prioritas pengembangan pariwisata, meliputi:
 - a. Danau Toba di Sumatera Utara
 - b. Tanjung Kelayang di Belitung
 - c. Tanjung Lesung di Jawa Barat
 - d. Kepulauan Seribu di DKI Jakarta
 - e. Borobudur di Jawa Tengah

- f. Labuan Bajo di NTT
 - g. Wakatobi di Sulawesi Tenggara
 - h. Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur
 - i. P. Mandalika di NTB
 - j. P. Morotai di Kabupaten Maluku.
4. Dukungan terhadap pengarusutamaan gender difokuskan pada penyusunan anggaran berbasis gender untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki isu kesetaraan gender, termasuk dalam rangka pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Untuk mendukung hal ini, Direktorat Jenderal SDA menyusun Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender yang merupakan bagian dari Pokja Pengarusutamaan Gender Kementerian PUPR.

3.7. ARAH KEBIJAKAN PERWUJUDAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 03 tahun 2016 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 dan terakhir diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2018.

Guna mewujudkan hal tersebut, pelaksanaan proyek strategis nasional di Direktorat Jenderal SDA diarahkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2018, meliputi:
 - a. Proyek Pembangunan Tanggul Penahan Banjir
 - b. Proyek Bendungan (54 bendungan)
 - c. Proyek Irigasi (7 Daerah Irigasi)
2. Pelaksanaan proyek tersebut didukung oleh upaya koordinasi dengan K/L dan Pemerintah Daerah terkait.

3. Penyiapan seluruh *readiness criteria* terkait pelaksanaan proyek, seperti kesiapan studi kelayakan, desain, pengadaan tanah, dan dokumen lingkungan.
4. Melakukan koordinasi dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) terkait pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional.

3.8. STRATEGI OPERASIONAL

Dalam rangka mencapai arah kebijakan di tingkat nasional dan di tingkat Kementerian PUPR, strategi operasional Direktorat Jenderal SDA 2015-2019 dibagi atas strategi operasional:

1. Konservasi sumber daya air
2. Pendayagunaan sumber daya air
3. Pengendalian daya rusak air
4. Peningkatan kualitas pengelolaan SDA terpadu, termasuk didalamnya peningkatan peran serta stakeholders dan peningkatan sistem informasi dan data sumber daya air
5. Operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA

3.8.1. Strategi Operasional Konservasi SDA

Konservasi sumber air ditujukan agar terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air alami dan buatan serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air buatan. Strategi pelaksanaan konservasi meliputi konservasi fisik dan non-fisik.

Strategi pelaksanaan konservasi fisik dicapai melalui:

- a. Pembangunan 65 bendungan, yang terdiri dari penyelesaian/lanjutan 16 bendungan dan memulai pembangunan 49 bendungan baru, dengan target 29 bendungan dapat diselesaikan pada periode 2015-2019. Disamping itu juga dibangun \pm 1.088 embung/bangunan penampung air lainnya.
- b. Rehabilitasi/peningkatan 45 bendungan serta 625 embung dan bangunan penampung air lainnya.
- c. Restorasi 55 sungai, revitalisasi 24 danau dan konservasi 34 kawasan rawa.
- d. Operasi dan pemeliharaan 35 bendungan dan 1.899 embung/situ/bangunan

- penampung air lainnya.
- e. Pemeliharaan sungai, danau, mata air, dan sumber-sumber air alami lainnya.
 - f. Konservasi air tanah difokuskan pada kawasan yang memanfaatkan air tanah sebagai sumber air baku.
 - g. Mendukung revitalisasi Program Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama 8 (delapan) Menteri pada 9 Mei 2015, baik dengan kegiatan fisik maupun non-fisik.

Sementara, strategi pelaksanaan konservasi non-fisik dicapai melalui:

- a. Sosialisasi terkait perlunya konservasi kepada masyarakat disekitar sumber air
- b. Peningkatan peran serta masyarakat pada kegiatan konservasi sumber-sumber air.
- c. Pembinaan Pemerintah Daerah dan dunia usaha terkait kegiatan konservasi sumber-sumber air.
- d. Peningkatan peran wadah koordinasi (Dewan SDA, TKPSDA, Komisi Irigasi, dll) dalam perumusan kebijakan maupun strategi dan pelaksanaan operasionalnya.

3.8.2. Strategi Operasional Pendayagunaan SDA

Pendayagunaan sumber daya air ditujukan agar terpenuhinya kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat serta untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat dicapai melalui strategi:

- a. Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi sarana prasarana pengelolaan air baku dari kapasitas 51,44 m³/detik menjadi 118,6 m³/detik atau peningkatan sebesar 67,16 m³/detik.
- b. Rehabilitasi fungsi dan kondisi sarana prasarana pengelolaan air baku kapasitas sebesar 22,00 m³/detik.
- c. Operasi dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan air baku kapasitas sebesar 94,75 m³/detik.
- d. Penyediaan air baku diutamakan bersifat regional dengan mempertimbangkan aspek keterpaduan dengan RTRW serta pola dan rencana pengelolaan SDA dan didasarkan atas desain yang menyeluruh mulai dari unit air baku, unit

- produksi, hingga unit distribusi.
- e. Sinkronisasi lokus penyediaan air baku dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya, mencakup: 1) Kawasan Strategis Nasional (KSN); 2) kawasan yang rawan air bersih; 3) kawasan perbatasan, pulau terluar, dan pesisir; 4) kawasan perkotaan; 5) kawasan pariwisata prioritas; serta kawasan strategis lainnya.

Untuk pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, dicapai melalui strategi:

1. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, irigasi rawa, irigasi tambak, dan irigasi air tanah untuk mendukung kedaulatan pangan, yang dilaksanakan melalui:
 - a. Peningkatan suplai irigasi yang dilayani dari bendungan dari 11% menjadi 13% (cakupan dari total area irigasi).
 - b. Peningkatan layanan jaringan irigasi seluas 1 juta Ha, yang terdiri dari:
 - (1) jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dibangun sepanjang 4.160 Km, jaringan irigasi rawa yang dibangun 2.282 Km, jaringan irigasi tambak sepanjang 158,28 km, jaringan irigasi air tanah 1.967 Km. Total daerah irigasi yang dilayani adalah 561 ribu hektar.
 - (2) jaringan irigasi kewenangan Daerah yang dibangun sepanjang 13.423 km. Total daerah irigasi yang dilayani adalah 439 ribu hektar.
 - c. Pengembalian fungsi dan layanan (rehabilitasi) jaringan irigasi seluas 3 juta Ha, yang terdiri dari:
 - (1) rehabilitasi jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat sepanjang 20.162 Km, jaringan irigasi rawa sepanjang 8.093 Km, jaringan irigasi tambak sepanjang 837 Km, jaringan irigasi air tanah sepanjang 0,343 Km). Total daerah irigasi yang dilayani adalah 1,4 juta hektar.
 - (2) Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah sepanjang 21.289 km. Total daerah irigasi yang dilayani adalah 1,6 juta hektar.
 - d. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Daerah dilaksanakan melalui pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - e. Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi melalui kegiatan operasi

dan pemeliharaan, meliputi: jaringan irigasi 3,9 juta Ha (OP Jaringan Irigasi Permukaan 128,28 Km, OP Jaringan Irigasi Air Tanah 0,68 Km, OP Jaringan Irigasi Rawa 112,35 Km, OP Jaringan Irigasi Tambak 14,88 Km).

- f. Pengembangan irigasi dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Pengembangan irigasi pada masing-masing pulau dibedakan sebagai berikut:
- Pengembangan irigasi di P. Sumatera diarahkan pada peningkatan sawah tadah hujan menjadi sawah beririgasi.
 - Pengembangan irigasi di P. Jawa diarahkan pada rehabilitasi dan modernisasi daerah irigasi yang telah habis umur ekonomisnya. Pada kurun 2015-2019, modernisasi difokuskan pada DI Jatiluhur (Jawa Barat), DI Rentang (Jawa Barat), dan DI Wadas Lintang.
 - Pengembangan irigasi di P. Bali diarahkan pada rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, didukung oleh sistem pengembangan padi SRI.
 - Pengembangan irigasi di P. Nusa Tenggara diarahkan pada irigasi air tanah, didukung oleh pengembangan sumber-sumber air (embung/bendungan).
 - Pengembangan irigasi di P. Kalimantan diarahkan pada pengembangan irigasi rawa, terutama untuk *food estate*.
 - Pengembangan irigasi di P. Maluku diarahkan pada pengembangan irigasi permukaan.
 - Pengembangan irigasi di P. Papua diarahkan pada pengembangan irigasi rawa terutama untuk *food estate*.
- g. Pengembangan irigasi rawa, termasuk untuk *food estate* harus mempertimbangkan tata air rawa dalam rangka pencegahan emisi gas rumah kaca serta mempertimbangkan rencana tata ruang.
- h. Pengembangan irigasi tambak dilakukan dengan bersinkronisasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- i. Pengembangan irigasi air tanah difokuskan pada daerah-daerah minim sumber air permukaan didukung oleh konservasi air tanah sebagai upaya menjaga keberlanjutan air tanah.
- j. Pengelolaan dan pengembangan irigasi difokuskan pada 14 lumbung

- pangan: Aceh, Sumut, Sumsel, Sumbar, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, NTB, Kalsel, Kalbar, Sulsel, dan Sulteng.
- k. Pengembangan irigasi didukung oleh pemantapan pengelolaan irigasi, antara lain melalui: penerapan SRI, penyelenggaraan O&P yang didukung oleh anggaran yang memadai (AKNOP), dan lain-lain.
 - l. Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan irigasi, antara lain melalui: pemberdayaan petani (P3A), peningkatan kemampuan personil O&P, pembentukan dan operasionalisasi Unit Pengelola Irigasi, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait (Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah).
2. Peningkatan kapasitas sumber energi untuk mendukung kedaulatan energi, yang dilaksanakan melalui:
 - a. Inventarisasi bendungan eksisting yang memiliki potensi PLTA dan identifikasi potensi-potensi PLTM dan PLTMH.
 - b. Pemanfaatan potensi tersebut dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM dan PT. PLN (Persero).
 - c. Pelibatan swasta dan badan usaha lainnya dalam pemanfaatan air sebagai sumber energi dilaksanakan melalui mekanisme perijinan sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan 6 (enam) prinsip dasar batasan pengelolaan SDA sesuai Putusan MK Nomor 58/PUU-XI/2013.

3.8.3. Strategi Operasional Pengendalian Daya Rusak

Pengendalian daya rusak air ditujukan untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim, melalui penanganan kawasan yang terkena dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, abrasi pantai, dan pencemaran air yang akan dicapai, baik melalui strategi dengan pendekatan struktural, maupun non-struktural. Strategi dengan pendekatan struktural meliputi:

- a. Normalisasi sungai dan pembangunan/peningkatan tanggul, perkuatan tebing, serta penanganan drainase utama perkotaan sepanjang 3.080 Km.
- b. Penanganan drainase utama perkotaan dilakukan terintegrasi dengan sistem

- drainase lingkungan dan sistem drainase kawasan.
- c. Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air seluas 200 ribu Ha.
 - d. Penanganan banjir dilaksanakan secara menyeluruh berdasarkan studi penanganan banjir pada masing-masing wilayah sungai.
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana pengendali lahar gunung berapi sebanyak 306 buah.
 - f. Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi sarana dan prasarana pengamanan pantai sepanjang 530 Km.

Sementara strategi dengan pendekatan non-struktural meliputi:

- a. Penyusunan *masterplan* penanganan banjir pada sungai-sungai prioritas, sehingga nantinya penanganan banjir akan menyeluruh tidak hanya *spot-spot* tertentu.
- b. Pelaksanaan monitoring kualitas air pada sungai-sungai utama di masing-masing wilayah kerja BBWS/BWS.
- c. Pelibatan/pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan banjir dan upaya pengurangan pencemaran air, terutama masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai.
- d. Pelibatan Pemerintah Daerah dalam penanganan banjir, drainase perkotaan, dan pencemaran air.
- e. Penetapan sempadan sungai dan sumber-sumber air lainnya.
- f. Pembuatan atau *updating* (pembaruan) peta rawan bencana (*flood risk map*).
- g. Pengoperasian *flood forecasting warning system* (FFWS) di sungai-sungai utama sebagai upaya peringatan dini.

3.8.4. Strategi Operasional Peningkatan Keterpaduan Tata Kelola SDA

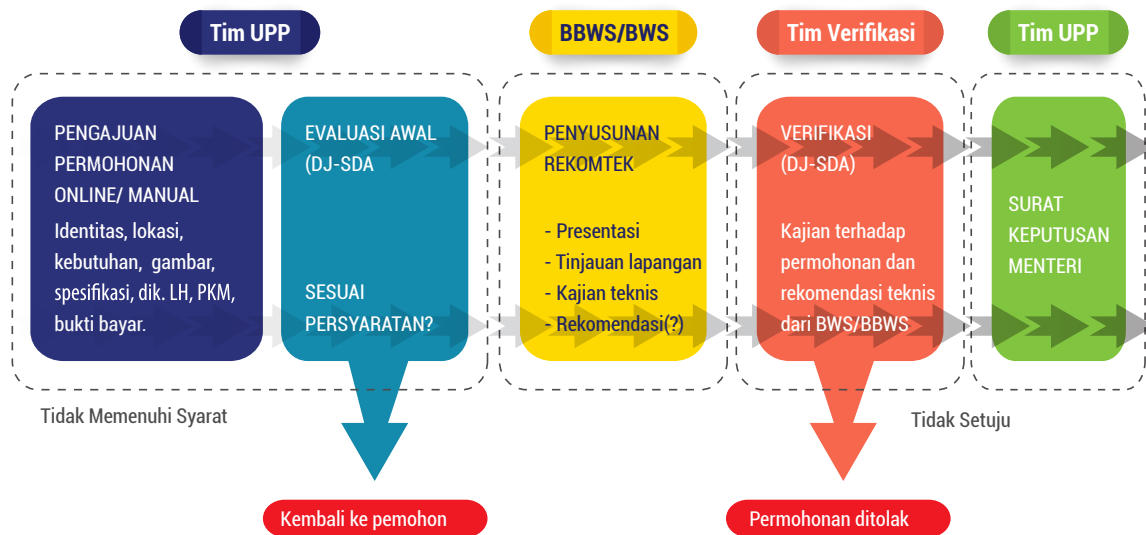
Peningkatan keterpaduan tata kelola SDA ditujukan untuk mewujudkan tata kelola SDA yang lebih *accountable*, didukung oleh *decision making process* yang lebih partisipatif dan demokratis dalam rangka terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan, yang dicapai melalui strategi:

1. Perencanaan pengelolaan SDA pada masing-masing wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, melalui:

- a. Penyelesaian penyusunan, pembahasan dan penetapan dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA pada masing-masing WS di wilayah kerja BBWS/BWS.
 - b. Penyusunan rencana alokasi air pada masing-masing wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
 - c. Operasionalisasi unit perencanaan pada masing-masing BBWS/BWS untuk memperkuat kapasitas desain infrastruktur SDA.
 - d. Pemberian rekomendasi teknis sebagai dasar pemanfaatan SDA.
 - e. Perencanaan, pemrograman, dan penganggaran yang didasarkan pada kebijakan dan strategi operasional pada dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Peningkatan peran serta stakeholders, melalui:
- a. Optimalisasi peran stakeholder pada Tim Koordinasi Pengelolaan SDA (TKPSDA) pada masing-masing WS kewenangan Pemerintah Pusat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga O&P pengelolaan SDA, untuk meminimalkan konflik kepentingan dalam pengelolaan air di WS yang bersangkutan, terutama pada penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA, rencana prioritas dan alokasi penggunaan air, kesepakatan mengenai program, rencana kegiatan dan alokasi pembiayaan pengelolaan SDA antar instansi, serta hal-hal lain yang bersifat taktis operasional di tingkat WS.
 - b. Pembinaan masyarakat, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan SDA pada WS kewenangan Pemerintah Pusat.
 - c. Pembatasan pelibatan swasta hanya pada pemberian ijin pemanfaatan sumber daya air, bukan pada bentuk kerjasama, sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 50/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air.
3. Peningkatan Sistem Informasi dan Data Sumber Daya Air (SISDA) yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan, melalui:

- a. Pemantapan *website* Direktorat Jenderal SDA yang dapat menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan akuntabel. *Website* ini didukung oleh pemantapan *website* di masing-masing BBWS/BWS yang menampilkan data dan informasi lebih detail terkait pengelolaan WS dan infrastruktur SDA di wilayah kerjanya masing-masing.
 - b. Pengembangan jejaring SISDA, yang mencakup informasi terkait kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan SDA, prasarana SDA, teknologi SDA, lingkungan SDA dan sekitarnya serta kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang terkait dengan SDA.
 - c. Penerapan *one map policy* pada penyelenggaraan pengelolaan SDA.
 - d. Pengembangan sistem *e-government* yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan SDA di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, meliputi:
 - (1) Pengembangan dan penerapan *e-programming* untuk perencanaan pemrograman kegiatan.
 - (2) Penerapan *e-budgeting* dengan memanfaatkan RKA-K/L yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan untuk penganggaran kegiatan.
 - (3) Penerapan *e-procurement* dan *e-monitoring* yang dikembangkan di lingkungan Kementerian PUPR.
 - (4) Pengembangan dan penerapan *e-kinerja* untuk pengukuran kinerja unit organisasi dan kinerja individu (pegawai).
 - e. Pemantapan sistem komunikasi publik Direktorat Jenderal SDA yang didasarkan pada data dan informasi yang lengkap, akurat, dan akuntabel.
 - f. Peningkatan kapasitas SDM di bidang komunikasi publik dan teknologi informasi melalui pelatihan, studi banding, dan lain-lain.
4. Pemberian izin kepada usaha swasta dan badan usaha lainnya untuk melakukan pengusahaan atas air dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat, mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air yang memuat pertimbangan teknis dan saran. Prioritas pemberian ijin diarahkan untuk:
- a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar;

- b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air;
- c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
- d. pengusahaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan Air minum;
- e. kegiatan bukan usaha;
- f. pengusahaan sumber daya air oleh BUMN/BUMD;
- g. pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha swasta



Gambar 23 Prosedur Perijinan Pengusahaan Atas Air

Proses pengajuan izin dilaksanakan dengan menggunakan e-Rekomtek atau SI-REPER-SDA. Sistem ini dikembangkan untuk mengubah sistem pengajuan izin yang semula manual menjadi digital, berbasis web, dan *progress*-nya dapat dipantau secara *real-time*.



Gambar 24 Proses Pengajuan Izin Menggunakan E-Rekomtek dan SI-REPER-SDA

Dengan e-Rekomtek, proses pengajuan izin menjadi lebih cepat, transparan, akuntabel, dan *accessable*. Proses ini tidak dipungut biaya (*gratis*) dan mendukung program pengurangan kertas (*paperless*). Saat ini sedang dikembangkan fitur *video-calls*, sehingga antara petugas dan pihak yang mengajukan izin dapat berkomunikasi *online*.

3.8.5. Strategi Operasional Operasi dan Pemeliharaan

Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan ditujukan untuk menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur sumber daya air, yang dicapai melalui strategi:

1. Seluruh prasarana SDA yang berupa aset harus dioperasikan dan dipelihara.
2. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pada seluruh objek O&P yang terdiri atas:
 - a. seluruh infrastruktur SDA, yang meliputi jaringan irigasi, bendungan, sarana prasarana air baku, dan sarana prasarana pengendali banjir.
 - b. wadah (alami) yang strategis meliputi sungai perkotaan dan danau/situ.
3. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan O&P sesuai dengan Angka

- Kebutuhan Nyata O&P (AKNOP) secara bertahap.
4. Pengembangan dan pembinaan kelembagaan pelaksana O&P dibagi atas:
 - a. Untuk sistem makro (sungai dan bendungan) dilakukan oleh BBWS/BWS dan Perum Jasa Tirta.
 - b. Untuk sistem mikro (jaringan irigasi, situ, air baku) dapat diserahkan ke Pemerintah Daerah melalui mekanisme Tugas Pembantuan (TP).
 5. Pengembangan kelembagaan O&P dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan SDM dan regulasi.

3.9. DUKUNGAN INTERNAL PROCESS

Dalam rangka mendukung strategi operasional sebagaimana disebut diatas, diperlukan dukungan *internal process* yang berfungsi sebagai enabler. Strategi dukungan *internal process* ini diarahkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Direktorat Jenderal SDA, melalui:
 - a. Penambahan SDM yang dilakukan dengan mempekerjakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), sesuai yang diatur oleh UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - b. Percepatan regenerasi dan peningkatan kualitas SDM di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, melalui pelatihan/pendidikan, rotasi pegawai, dan on-site placement SDM muda sesuai dengan latar belakang pendidikan. Standar kompetensi jabatan dan penilaian kompetensi pegawai menjadi dasar perencanaan karir pegawai, serta penempatan dalam jabatan.
 - c. Peningkatan kapasitas jabatan fungsional pada masing-masing bidang keahlian melalui Diklat dan Uji Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatannya.
2. Peningkatan budaya kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDA yang difokuskan pada upaya penerapan *motto* kerja bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat di lingkungan Direktorat Jenderal SDA. Penerapan sistem kinerja pegawai dan unit juga menjadi bagian peningkatan budaya dan etika kerja, sebagaimana menjadi amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 26/PRT/M/2017 tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian PUPR.
3. Peningkatan pengelolaan regulasi pengelolaan SDA yang difokuskan pada penyusunan dan harmonisasi Rancangan UU Pengganti UU No. 7 tahun 2004

serta peraturan pemerintah yang menjadi turunannya. Termasuk didalamnya adalah prosedur perijinan, penyelenggaraan pembinaan Pemerintah Daerah, serta mekanisme yang mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan

4. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan perangkat kerja berbasis teknologi informasi, melalui pemantapan fungsi *e-budgeting*, *e-monitoring* dan *e-procurement* yang sudah ada saat ini, serta pengembangan *e-programming* untuk memudahkan penyusunan program dan anggaran dan *e-kinerja* untuk memudahkan pengukuran kinerja unit organisasi dan individu (pegawai). Termasuk dalam strategi ini adalah penerapan teknologi hasil dari Puslitbang Air.
5. Peningkatan layanan dukungan manajemen melalui pemantapan dan fungsionalisasi struktur organisasi yang sudah dibentuk berdasarkan kinerja organisasi yang diharapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi serta uraian kerja masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan, didukung oleh perumusan mekanisme kerja yang efektif dan efisien. Termasuk dalam strategi ini adalah peningkatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), peningkatan ketertiban administrasi laporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), serta audit internal dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

3.10. OPERASIONALISASI STRATEGI KE DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN

Operasionalisasi strategi Direktorat Jenderal SDA dilaksanakan dalam 2 (dua) program yaitu 1) Program Pengelolaan SDA dan 2) Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo. Program Pengelolaan SDA difokuskan pada upaya pengelolaan SDA pada wilayah sungai sesuai dengan kewenangannya, melalui kegiatan-kegiatan:

1. Kegiatan yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS, meliputi:
 - a. Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Tambak
 - b. Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengamanan Pantai
 - c. Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu
 - d. Pengelolaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
 - e. Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
 - f. Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA
 - g. Dukungan Manajemen BBWS/BWS

2. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Direktorat/Pusat, meliputi:
 - a. Dukungan Manajemen Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)
 - b. Pembinaan Program dan Anggaran Ditjen SDA
 - c. Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya Air
 - d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen. Sumber Daya Air
 - e. Pembinaan Irigasi, Rawa, dan Tambak
 - f. Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana
 - g. Pembinaan Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengamanan Pantai
 - h. Penyelenggaran Keamanan Bendungan
 - i. Pembinaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
 - j. Pembinaan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku

Sementara Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo difokuskan untuk menindaklanjuti upaya pengendalian lumpur Sidoarjo yang sebelumnya dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), melalui kegiatan-kegiatan:

1. Pembinaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
2. Pengendalian Lumpur Sidoarjo

Masing-masing kegiatan tersebut memiliki sasaran kegiatan yang dapat dicapai dengan melakukan serangkaian aktivitas untuk menghasilkan output-output dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan tersebut.

3.11. KERANGKA REGULASI

Pasca dibatalkannya UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi (Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU.XI/2015), dasar hukum pengelolaan SDA kembali kepada UU No. 11 tahun 1974. Keterlibatan pihak swasta dalam proses pengelolaan SDA dan pergeseran makna air dari barang publik menjadi komoditas (mementingkan aspek ekonomi, berorientasi pada keuntungan) adalah aspek-

aspek yang menyebabkan pembatalan tersebut, karena dianggap melanggar UUD 1945 Pasal 33.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan SDA ke depan perlu memperhatikan 6 (enam) prinsip, yaitu:

1. Pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air
2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri
3. Kelestarian lingkungan hidup, sebagai salah satu hak asasi manusia, sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945
4. Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak
5. Prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN dan BUMD
6. Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan ijin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat

Implikasi dari pembatalan ini adalah praktek pengelolaan sumber daya air saat ini tidak memiliki payung hukum, untuk itu perlu direview dan diberikan payung hukumnya sementara Rancangan UU pengganti sedang disusun. Payung hukum harus mengacu pada UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan dengan mengharmonisasikan dengan UU lain lain yang terkait pengelolaan SDA serta peraturan pelaksanaan UU No. 11 tahun 1974 yang telah mengakomodasi isu-isu kekinian sambil melaksanakan penyusunan RUU pengelolaan SDA yang baru.

Sementara menunggu hal tersebut, perlu ada payung hukum sementara, dengan pertimbangan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan, lembaga pengelolaan yang sudah ada saat ini harus tetap ada, dan kesepakatan/kontrak dengan pihak ke-3 harus tetap berjalan sampai akhir kontrak.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah ditetapkan beberapa peraturan perundangan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah, meliputi:
 - a. Peraturan Pemerintah No. 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan SDA

- b. Peraturan Pemerintah No. 122 tentang Penyelenggaraan SPAM
- 2. Peraturan Menteri PUPR, yang mengatur:
 - a. Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai
 - b. Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan
 - c. Pengamanan Pantai
 - d. Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi
 - e. Penggunaan SDA
 - f. Rencana dan Rencana Teknis Pengaturan Air dan Tata Pengairan
 - g. Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut
 - h. Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
 - i. Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air
 - j. Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi
 - k. Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak
 - l. Komisi Irigasi
 - m. Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan
 - n. Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
 - o. Pengelolaan Aset Irigasi
 - p. Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai
 - q. Bendungan
 - r. Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
 - s. Rawa
 - t. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
 - u. Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air
 - v. Tata Cara Perizinan Pengusahaan SDA dan Penggunaan SDA

Terkait pengendalian lumpur Sidoarjo perlu dilakukan beberapa penyesuaian, yaitu:

1. Amandemen Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2017 terkait sebagian tugas Badan Pengendalian Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang belum tercantum pada tugas Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, terutama dalam hal:
 - a. Melaksanakan penataan wilayah atas tanah dan bangunan yang telah dibebaskan dan menjadi Barang Milik Negara (BMN)
 - b. Melaksanakan pelunasan pembayaran jual beli tanah dan bangunan pada wilayah eks 3 desa, 9 RT, dan 66 RT

- c. Menyelesaikan penggantian tanah dan bangunan eks fasum/fasos dan tanah wakaf
- d. Menyelesaikan pelunasan sisa pemberian dana antisipasi terhadap tanah dan bangunan warga PAT 22 Maret 2007, sebagaimana sebelumnya telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2015
2. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung terhadap Keputusan Kasasi Mahkamah Agung tahun 2014.
3. Peraturan perundangan terkait pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
4. Peraturan perundangan terkait pemberian dana antisipasi kepada PT. Minarak Lapindo Jaya untuk pembayaran pelunasan warga

3.12. KERANGKA KELEMBAGAAN

Keberhasilan pelaksanaan pengelolaan SDA terpadu memerlukan kerangka kelembagaan efektif dan akuntabel sebagai pelaksana dari program pengelolaan SDA terpadu yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk kepada Direktorat Jenderal SDA dan lembaga lain yang terkait dalam pengelolaan SDA terpadu, pengaturan hubungan internal dan antar lembaga, serta sumber daya manusia aparaturnya. Lembaga mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur. Pengaturan hubungan internal dan eksternal antar-lembaga mencakup peran tanggung jawab dan/atau tata hubungan kerja internal dan eksternal antar lembaga pengelola SDA terpadu, sedangkan sumber daya manusia aparatur negara mencakup para pejabat negara dan aparatur sipil negara yang menjalankan lembaga tersebut. Aspek sumber daya manusia aparatur di dalam isu kerangka kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitude*).

Pengelolaan SDA terpadu merupakan kerja bersama beberapa sektor dalam kabinet pemerintahan salah satunya adalah Direktorat Jenderal SDA sebagai sektor yang menjadi motor dalam pengelolaan SDA terpadu yang juga melibatkan berbagai *stakeholders* (Dewan SDA Nasional di tingkat Pusat dan TKPSDA di tingkat wilayah sungai) terkait dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Pelaksanaan pengelolaan SDA terpadu harus dapat menjawab tantangan yang besar serta kompleksitas permasalahan yang tinggi.

Ketersediaan lembaga yang efektif dan akuntabel merupakan prasyarat bagi keberhasilan pengelolaan SDA yang terpadu yang efektif dan akuntabel untuk mewujudkan hasil/kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu, untuk keberhasilan pengelolaan SDA terpadu diperlukan penataan kelembagaan Direktorat Jenderal SDA di berbagai bidang secara berkelanjutan, termasuk membangun kelembagaan wadah koordinasi.

Namun perlu dipahami bahwa penguatan kelembagaan pengelola SDA terpadu tidak harus diartikan berupa pembentukan unit/wadah baru bahkan dalam beberapa kasus dapat dilakukan perampingan dan penyederhanaan unit untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan kinerjanya. Upaya penguatan kelembagaan dalam rangka pengelolaan SDA terpadu masih sangat perlu terus dilanjutkan. Direktorat Jenderal SDA masih harus menghadapi berbagai tantangan, antara lain karena masih belum optimalnya kualitas kelembagaannya. Yang menjadi masalah utama pengelolaan SDA terpadu bukanlah hanya masalah pendanaan/pembiayaan semata, tetapi juga karena terbatasnya lembaga-lembaga terkait pengelolaan SDA terpadu yang efektif dan akuntabel yang dapat melaksanakan pengelolaan SDA terpadu sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Upaya penguatan kerangka kelembagaan Direktorat Jenderal SDA ke depan diarahkan guna perwujudan:

- 1) Tugas dan fungsi yang jelas, kewenangan yang tepat, serta struktur organisasi yang efisien, sehingga terhindar dari adanya duplikasi fungsi, benturan kewenangan, dan inefisiensi belanja operasional;
- 2) Tata laksana dan tata hubungan kerja yang efektif, efisien, transparan, dan sinergis (*well-connected governance system*); dan
- 3) Meningkatnya profesionalitas, integritas, dan kinerja SDM aparatur yang mampu melaksanakan visi, misi, program, dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Direktorat Jenderal SDA – Kementerian PUPR.

Penataan kelembagaan Direktorat Jenderal SDA dilakukan dengan koordinasi yang sangat intensif dan efektif di antara berbagai lembaga yang terkait dengan pengelolaan SDA terpadu, dengan memperhatikan:

- 1) Sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengelolaan SDA terpadu oleh Direktorat Jenderal SDA – Kementerian PUPR terpadu;

- 2) Peraturan perundangan yang berlaku, termasuk kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;
- 3) Prinsip-prinsip kelembagaan yang modern; serta
- 4) Penerapan prinsip-prinsip tata kelola lembaga yang baik, seperti transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi pengaturan, pendendalian, pengawasan, pembinaan dan pelaksanaan dengan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran pemerintah.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, penguatan kerangka kelembagaan Direktorat Jenderal SDA diarahkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan SDA terpadu senantiasa memanfaatkan kelembagaan/ wadah koordinasi yang sudah ada namun bila diperlukan dapat pula dibentuk wadah konsolidasi pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan SDA terpadu yang bersifat lintas sektor dari berbagai sektor agar semua sektor saling mengetahui kemajuan masing-masing sektor secara berkala.
2. Dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Penguatan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan fungsi penataan kelembagaan pengelola SDA terpadu agar ada kejelasan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga pengelola SDA terpadu untuk menghindari multi-tafsir dan duplikasi fungsi, serta benturan kewenangan;
 - b. Penataan struktur Direktorat Jenderal SDA baik secara horizontal maupun vertikal untuk mengurangi fragmentasi organisasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pengelolaan SDA terpadu.

Pada tahun 2019, seiring dengan kebutuhan untuk penajaman dan penguatan tugas dan fungsi Kementerian PUPR, sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal SDA sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengalami perubahan, khususnya yang terkait dengan fasilitasi jaringan infrastruktur daerah atau fasilitasi terhadap pendanaan melalui mekanisme DAK;

- c. Penyempurnaan tata laksana/hubungan tata kerja internal maupun antar lembaga agar tercipta tata laksana pengelolaan SDA terpadu yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif, dan efisien;
 - d. Penyempurnaan semua sistem manajemen/ tata kelola di Direktorat Jenderal SDA terkait pengaturan, pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan SDA terpadu;
 - e. Penyediaan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi pengelolaan SDA terpadu Direktorat Jenderal SDA dengan baik;
 - f. Peningkatan koordinasi dan pemanfaatan hasil riset pengelolaan SDA terpadu oleh lembaga riset baik internal Kementerian PUPR maupun eksternal agar lebih efektif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan riset untuk meningkatkan kapasitas inovasi dalam rangka pengelolaan SDA terpadu.
3. Sebagai tindak lanjut pengalihan tugas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) ke Direktorat Jenderal SDA, perlu penyesuaian struktur organisasi melalui pembentukan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Eselon II) yang bertugas untuk melaksanakan tugas baru tersebut.
4. Dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Kebijakan pengelolaan SDA terpadu, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pengelolaan SDA terpadu nasional, untuk memastikan bahwa kelembagaan pengelola SDA terpadu terutama Direktorat Jenderal SDA yang diperkuat dan/atau dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. Peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian antara tugas, fungsi, dan kewenangan setiap lembaga pengelola SDA terpadu dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;
 - c. Transparansi, efektivitas, dan efisiensi untuk memastikan bahwa hasil penataan kelembagaan Direktorat Jenderal SDA – Kementerian PUPR akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, analisis biaya dan manfaat dalam penataan kelembagaan Direktorat Jenderal SDA perlu dilakukan dengan cermat.

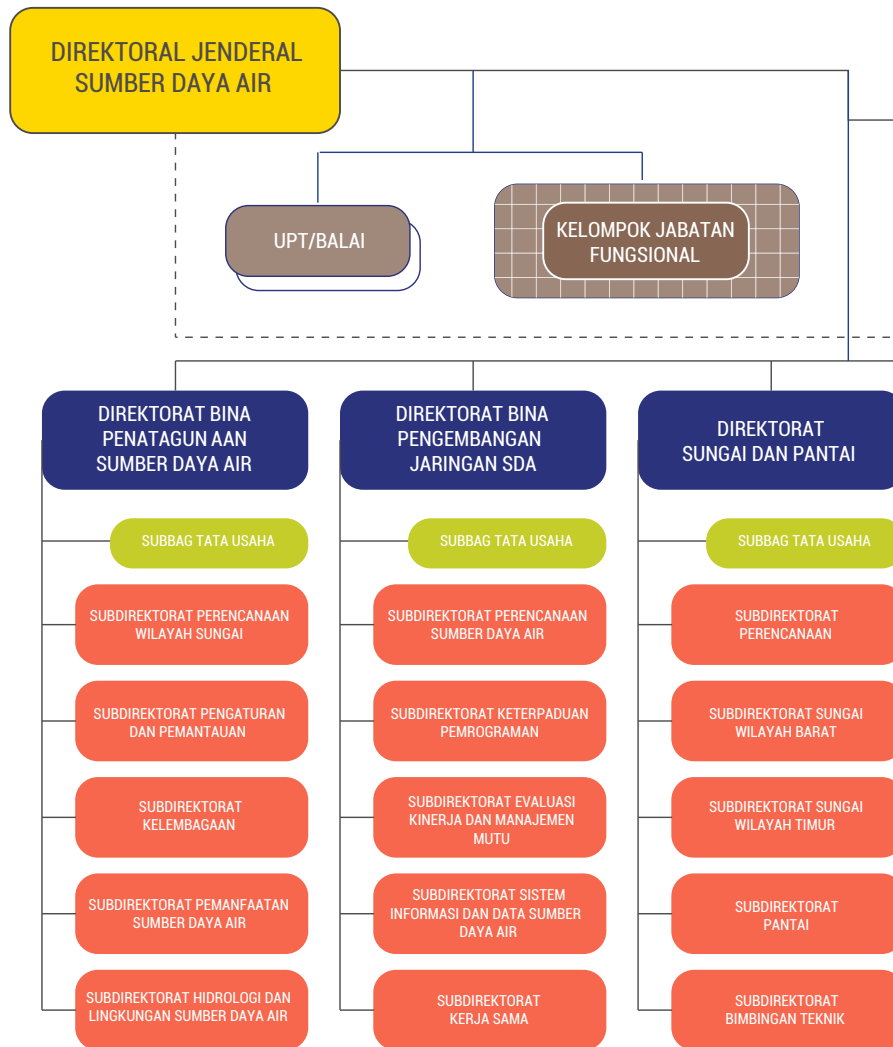
Dalam rangka mendukung keberhasilan pengelolaan SDA terpadu, prioritas penguatan kerangka kelembagaan Direktorat Jenderal SDA 2015-2019 difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Revitalisasi lembaga pengelola SDA terpadu yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal SDA;
2. Penguatan kelembagaan pengelola SDA terpadu dalam rangka peningkatan ketahanan air yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal SDA;
3. Penataan unit pengelola SDA terpadu yang berada di bawah Direktorat Jenderal SDA;
4. Penguatan koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan SDA terpadu;
5. Penguatan manajemen/tata kelola dalam pengaturan, pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan SDA terpadu oleh Direktorat Jenderal SDA;
6. Penguatan kelembagaan penegakan regulasi oleh Direktorat Jenderal SDA terkait pengelolaan SDA terpadu;
7. Penguatan kelembagaan manajemen aparatur sipil negara guna meningkatkan keterpaduan dan efektivitas pengelolaan aparatur sipil negara di Direktorat Jenderal SDA menghasilkan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja;
8. Penguatan kelembagaan pengelolaan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal SDA agar lebih efektif dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal SDA;
9. Peningkatan koordinasi dan pemanfaatan hasil riset pengelolaan SDA terpadu oleh lembaga riset baik internal Kementerian PUPR maupun eksternal agar lebih efektif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan riset untuk meningkatkan kapasitas inovasi dalam rangka pengelolaan SDA terpadu;
10. Pencermatan analisis biaya dan manfaat dalam penataan kelembagaan Direktorat Jenderal SDA.



Bendungan Napun Gete
Nusa Tenggara Timur

Gambar 25 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal SDA



Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466)

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN KEPEGAWAIAN
ORGANISASI DAN
TATA USAHA

BAGIAN KEUANGA
DAN UMUM

BAGIAN HUKUM
DAN
KOMUNIKASI PUBLIK

BAGIAN PENGELOLAAN
BMN DAN
FASILITASI LAHAN

DIREKTORAT
IRIGASI DAN RAWA

SUBBAG TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN

SUBDIREKTORAT IRIGASI
WILAYAH BARAT

SUBDIREKTORAT IRIGASI
WILAYAH TIMUR

SUBDIREKTORAT
RAWA

SUBDIREKTORAT
BIMBINGAN TEKNIK

DIREKTORAT
BINA OPERASI DAN
PEMELIHARAAN

SUBBAG TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN OPERASI
DAN PEMELIHARAAN

SUBDIREKTORAT
OPERASI DAN PEMELIHARAAN
SUNGAI DAN PANTAI

SUBDIREKTORAT
OPERASI DAN PEMELIHARAAN
IRIGASI DAN RAWA

SUBDIREKTORAT
OPERASI DAN PEMELIHARAAN
BENDUNGAN DAN DANAU

SUBDIREKTORAT
OPERASI DAN PEMELIHARAAN
AIR TANAH DAN AIR BAKU

PUSAT
BENDUNGAN

BAGIAN PERANCANAAN
DAN TATA USAHA

BIDANG BENDUNGAN
WILAYAH BARAT

BIDANG BENDUNGAN
WILAYAH TIMUR

BIDANG DANAU,
SITU, DAN EMBUNG

PUSAT
AIR TANAH DAN
AIR BAKU

BAGIAN PERANCANAAN
DAN TATA USAHA

BIDANG AIR TANAH
DAN AIR BAKU
WILAYAH BARAT

BIDANG AIR TANAH
DAN AIR BAKU
WILAYAH TIMUR

BIDANG KONSERVASI
AIR TANAH DAN AIR BAKU

PUSAT
PENGENDALIAN
LUMPUR SIDOARJO

BAGIAN
TATA USAHA

BIDANG
PERENCANAAN

BIDANG
PELAKSANAAN

BIDANG OPERASI DAN
PEMELIHARAAN

bab 4

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan



Bendungan Wonogiri
Jawa Tengah



4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal SDA untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan.

Nomenklatur program dan kegiatan yang digunakan Direktorat Jenderal SDA meliputi:

PROGRAM : Pengelolaan Sumber Daya Air

KEGIATAN :

1. Dukungan Manajemen Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)
2. Pembinaan Program dan Anggaran Ditjen SDA
3. Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya Air
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen. Sumber Daya Air
5. Pembinaan Irigasi, Rawa, dan Tambak
6. Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana
7. Pembinaan Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengamanan Pantai
8. Penyelenggaraan Keamanan Bendungan
9. Pembinaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
10. Pembinaan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
11. Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak
12. Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengamanan Pantai
13. Peningkatan Tatakelola Pengelolaan SDA Terpadu
14. Pengelolaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
15. Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
16. Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA
17. Dukungan Manajemen BBWS/BWS

PROGRAM : Pengendalian Lumpur Sidoarjo

KEGIATAN :

1. Pembinaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
2. Pengendalian Lumpur Sidoarjo

Struktur program, kegiatan, dan outputnya ini berbeda dengan yang tercantum pada RPJMN 2015-2019. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur organisasi dan hasil evaluasi Kementerian Keuangan bahwa sebagian *output* yang selama ini digunakan bukan merupakan output (hasil akhir) tapi merupakan *outcome* (Contoh: output jaringan irigasi yang dibangun pada RPJMN 2015-2019 memiliki satuan hektar (*outcome*), sementara pada struktur yang baru ini digunakan satuan km (*output*). Walaupun demikian, capaian *output* pada RPJMN 2015-2019 tersebut tetap dapat diukur dengan struktur output yang baru.

4.2. TARGET KINERJA

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal SDA yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program maupun kementerian didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:

1. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran
2. Penetapan target relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas.

Target sasaran Direktorat Jenderal SDA 2015-2019 dapat dilihat pada LAMPIRAN 6.

4.3. KERANGKA PENDANAAN

Kompleksitas yang dihadapi dalam pengelolaan SDA harus diimbangi dengan kapasitas pendanaan yang kerangkanya disusun jelas, baik terkait sumber maupun mekanismenya.

Sejalan UUD 1945 pasal 33 (3) bahwa : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, investasi untuk pengelolaan SDA bergantung sepenuhnya kepada Pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD (termasuk pinjaman/hibah luar negeri dan syariah/surat berharga negara – SBSN). Pelibatan swasta dalam hal ini terbatas pada pemanfaatan SDA dengan ijin, tidak dalam bentuk kerjasama / kontrak.

Investasi Pemerintah untuk pengelolaan SDA, khususnya pada Direktorat Jenderal SDA, menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun hal ini juga belum dapat mengimbangi kebutuhan pendanaan yang sebenarnya dibutuhkan. Diperlukan pengelolaan secara cermat terkait ketersediaan pendanaan yang terbatas dan tidak memiliki kepastian tinggi (sangat tergantung dari pendapatan negara), sehingga sasaran strategis nasional yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Pengelolaan yang cermat dilakukan dengan menyusun skala prioritas anggaran, alokasi anggaran harus tetap difokuskan pada program dan kegiatan yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas pengelolaan SDA terpadu nasional untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu diperlukan efisiensi dari belanja terkait operasional agar alokasi yang terbatas menjadi lebih berdayaguna.

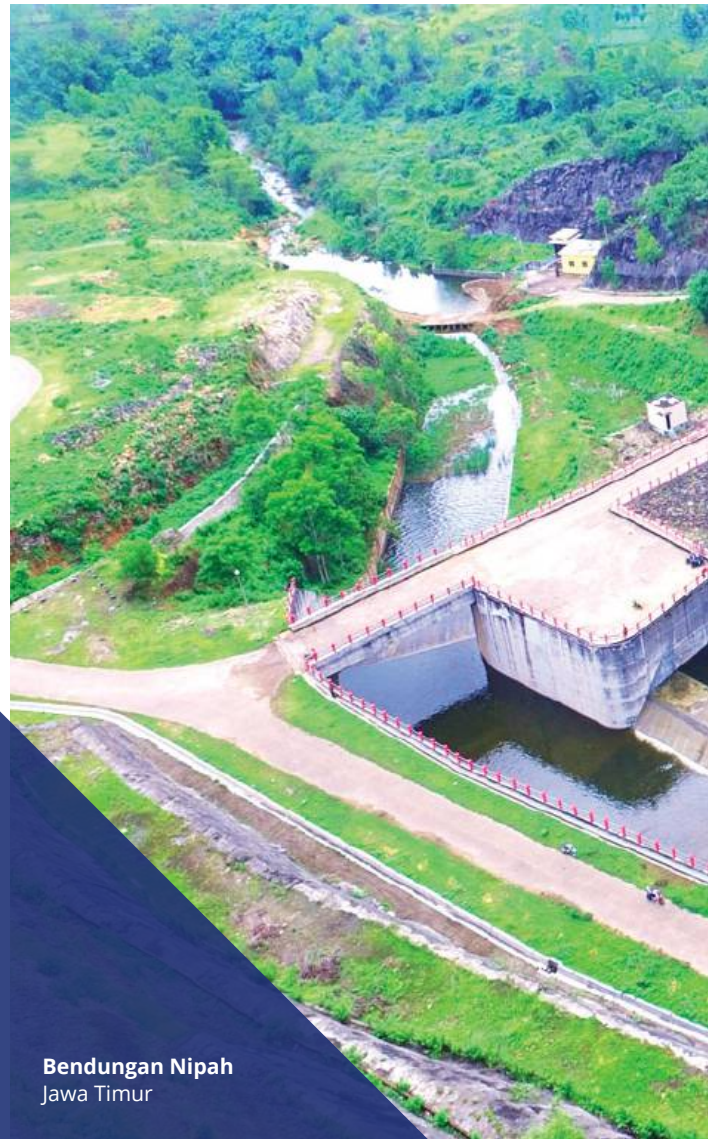
Untuk itu, kerangka pendanaan pengelolaan SDA oleh Direktorat Jenderal SDA diarahkan sebagai berikut:

1. Sumber pendanaan adalah APBN yang terdiri atas Rupiah Murni (RM), Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN), serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
2. Sumber pendanaan melalui Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri mengacu pada Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri – Jangka Menengah (DRPHLN-JM) atau *Blue Book* dan Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (DRPPHLN) atau *Green Book*. Secara garis besar, pengelompokan program pada dokumen *Blue Book* dibagi atas:
 - a. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
 - b. Program Pembangunan Waduk
 - c. Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi
 - d. Program Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air
 - e. Program Mitigasi terhadap Daya Rusak Air

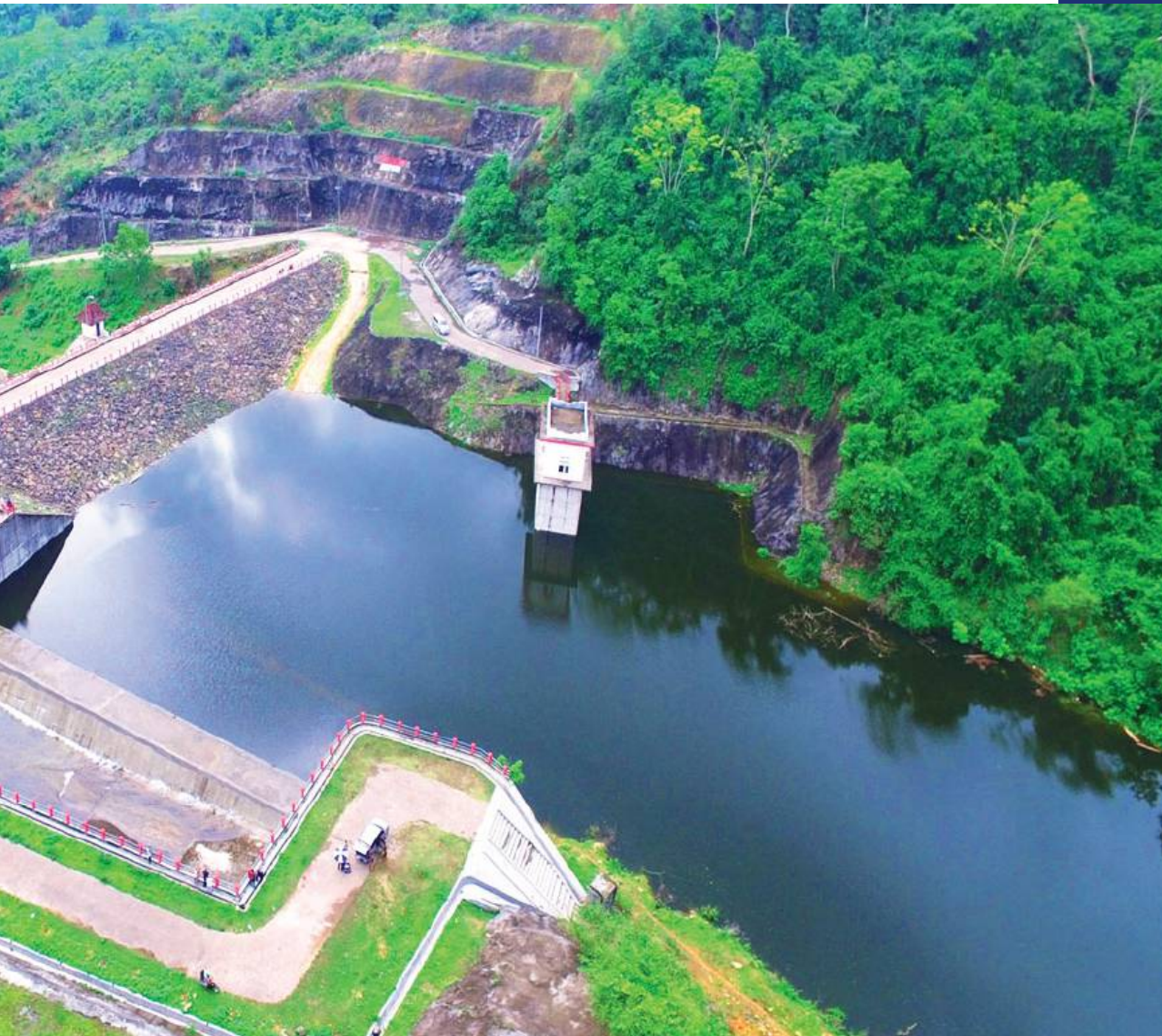
- f. Program Pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana
3. Penyusunan program dan anggaran berdasarkan kriteria prioritas yang ditetapkan sesuai dengan sasaran strategis nasional.
 4. Kerangka pendanaan menerapkan kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure*) serta anggaran berbasis kinerja (*performance based budgetting*).
 5. Pencapaian target sebagaimana ditetapkan pada RPJMN 2015-2019 tidak dapat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal SDA (Pemerintah Pusat), sebagian target merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini target pembangunan dan rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi. Untuk kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah ini diusulkan untuk didanai melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK). Ke depan, mekanisme DAK perlu diperkuat dengan melakukan penajaman kriteria teknis daerah penerima.

Alokasi pendanaan untuk Direktorat Jenderal SDA dalam RPJMN 2015-2019 selama 5 tahun adalah sebesar Rp. 208 Trilyun (belum termasuk anggaran untuk dukungan manajemen). Alokasi pendanaan tersebut disusun dengan rencana target sebagaimana menjadi kebutuhan sesungguhnya Direktorat Jenderal SDA sebesar Rp 316 Trilyun (termasuk pendanaan untuk dukungan manajemen). Alokasi ini belum termasuk kebutuhan untuk melaksanakan tugas baru dari Menteri PUPR terkait pengalihan tugas baru untuk mengendalikan lumpur Sidoarjo. Kebutuhan untuk mengendalikan lumpur Sidoarjo dibutuhkan sekitar Rp 400-500 Milyar per tahunnya. Hal ini akan menjadi perhatian khusus pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya.

bab 5
Penutup



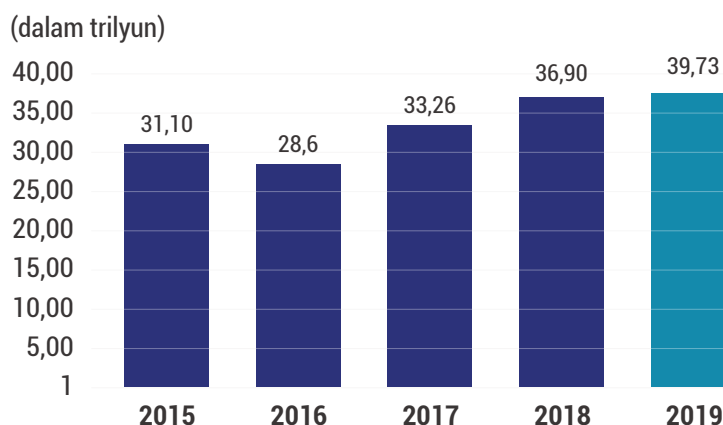
Bendungan Nipah
Jawa Timur



5.1. PERKIRAAN PENDANAAN HINGGA TAHUN 2019

Berdasarkan kecenderungan pendanaan 2015-2018, pada tahun 2019 diperkirakan alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan SDA dan Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo sama dengan alokasi anggaran pada tahun anggaran 2018. Hal ini dengan mempertimbangkan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan kondisi keuangan Negara.

Dengan alokasi anggaran tahun 2019 yang diperkirakan Rp 39,73 Trilyun, maka diperkirakan anggaran untuk melaksanakan Renstra Direktorat Jenderal SDA adalah Rp 169,59 Trilyun atau sekitar 53,66% dari kebutuhan anggaran sebesar Rp 316 Trilyun atau sekitar 81,53% dari alokasi anggaran RPJMN 2015-2019. Anggaran ini tidak termasuk DAK yang digunakan untuk pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Daerah.



Gambar 25 Perkiraan Penganggaran Hingga Tahun 2019

Berdasarkan perkiraan anggaran tersebut, Direktorat Jenderal SDA perlu menentukan prioritas diantara prioritas isu yang harus ditangani dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Prioritas penganggaran yang digunakan berdasarkan urutan sebagai berikut:

1. Agenda prioritas nasional sesuai RPJMN
2. Program prioritas Rencana Strategis (RENSTRA)
3. Direktif Presiden

4. Hasil Kunjungan Kerja DPR RI dan masukan pada Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP)
5. Arahan Menteri PUPR
6. Arahan Direktur Jenderal SDA
7. Usulan Kepala Daerah; Masyarakat; BBWS/BWS dan Satuan Kerja (Satker)

Lalu, dilakukan penyaringan karena selain terkait prioritas pemrograman juga terkait pembagian kewenangan pengelolaan dan kesiapan pelaksanaan kegiatan. Kriteria penyaringan yang digunakan, antara lain:

1. Kesesuaian dengan pola dan rencana pengelolaan SDA WS
2. Keterpaduan pada Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)
3. Kewenangan pengelolaan berdasarkan peraturan perundangan
4. *Readiness criteria* meliputi: studi kelayakan, desain, studi lingkungan, pengadaan tanah, dll
5. Urgensi kebutuhan (misalnya penanganan pasca bencana).

5.2. PERKIRAAN CAPAIAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL HINGGA TAHUN 2019

Berdasarkan capaian 2015-2018, dengan mempertimbangkan perkiraan anggaran tahun 2019, maka capaian sasaran pokok pembangunan nasional sebagaimana tercantum pada RPJMN 2015-2019 diperkirakan sebagai berikut:

1. Sasaran pokok pembangunan yang tercapai, yaitu:
 - a. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi air permukaan, air tanah, dan rawa.
 - b. Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah, rawa, dan tambak.
 - c. Pembangunan waduk baru.
2. Sasaran pokok pembangunan yang tidak tercapai, yaitu:
 - a. Pembangunan dan peningkatan irigasi tambak.
 - b. Kapasitas air baku nasional.
 - c. Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk.
 - d. Kapasitas/daya tampung.
 - e. Rata-rata kapasitas desain pengendalian struktural dan non-struktural banjir.

Tabel 5

Perkiraan Capaian Sasaran Pokok Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	SATUAN	TERCANTUM PADA RPJMN 2015-2019		CAPAIAN	
			BASELINE 2014	SASARAN 2019	2015	
1	2	3	4	5	6	
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan						
	Kedaulatan Pangan					
	2. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi					
	a. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi air permukaan, air tanah, dan rawa (juta ha)	juta ha (kumulatif)	8,9	9,89	9,17	
	<u>Pendanaan APBN</u>				0,151	
	<i>Irigasi permukaan</i>				0,11	
	<i>Irigasi air tanah</i>				0,00	
	<i>Irigasi rawa</i>				0,04	
	<u>Pendanaan DAK</u>				0,12	
	<i>Pembangunan</i>				0,00	
	<i>Peningkatan</i>				0,11	
	b. Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha)	juta ha (tahunan)	2,71	3,01	1,14	
	<u>Pendanaan APBN</u>				0,46	
	<i>Irigasi permukaan</i>				0,30	
	<i>Irigasi air tanah</i>				0,01	
	<i>Irigasi rawa</i>				0,15	
	<u>Pendanaan DAK</u>				0,69	
	<i>Rehabilitasi</i>				0,69	
	c. Pembangunan dan peningkatan irigasi tambak (ribu ha)	ribu ha (kumulatif)	189,75	304,75	227	
	<i>Pembangunan</i>				4,24	
	<i>Rehabilitasi</i>				33,10	
	d. Pembangunan waduk (baru)	buah	21	49	13	

	CAPAIAN		PERKIRAAN CAPAIAN		TARGET RENSTRA 2015-2019	TOTAL PERKIRAAN CAPAIAN	% PERKIRAAN CAPAIAN	KATEGORI EVALUASI
	2016	2017	2018*	2019*				
	7	8	9	10	11	12	13=(12)/(15)	14
	9,31	9,53	9,76	9,89	9,89	9,89	100%	●
	<u>0,051</u>	<u>0,06</u>	<u>0,038</u>	<u>0,042</u>		<u>0,034</u>		
	0,04	0,05	0,03	0,04				
	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,01	0,01	0,00				
	<u>0,09</u>	<u>0,16</u>	<u>0,19</u>	<u>0,10</u>		<u>0,65</u>		
	0,00	0,01	0,04	0,01				
	0,08	0,16	0,15	0,09				
	0,57	0,54	0,33	0,37	2,92	3,02	100%	●
	<u>0,28</u>	<u>0,25</u>	<u>0,15</u>	<u>0,11</u>		<u>1,252</u>		
	0,24	0,20	0,12	0,09				
	0,00	0,00	0,01	0,00				
	0,03	0,05	0,02	0,02				
	<u>0,29</u>	<u>0,29</u>	<u>0,16</u>	<u>0,25</u>		<u>1,68</u>		
	0,29	0,29	0,16	0,25				
	243	262	274	281	99	280,97	92%	●
	1,85	1,75	2,51	0,70		<u>11,05</u>		
	13,73	17,22	9,92	6,21		<u>80,17</u>		
	8	6	12	10	49	49	100%	●

NO	URAIAN	SATUAN	TERCANTUM PADA RPJMN 2015-2019		CAPAIAN	
			BASELINE 2014	SASARAN 2019	2015	
1	2	3	4	5	6	
	Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar, Dan Konektivitas					
	1. Ketahanan Air					
	a. Kapasitas air baku nasional (m3/detik)	m3/detik (kumulatif)	51,44	118,6	58,41	
	b. Pembangunan waduk	buah	21	49	13	
	c. Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk (%)	% (kumulatif)	11%	20%	11,96%	
	d. Kapasitas/daya tampung (miliar m3)	miliar m3	15,8	19	13,85	
	e. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi (permukaan, air tanah, pompa, rawa, dan tambak) - juta ha	Juta Ha (kumulatif)	9,136	10	9,63	
	<u>Pendanaan APBN</u>				0,345	
	<i>Irigasi permukaan</i>				0,108	
	<i>Irigasi air tanah</i>				0,003	
	<i>Irigasi pompa</i>				0,040	
	<i>Irigasi tambak</i>				0,194	
	<u>Pendanaan DAK</u>				0,118	
	<i>Pembangunan</i>				0,0040	
	<i>Peningkatan</i>				0,1141	
	e. Rata-rata kapasitas desain pengendalian strukturan dan non-struktural banjir (tahun, kala ulang)	Tahun	5-25	10-100	2 - 50	

	CAPAIAN		PERKIRAAN CAPAIAN		TARGET RENSTRA 2015-2019	TOTAL PERKIRAAN CAPAIAN	% PERKIRAAN CAPAIAN	KATEGORI EVALUASI
	2016	2017	2018*	2019*				
	7	8	9	10	11	12	13=(12)/(15)	14
	64,56	68,90	76,36	81,36	118,60	81,36	69%	●
	8	6	12	10	49	49	100%	●
	11,96%	12,02%	12,42	13,48	13,00%	13,48%	67%	●
	13,85	13,88	13,93	14,99	15,00	14,99	67%	●
	10,01	10,50	11,00	11,50		11,50	100%	●
	0,357	0,257	0,312	0,323		0,154		
	0,045	0,051	0,031	0,038				
	0,002	0,002	0,000	0,001				
	0,004	0,008	0,007	0,003				
	0,307	0,196	0,274	0,281				
	0,086	0,164	0,185	0,185		0,74		
	0,0017	0,0068	0,0353	0,0353				
	0,0844	0,1577	0,1499	0,1499				
	2 - 50	2 - 50	2 - 50	2 - 50			68%	●

5.3. PERKIRAAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DAN SASARAN PROGRAM HINGGA TAHUN 2019

Berdasarkan capaian 2015-2018 dan perkiraan pelaksanaan target pada tahun 2019, maka capaian sasaran strategis dan sasaran program pada Renstra Direktorat Jenderal SDA 2015-2019 diperkirakan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis SS2. Meningkatnya dukungan terhadap kedaulatan pangan dan kedaulatan energi, diperkirakan tercapai 88%:

Tabel 6
Perkiraan Sasaran Strategis 2015-2019

Sasaran Strategis	2015	2016	2017	2018	2019
Target pada Renstra Kementerian PUPR	45,83%	50,33%	54,83%	59,33%	63,43%
Target pada Renstra Direktorat Jenderal SDA	52,66%	53,93%	55,15%	56,33%	57,28%
Perkiraan Capaian	52,56%	53,15%	54,51%	82,94%	88,32%

2. Sasaran program SP2. Meningkatnya ketahanan air, diperkirakan tercapai 88%.

Tabel 7
Perkiraan Sasaran Program (SP2. Meningkatnya Ketahanan Air)

Sasaran Strategis	2015	2016	2017	2018	2019
Target pada Renstra Kementerian PUPR	28,95%	35%	45%	59%	67,6%
Target pada Renstra Direktorat Jenderal SDA	32,97%	40,85%	48,91%	57,34%	67,60%
Perkiraan Capaian	39,45%	42,61%	45,32%	82,7%	88,25%

- Sasaran program SP3. Meningkatnya pengendalian lumpur Sidoarjo, diperkirakan tercapai 90%.

Tabel 8

Perkiraan Sasaran Program (SP3. Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo)

Sasaran Strategis	2015	2016	2017	2018	2019
Target pada Renstra Kementerian PUPR	-	-	-	-	-
Target pada Renstra Direktorat Jenderal SDA	-	-	-	-	-
Perkiraan Capaian	-	-	-	85,75%	90,5%

- Pengukuran capaian sasaran strategis dan sasaran program pada tahun 2015-2017 masih didasarkan pada peta strategis dan indikator pengukuran sebelumnya, dimana belum ada pendekatan pengukuran secara bertingkat (*cascade*) dan belum termasuk sasaran program untuk pengendalian lumpur Sidoarjo.
- Capaian sasaran kegiatan yang didukung oleh capaian output-output didalamnya dapat lebih rinci dilihat pada LAMPIRAN 6.

5.4. PENUTUP

Revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal SDA Tahun 2015–2019 merupakan penajaman strategi pencapaian target-target yang akan dicapai sebagai konsekuensi logis dari adanya perubahan lingkungan strategis termasuk adanya Direktif Presiden yang harus diakomodir sebagai kebutuhan *new initiatives* sampai akhir periode renstra 2019. Selain itu revisi renstra ini merupakan penyesuaian terhadap perubahan organisasi Kementerian PUPR sebagai konsekuensi dari ditetapkannya Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal SDA Tahun 2015–2019 ini sebagai acuan yang memuat arahan penyelenggaraan pembangunan bidang sumber daya air yang dijabarkan dalam program dan kegiatan bagi setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDA untuk mencapai prioritas nasional dengan memenuhi aspek akuntabilitas.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal SDA Tahun 2015–2019 ini, memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah serta antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja maksimal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air dalam mencapai target-target prioritas nasional perlu dilandasi dengan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan yang optimal.



DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Halaman ini sengaja dikosongkan

Lampiran



Bendungan Teritip
Kalimantan Timur



Lampiran 1 Daftar Daerah Tertinggal 2015-2019

No	Kabupaten	Provinsi	No	Kabupaten	Provinsi
1	Aceh Singkil	Aceh	40	Toju Una-Una	Sulawesi Tengah
2	Nias	Sumatera Utara	41	Sigi	Sulawesi Tengah
3	Nias Selatan	Sumatera Utara	42	Morowali Utara	Sulawesi Tengah
4	Nias Utara	Sumatera Utara	43	Kabupaten Banggai Laut	Sulawesi Tengah
5	Nias Barat	Sumatera Utara	44	Konawe	Sulawesi Tenggara
6	Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	45	Bombana	Sulawesi Tenggara
7	Solok Selatan	Sumatera Barat	46	Konawe Kepulauan	Sulawesi Tenggara
8	Pasaman Barat	Sumatera Barat	47	Polewali Mandar	Sulawesi Barat
9	Musi Rawas	Sumatera Selatan	48	Mamuju Tengah	Sulawesi Barat
10	Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan	49	Jeneponto	Sulawesi Selatan
11	Seluma	Bengkulu	50	Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat
12	Lampung Barat	Lampung	51	Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat
13	Pesisir Barat	Lampung	52	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
14	Bondowoso	Jawa Timur	53	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat
15	Situbondo	Jawa Timur	54	Dompu	Nusa Tenggara Barat
16	Bangkalan	Jawa Timur	55	Bima	Nusa Tenggara Barat
17	Sampang	Jawa Timur	56	Sumbawa Barat	Nusa Tenggara Barat
18	Pandeglang	Banten	57	Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat
19	Lebak	Banten	58	Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur
20	Sambas	Kalimantan Barat	59	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
21	Bengkayang	Kalimantan Barat	60	Kupang	Nusa Tenggara Timur
22	Landak	Kalimantan Barat	61	Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur
23	Ketapang	Kalimantan Barat	62	Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur
24	Sintang	Kalimantan Barat	63	Belu	Nusa Tenggara Timur
25	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	64	Alor	Nusa Tenggara Timur
26	Melawi	Kalimantan Barat	65	Lembata	Nusa Tenggara Timur
27	Kayong Utara	Kalimantan Barat	66	Ende	Nusa Tenggara Timur
28	Seruyan	Kalimantan Tengah	67	Manggarai	Nusa Tenggara Timur
29	Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan	68	Rote Ndao	Nusa Tenggara Timur
30	Nunukan	Kalimantan Timur	69	Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur
31	Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	70	Sumba Barat Daya	Nusa Tenggara Timur
32	Boalemo	Gorontalo	71	Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur
33	Pohuwato	Gorontalo	72	Nagekeo	Nusa Tenggara Timur
34	Gorontalo Utara	Gorontalo	73	Manggarai Timur	Nusa Tenggara Timur
35	Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah	74	Sabu Raijua	Nusa Tenggara Timur
36	Donggala	Sulawesi Tengah	75	Malaka	Nusa Tenggara Timur
37	Toli-Toli	Sulawesi Tengah	76	Buru	Maluku
38	Buol	Sulawesi Tengah	77	Buru Selatan	Maluku
39	Parigi Moutong	Sulawesi Tengah	78	Kepulauan Aru	Maluku

No	Kabupaten	Provinsi	No	Kabupaten	Provinsi
79	Maluku Tengah	Maluku	101	Pegunungan Bintang	Papua
80	Maluku Tenggara Barat	Maluku	102	Tolikara	Papua
81	Maluku Barat Daya	Maluku	103	Sarmi	Papua
82	Seram Bagian Barat	Maluku	104	Keerom	Papua
83	Seram Bagian Timur	Maluku	105	Waropen	Papua
84	Halmahera Barat	Maluku Utara	106	Supiori	Papua
85	Halmahera Selatan	Maluku Utara	107	Mamberamo Raya	Papua
86	Halmahera Timur	Maluku Utara	108	Nduga	Papua
87	Kepulauan Sula	Maluku Utara	109	Lanny Jaya	Papua
88	Pulau Morotai	Maluku Utara	110	Mamberamo Tengah	Papua
89	Pulau Taliabu	Maluku Utara	111	Yalimo	Papua
90	Merauke	Papua	112	Puncak	Papua
91	Jayawijaya	Papua	113	Dogiyai	Papua
92	Nabire	Papua	114	Intan Jaya	Papua
93	Kepulauan Yapen	Papua	115	Deiyai	Papua
94	Biak Numfor	Papua	116	Teluk Wondama	Papua Barat
95	Paniai	Papua	117	Teluk Bintuni	Papua Barat
96	Puncak Jaya	Papua	118	Sorong Selatan	Papua Barat
97	Boven Digoel	Papua	119	Sorong	Papua Barat
98	Mappi	Papua	120	Raja Ampat	Papua Barat
99	Asmat	Papua	121	Tambrau	Papua Barat
100	Yahukimo	Papua	122	Maybrat	Papua Barat

Lampiran 2 Daftar Daerah Perbatasan 2015-2019

No	Pulau	Kabupaten	Kecamatan
1	Sumatera	Sabang	Sukakarya
2	Sumatera	Serdang Berdagai	Tanjung Beringin
3	Sumatera	Rokan Hilir	Pasirlimau Kapuas, Sinaboi
4	Sumatera	Bengkalis	Bukit Batu, Bantan, Rupert Utara, Rupert, Bengkalis
5	Sumatera	Indragiri Hilir	Pulau Burung, Tanah Merang, Gaung Anak Serka, Kateman
6	Sumatera	Kepulauan Meranti	Merbau, Rangsang, Pulau Merbau, Tasik Putri Uyu, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir
7	Sumatera	Dumai	Dumai, Dumai Timur, Dumai Barat, Sungai Sembilan, Medang Kampa
8	Sumatera	Pelalawan	Kuala Kampar
9	Sumatera	Natuna	Bunguran Timur, Serasan, Bunguran Barat, Midai, Pulau Laut, Subi, Serasan Timur, Bunguran Utara

No	Pulau	Kabupaten	Kecamatan
10	Sumatera	Kep. Anambas	Jemaja, Jemaja Timur, Palmatak, Siantan
11	Sumatera	Kota Batam	Belakang Padang, Batam Kota, Bulang Sekupang, Lubuk Raja, Nongsa, Batu Ampar, Batu Aji
12	Sumatera	Bintan	Bintan Utara, Tambelan, Bintan Pesisir, Teluk Sebong, Gunung Kijang
13	Sumatera	Karimun	Kundur, Meral, Moro, Unggar, Meral Barat, Tebing
14	Kalimantan	Kab. Sambas	Paloh, Sajingan Besar
15	Kalimantan	Kab. Bengkayang	Jagoi Babang, Siding
16	Kalimantan	Kab. Sanggau	Entikong, Sekayam
17	Kalimantan	Kab. Sintang	Ketungau Hulu, Ketungau Tengah
18	Kalimantan	Kab. Kapuas Hulu	Badau, Puring Kencana, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Selatan
19	Kalimantan	Kab. Mahakam Ulu	Long Apari, Long Pahangai
20	Kalimantan	Kab. Malinau	Kayan Hulu, Pujungan, Kayan Hilir, Bahau Hulu, Kayan Selatan
21	Kalimantan	Kab. Nunukan	Sebatik Barat, Krayan Selatan, Krayan, Lumbis, Sebuku, Sebatik, Lumbis Ogong, Simanggaris, Tulin Onsoi, Sebatik Tengah, Sebatik Timur, Sebatik Utara
22	Sulawesi	Kep. Sangihe	Tabukan Utara, Tahuna, Marore, Kendahe
23	Sulawesi	Kep. Talaud	Melonguane, Miangas, Nanusa
24	Nusa Tenggara	Kupang	Amfoang Timur
25	Nusa Tenggara	Timor Tengah Utara	Insana Utara, Kefamenanu, Miaomaffo Barat, Bikomi Utara, Bikomi Tengah, Bikomi Selatan, Bikomi Nalulat, Mutis, Musi, Nalbenu
26	Nusa Tenggara	Belu	Atambua, Lamaknen, Lamaknen Selatan, Lasiolat, Tasifeto Timur, Raihat, Tasifeto Barat, Nanaet Dubesi
27	Nusa Tenggara	Malaka	Malaka Barat, Kobalima Timur, Kobalima, Malaka Tengah, Wewiku
28	Nusa Tenggara	Rote Ndao	Rote Barat Daya, Rote Ndao, Rote Baru,
29	Nusa Tenggara	Alor	Teluk Mutiara, Alor Timur, Alor Selatan, Alor Barat Daya, Pureman, Mataru, Pantar, Pantar Tengah, Pantar Barat Laut, Pantar Barat
30	Nusa Tenggara	Sabu Raijua	Raijua
31	Maluku	Kab. Morotai	Morotai Selatan, Morotai Jaya, Morotai Utara, Morotai Barat, Morotai Timur
32	Maluku	Kab. Maluku Tenggara Barat	Tanimbar Selatan, Selaru, Wertamrian, Kormomolin, Nirunmas, Tanimbar Utara, Yaru

No	Pulau	Kabupaten	Kecamatan
33	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	Wetar, Pulau-pulau Terselatan, Pulau Leti, Moalakar
34	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	Aru Tengah Selatan, Aru Selatan, Aru Selatan Timur
35	Papua	Kab Merauke	Eligobel, Muting, Sota, Uilin, Naukenjeri
36	Papua	Kab. Boven Digoel	Mindiptana, Tanah Merah, Jair, Waraopko
37	Papua		Batom, Iwur, Kiwirok, Pepera, Oksomol, Tarub, Murkim,
		Kab. Pegunungan Bintang	Kiwirok Timur, Mufinop
38	Papua	Kab. Keerom	Web, Senggi, Waris, Arso Timur, Towe
39	Papua	Kota Jayapura	Muara Tami, Jayapura Utara
40	Papua	Kab. Supiori	Supiori Barat, Supiori Utara, Kep. Aruri
41	Papua	Kab. Raja Ampat	Kep. Ayau, Ayau

Lampiran 3 Daftar Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) 2015-2019

No	Nama Daerah	No	Kabupaten
1	DPN BANDA ACEH-WEH dan sekitarnya	26	DPN KOMODO-RUTENG dan sekitarnya
2	DPN NIAS-SIMEULUE dan sekitarnya	27	DPN KELIMUTU-MEUMERE dan sekitarnya
3	DPN MEDAN-TOBA dan sekitarnya	28	DPN SUMBA-WAIKABUBAK dan sekitarnya
4	DPN MENTAWAI-SIBERUT dan sekitarnya	29	DPN ALOR-LEMBATA dan sekitarnya
5	DPN PADANG-BUKIT TINGGI dan sekitarnya	30	DPN KUPANG-ROTE NDAO dan sekitarnya
6	DPN PEKAN BARU-RUPAT	31	DPN PONTIANAK-SINGKAWANG dan sekitarnya
7	DPN JAMBI-KERINCI SEBLAT dan sekitarnya	32	DPN SENTARUM-BETUNG KEHIRUN dan sekitarnya
8	DPN BATAM-BINTAN dan sekitarnya	33	DPN PALANGKARAYA-TANJUNG PUTING dan sekitarnya
9	DPN NATUNA-ANAMBAS dan sekitarnya	34	DPN LONG BAGUN-MELAK dan sekitarnya
10	DPN PALEMBANG-BABEL dan sekitarnya	35	DPN TENGGARONG-BALIK PAPAN dan sekitarnya
11	DPN BENGKULU-ENGGANO dan sekitarnya	36	DPN DERAWAN-KAYAN MENTARANG dan sekitarnya
12	DPN KRAKATAU-UJUNG KULON dan sekitarnya	37	DPN BANJARMASIN-MARTAPURA dan sekitarnya
13	DPN JAKARTA-KEP SERIBU dan sekitarnya	38	DPN MAKASSAR-TAKABONERATE dan sekitarnya
14	DPN BOGOR-HALIMUN dan sekitarnya	39	DPN TORAJA-LORELINDU dan sekitarnya
15	DPN BANDUNG-CIWIDEY dan sekitarnya	40	DPN TOGEAN-GORONTALO dan sekitarnya
16	DPN PANGANDARAN-NUSA KAMBANGAN dan sekitarnya	41	DPN MANADO-BUNAKEN dan sekitarnya
17	DPN SEMARANG-KARIMUN JAWA dan sekitarnya	42	DPN KENDARI-WAKATOBI dan sekitarnya
18	DPN SOLO-SANGIRAN dan sekitarnya	43	DPN HALMAHERA-MOROTAI dan sekitarnya
19	DPN BOROBUDUR-YOGYAKARTA dan sekitarnya	44	DPN AMBON-BANDANEIRA dan sekitarnya
20	DPN BROMO-MALANG dan sekitarnya	45	DPN SORONG-RAJA AMPAT dan sekitarnya
21	DPN SURABAYA-MADURA dan sekitarnya	46	DPN MANOKWARI-FAK-FAK dan sekitarnya
22	DPN IJEN-ALASPURWO dan sekitarnya	47	DPN BIAK-NUMFOR dan sekitarnya
23	DPN BALI-NUSA LEMBONGAN dan sekitarnya	48	DPN SENTANI-WAMENA dan sekitarnya
24	DPN LOMBOK-GILI TRAMENA dan sekitarnya	49	DPN TIMIKA-LORENZT dan sekitarnya
25	DPN MOYO-TAMBORA dan sekitarnya	50	DPN MERAUKE-WAZUR dan sekitarnya

Lampiran 4 Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK)

Kode	Program/kegiatan/output	Output	Outcome
10	Program Sumber Daya Air		
2418	Dukungan Manajemen Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)		
2418.001	Kebijakan dan program pengelolaan SDA Nasional	dokumen	dokumen
2418.002	Layanan data dan informasi	layanan	layanan
2418.951	Layanan internal (overhead)	layanan	layanan
2418.994	Layanan perkantoran	bulan	bulan
2419	Pembinaan Program dan Anggaran Ditjen SDA		
2419.001	NSPK perencanaan dan programan SDA	N/S/P/K	N/S/P/K
2419.002	Layanan pemrograman dan penganggaran Ditjen SDA	BBWS/BWS	BBWS/BWS
2419.951	Layanan internal (overhead)	layanan	layanan
2419.994	Layanan perkantoran	bulan	bulan
2420	Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya Air		
2420.001	NSPK tata kelola pengelolaan SDA terpadu	N/S/P/K	N/S/P/K
2420.002	Pembinaan tata kelola pengelolaan SDA	BBWS/BWS	BBWS/BWS
2420.003	Draft peraturan pengelolaan SDA	dokumen	dokumen
2420.951	Layanan internal (overhead)	layanan	layanan
2420.994	Layanan perkantoran	bulan	bulan
2421	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya Air		
2421.950	Layanan dukungan manajemen Eselon I	layanan	layanan
2421.951	Layanan internal (overhead)	layanan	layanan
2421.994	Layanan perkantoran	bulan	bulan
2422	Pembinaan Irigasi, Rawa, dan Tambak		
2422.001	NSPK irigasi, rawa, dan tambak	N/S/P/K	N/S/P/K
2422.002	Layanan pembinaan irigasi, rawa, dan tambak	BBWS/BWS	BBWS/BWS
2422.951	Layanan internal (overhead)	layanan	layanan
2422.994	Layanan perkantoran	bulan	bulan
2423	Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana		
2423.001	NSPK pelaksanaan OP sarana prasarana SDA	N/S/P/K	N/S/P/K
2423.002	Layanan pembinaan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA	BBWS/BWS	BBWS/BWS
2423.003	Layanan pembinaan pelaksanaan OP oleh Pemerintah Daerah	Pemda	Pemda
2423.004	Fasilitasi penyediaan peralatan pendukung OP	unit	unit

Kode	Program/kegiatan/output	Output	Outcome
2423.005	Layanan tanggap darurat akibat bencana	layanan	layanan
2423.951	Layanan internal (overhead)	layanan	layanan
2423.994	Layanan perkantoran	bulan	bulan
2424	Pembinaan Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai		
2424.001	NSPK pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengamanan pantai	N/S/P/K	N/S/P/K
2424.002	Layanan pembinaan pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengamanan pantai	BBWS/BWS	BBWS/BWS
2424.951	Layanan internal (overhead)	layanan	layanan
2424.994	Layanan perkantoran	bulan	bulan
5030	Dukungan Manajemen BBWS/BWS		
5030.001	Rencana dan program kerja BBWS/BWS	dokumen	dokumen
5030.002	Layanan ketatalaksanaan BBWS/BWS	layanan	layanan
5030.951	Layanan internal (overhead)	layanan	layanan
5030.994	Layanan perkantoran	bulan	bulan
5035	Penyelenggaraan Keamanan Bendungan		
5035.001	NSPK teknis keamanan bendungan	N/S/P/K	N/S/P/K
5035.002	Rencana dan program kerja Balai Bendungan	dokumen	dokumen
5035.003	Layanan teknis keamanan bendungan	layanan	layanan
5035.951	Layanan internal (overhead)	layanan	layanan
5035.994	Layanan perkantoran	bulan	bulan
5036	Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak		
5036.001	Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa	dokumen	dokumen
5036.002	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dibangun	km	hektar
5036.003	Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dibangun	bendung	bendung
5036.004	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang dibangun	km	hektar
5036.005	Bendung irigasi kewenangan Daerah yang dibangun	bendung	bendung
5036.006	Jaringan irigasi rawa yang dibangun	km	hektar
5036.007	Jaringan irigasi tambak yang dibangun	km	hektar
5036.008	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang direhabilitasi/ditingkatkan	km	hektar
5036.009	Bendung irigasi kewenangan Pusat yang direhabilitasi/ditingkatkan	bendung	bendung
5036.010	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang direhabilitasi/ditingkatkan	km	hektar

Kode	Program/kegiatan/output	Output	Outcome
5036.011	Bendung irigasi kewenangan Daerah yang direhabilitasi/ditingkatkan	bendung	bendung
5036.012	Jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi/ditingkatkan	km	hektar
5036.013	Jaringan irigasi tambak yang direhabilitasi/ditingkatkan	km	hektar
5036.014	Kawasan rawa yang dikonservasi	km	hektar
5036.951	Layanan internal (overhead)	layanan	layanan
5037	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai		
5037.001	Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase utama perkotaan, dan pengaman pantai	dokumen	dokumen
5037.002	Sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun/ditingkatkan	km	hektar
5037.003	Bangunan perkuatan tebing yang dibangun/ditingkatkan	km	hektar
5037.004	Pintu air/bendung pengendali banjir yang dibangun/ditingkatkan	unit	hektar
5037.005	Kanal banjir yang dibangun/ditingkatkan	km	hektar
5037.006	Stasiun pompa banjir yang dibangun/ditingkatkan	unit	hektar
5037.007	Polder/kolam retensi yang dibangun/ditingkatkan	buah	hektar
5037.008	Saluran drainase yang dibangun/ditingkatkan	km	hektar
5037.009	Bangunan sabo yang dibangun/ditingkatkan	buah	juta m ³
5037.010	Checkdam yang dibangun/ditingkatkan	buah	juta m ³
5037.011	Breakwater yang dibangun/ditingkatkan	km	km
5037.012	Seawall dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun/ditingkatkan	km	km
5037.013	Flood Forcasting & Warning System (FFWS) yang dibangun/ditingkatkan	unit	unit
5037.014	Tanggul yang direhabilitasi	km	hektar
5037.015	Bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi	km	hektar
5037.016	Pintu air/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi	km	hektar
5037.017	Kanal banjir yang direhabilitasi	km	hektar
5037.018	Stasiun pompa banjir yang direhabilitasi	unit	hektar
5037.019	Polder/kolam retensi yang direhabilitasi	buah	hektar
5037.020	Saluran drainase yang direhabilitasi	km	hektar
5037.021	Bangunan sabo yang direhabilitasi	buah	juta m ³
5037.022	Checkdam yang direhabilitasi	buah	juta m ³
5037.023	Breakwater yang direhabilitasi	km	km
5037.024	Seawall dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang direhabilitasi	km	km
5037.025	Sungai yang direstorasi	sungai	sungai

Kode	Program/kegiatan/output	Output	Outcome
5037.026	Mata air yang dilindungi	mata air	mata air
5037.951	Layanan internal (overhead)	layanan	layanan
5038	Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu		
5038.001	Data informasi dan komunikasi publik BBWS/BWS	layanan	layanan
5038.002	Pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pusat yang disusun/direview	dokumen	dokumen
5038.003	Hidrologi dan kualitas air yang kelola	layanan	layanan
5038.004	Kelembagaan pengelolaan SDA yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga	lembaga
5038.005	Rekomtek pemanfaatan SDA yang disusun	dokumen	dokumen
5038.951	Layanan internal (overhead)	layanan	layanan
5039	Pengelolaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		
5039.001	Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan dan bangunan penampung air lainnya	dokumen	dokumen
5039.002	Bendungan baru yang dibangun	bendungan	juta m ³
5039.003	Bendungan dalam tahap pelaksanaan (on going)	bendungan	juta m ³
5039.004	Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun	buah	juta m ³
5039.005	Bendungan yang direhabilitasi	bendungan	juta m ³
5039.006	Embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi	buah	juta m ³
5039.007	Danau yang direvitalisasi	danau	danau
5039.951	Layanan internal (overhead)	layanan	layanan
5040	Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku		
5040.001	Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku	dokumen	dokumen
5040.002	Sumur air tanah untuk air baku yang dibangun	titik	titik
5040.003	Embung air baku yang dibangun	buah	m ³ /detik
5040.004	Unit air baku yang dibangun	km	m ³ /detik
5040.005	Sumur JIAT yang dibangun/ditingkatkan	titik	titik
5040.006	Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang dibangun/ditingkatkan	km	hektar
5040.007	Sumur air tanah untuk air baku yang direhabilitasi	titik	m ³ /detik
5040.008	Embung air baku yang direhabilitasi	buah	m ³ /detik
5040.009	Unit air baku yang direhabilitasi	km	m ³ /detik
5040.010	Sumur JIAT yang direhabilitasi	titik	titik
5040.011	Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang direhabilitasi	km	hektar
5040.951	Layanan internal (overhead)	layanan	layanan

Kode	Program/kegiatan/output	Output	Outcome
5300	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA		
5300.001	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara	km	hektar
5300.002	Bendung irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara	bendung	bendung
5300.003	Jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara	km	hektar
5300.004	Jaringan irigasi tambak yang dioperasikan dan dipelihara	km	hektar
5300.005	Unit pengelola irigasi	unit	unit
5300.006	Tanggul dan tebing yang dioperasikan dan dipelihara	km	hektar
5300.007	Kanal banjir yang dioperasikan dan dipelihara	km	hektar
5300.008	Stasiun pompa banjir yang dioperasikan dan dipelihara	unit	hektar
5300.009	Polder/kolam retensi yang dioperasikan dan dipelihara	buah	hektar
5300.010	Bangunan sabo yang dipelihara	buah	juta m ³
5300.011	Checkdam yang dioperasikan dan dipelihara	buah	juta m ³
5300.012	Breakwater/seawall dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dipelihara	km	km
5300.013	Sungai yang dipelihara	sungai	sungai
5300.014	Mata air yang dipelihara	mata air	mata air
5300.015	Bendungan yang dioperasikan dan dipelihara	bendungan	juta m ³
5300.016	Unit pengelola bendungan	unit	unit
5300.017	Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara	buah	juta m ³
5300.018	Danau yang dipelihara	danau	danau
5300.019	Sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara	titik	titik
5300.020	Embung air baku yang dioperasikan dan dipelihara	buah	m ³ /detik
5300.021	Sumur JIAT yang dioperasikan dan dipelihara	titik	titik
5300.022	Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang dioperasikan dan dipelihara	km	hektar
5300.023	Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara	unit	m ³ /detik
5300.024	Alokasi air yang disusun	dokumen	dokumen
5300.025	Kegiatan tanggap darurat akibat bencana	kegiatan	kegiatan
5300.026	Peralatan dan fasilitas pendukung O&P yang dioperasikan dan dipelihara	unit	unit
5300.027	Kawasan rawa yang dipelihara	km	hektar
5300.951	Layanan internal (overhead)	layanan	layanan
5301	Pembinaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		
5301.001	NSPK bendungan dan bangunan penampung air lainnya	N/S/P/K	N/S/P/K
5301.002	Layanan pembinaan bendungan dan bangunan penampung air lainnya	BBWS/BWS	BBWS/BWS
5301.951	Layanan internal (overhead)	layanan	layanan

Kode	Program/kegiatan/output	Output	Outcome
5301.994	Layanan perkantoran	bulan	bulan
5302	Pembinaan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku		
5302.001	NSPK air tanah dan air baku	N/S/P/K	N/S/P/K
5302.002	Layanan pembinaan air tanah dan air baku	BBWS/BWS	BBWS/BWS
5302.951	Layanan internal (overhead)	layanan	layanan
5302.994	Layanan perkantoran	bulan	bulan
15	Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo		
2407	Pembinaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo		
2407.001	NSPK pengendalian lumpur	N/S/P/K	N/S/P/K
2407.002	Layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo	layanan	layanan
2407.003	Dampak sosial yang ditangani	berkas	berkas
2407.004	Layanan dukungan manajemen Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo	layanan	layanan
2407.951	Layanan internal (overhead)	layanan	layanan
2407.994	Layanan perkantoran	bulan	bulan
2408	Pengendalian Lumpur Sidoarjo		
2408.001	Rencana teknis untuk pengendalian lumpur Sidoarjo	dokumen	dokumen
2408.002	Luapan lumpur yang ditangani	juta m ³	juta m ³
2408.003	Tanggul dan infrastruktur lainnya yang dibangun	km	km
2408.004	Tanggul dan infrastruktur lainnya yang direhabilitasi/ditingkatkan	km	km
2408.005	Tanggul dan infrastruktur lainnya yang dipelihara	km	km
2408.006	Kawasan di luar PAT yang ditata	hektar	hektar
2408.007	Peralatan dan fasilitas pendukung yang dioperasikan dan dipelihara	layanan	layanan
2408.951	Layanan internal (overhead)	layanan	layanan

Lampiran 5 Cara Pengukuran Sasaran Strategis, Sasaran Program, Dan Sasaran Kegiatan

Sasaran Strategis/sasaran Program/indikator Program/sasaran Kegiatan/ Kegiatan/indikator Sasaran Kegiatan	
1	
SS2. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi	
Indikator:	
a. Tingkat ketahanan air (%)	
b. Tingkat pengendalian lumpur Sidoarjo (%)	
Sasaran Program / Indikator Sasaran Program	
SP2. Meningkatnya ketahanan air	
Indikator:	
a. Tingkat layanan sarana prasarana air baku (%) Didukung oleh SK 1 dan 2	
b. Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air (%) Didukung oleh SK 3, 4 dan 5	
c. Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak (%) Didukung oleh SK 6 dan 7	
d. Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA (%) Didukung oleh SK 8, 9, 10 dan 11	
e. Tingkat kinerja layanan irigasi (%) Didukung oleh SK 12 dan 13	
f. Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan (%) Didukung oleh SK 14 dan 15	
Learning & Growth	
Tingkat pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA	
Didukung oleh SK 16	
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	
Didukung oleh SK 17	
Sasaran Kegiatan	
SK1. Peningkatan layanan sarana dan prasarana air baku	
Kegiatan 5040. Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	
1. Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku Jumlah debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku yang dibangun	
a. Sumur air tanah untuk air baku yang dibangun	
b. Embung air baku yang dibangun	
c. Unit air baku yang dibangun	
d. Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku	

	Target Outcome (Pembanding : Renstra Atau PK)		Realisasi Output		Realisasi Outcome		Bobot	Capaian
	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume		
	2	3	4	5	6	7	8	9
								63,65%
							97%	62,65%
							3%	96,00%
							10%	34,81%
							30%	110,14%
							15%	23,58%
							5%	40,06%
							25%	32,47%
							10%	84,66%
							3%	80,00%
							2%	80,00%
							90%	27,6%
							70%	37%
	m ³ /det	13.00			m ³ /det	4.78		
			titik		m ³ /det			
			buah		m ³ /det			
			km		m ³ /det			
			dokumen		dokumen			

Sasaran Strategis/sasaran Program/indikator Program/sasaran Kegiatan/ Kegiatan/indikator Sasaran Kegiatan	
1	
2. Tingkat pengembalian fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku seperti semula Jumlah debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku yang direhabilitasi	
a. Sumur air tanah untuk air baku yang direhabilitasi	
b. Embung air baku yang direhabilitasi	
c. Unit air baku yang direhabilitasi	
SK2. Peningkatan layanan pembinaan bidang air tanah dan air baku	
Kegiatan 5302. Pembinaan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	
Tingkat pelayanan pembinaan bidang air tanah dan air baku	
a. Dokumen NSPK bidang air tanah dan air baku	
b. BBWS/BWS yang dilayani dalam bidang air tanah dan air baku	
SK3. Peningkatan kapasitas tampung sumber-sumber air	
Kegiatan 5039. Pengelolaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
1. Tingkat kapasitas tampung sumber air Jumlah kapasitas tampung bangunan air (bendungan, embung, bangunan penampung air lainnya) yang dibangun	
a. Bendungan yang selesai dibangun pada tahun eksisting	
b. Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun	
c. Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya	
2. Tingkat pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air seperti semula Jumlah kapasitas tampung bangunan air (bendungan, embung, bangunan penampung air lainnya) yang direhabilitasi	
a. Bendungan yang direhabilitasi	
b. Embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi	
c. Danau yang direvitalisasi	
3. Tingkat potensi energi sumber air Jumlah potensi energi dari bendungan yang selesai di bangun pada tahun berjalan	
a. Bendungan yang selesai pada tahun berjalan	
SK4. Peningkatan layanan pembinaan bidang bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya	
Kegiatan 5301. Pembinaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
Tingkat pelayanan pembinaan bidang bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya	
a. Dokumen NSPK bidang bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya	
b. BBWS/BWS yang dibina dalam bidang bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya	
SK5. Peningkatan layanan pembinaan bidang keamanan bendungan	
Kegiatan 5035. Penyelenggaraan Keamanan Bendungan	
Tingkat layanan pembinaan bidang keamanan bendungan	
a. Dokumen NSPK bidang keamanan bendungan	
b. Rencana dan program kerja Balai Bendungan	
c. Layanan teknis keamanan bendungan	

	Target Outcome (Pembanding : Renstra Atau PK)		Realisasi Output		Realisasi Outcome		Bobot	Capaian
	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume		
	2	3	4	5	6	7	8	9
					m ³ /det		30%	6%
	m ³ /det	2,96				0,18		
			titik		m ³ /det			
			buah		m ³ /det			
			km		m ³ /det			
							10%	100%
							100%	100%
	N/S/P/K		N/S/P/K		%			
	BBWS/BWS	34	BBWS/BWS	34	BBWS/BWS	34		
							85%	111,9%
							60%	171%
	juta m ³	146,62			juta m ³	250		
	bendungan		bendungan	10	juta m ³	250		
	buah		buah	80	juta m ³			
	dokumen		dokumen		dokumen			
							35%	0%
	juta m ³	756,00			juta m ³	0,8		
	bendungan		bendungan	2	juta m ³	0,8		
	buah		buah	11	juta m ³			
	danau		danau		danau			
							5%	192%
	MW	5,92			MW	11,35		
	Bendungan		Bendungan	10,00	MW	11,35		
							10%	100%
							100%	100%
	N/S/P/K		N/S/P/K		N/S/P/K			
	BBWS/BWS	34	BBWS/BWS	34	BBWS/BWS	34		
							5%	100%
							100%	100%
	N/S/P/K		N/S/P/K		N/S/P/K			
	dokumen		dokumen		dokumen			
	instansi		instansi		instansi			

Sasaran Strategis/sasaran Program/indikator Program/sasaran Kegiatan/ Kegiatan/indikator Sasaran Kegiatan	
1	
SK6. Peningkatan kapasitas pengendalian daya rusak	
Kegiatan 5037. Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengamanan Pantai	
1. Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	
Jumlah luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air oleh sarana prasarana pengendali banjir yang dibangun	
a. Sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun/ditingkatkan	
b. Bangunan perkuatan tebing yang dibangun/ditingkatkan	
c. Kanal banjir yang dibangun/ditingkatkan	
d. Stasiun pompa banjir yang dibangun/ditingkatkan	
e. Pintu air/bendungan pengendali banjir yang dibangun/ditingkatkan	
f. Polder / kolam retensi yang dibangun / ditingkatkan	
g. Flood Forecasting & Warning System (FFWS) yang dibangun / ditingkatkan	
h. Rencana teknis pengendalian banjir	
Jumlah debris/lahar yang ditampung oleh sarana prasarana pengendali sedimen/lahar gunung berapi yang dibangun	
a. Bangunan sabo yang dibangun / ditingkatkan	
b. Checkdam yang dibangun / ditingkatkan	
c. Rencana teknis pengendalian banjir	
Jumlah panjang pantai yang dilindungi oleh sarana prasarana pengamanan pantai yang dibangun	
a. Breakwater yang dibangun / ditingkatkan	
b. Seawall dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun / ditingkatkan	
c. Rencana teknis pengendalian banjir	
2. Tingkat pengembalian luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air prasarana penyediaan air baku seperti semula	
Jumlah luas kawasan yang kembali terlindungi dari daya rusak air, oleh sarana prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi	
a. Tanggul yang direhabilitasi	
b. Bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi	
c. Kanal banjir yang direhabilitasi	
d. Pintu air/bendungan pengendali banjir yang direhabilitasi	
e. Stasiun pompa banjir yang direhabilitasi	
f. Polder / kolam retensi yang direhabilitasi	
Jumlah debris/lahar yang ditampung oleh sarana prasarana pengendali sedimen/lahar gunung berapi yang direhabilitasi	
a. Bangunan sabo yang direhabilitasi	
b. Checkdam yang direhabilitasi	
Jumlah panjang pantai yang dilindungi oleh sarana prasarana pengamanan pantai yang direhabilitasi	
a. Breakwater yang direhabilitasi	
b. Seawall dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang direhabilitasi	
SK7. Peningkatan layanan pembinaan bidang sungai dan pantai	
Kegiatan 2424. Pembinaan Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama, Perkotaan, dan Pengamanan Pantai	
Tingkat layanan pembinaan bidang sungai dan pantai	
a. Dokumen NSPK bidang sungai dan pantai	
b. BBWS/BWS yang dibina dalam bidang sungai dan pantai	

	Target Outcome (Pembanding : Renstra Atau PK)		Realisasi Output		Realisasi Outcome		Bobot	Capaian
	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume		
	2	3	4	5	6	7	8	9
							90%	15,1%
							70%	20%
	hektar	47.067	km	189,78	hektar	12.652	70%	27%
	km	527	km	176,78	hektar			
	km	179	km	7,00	hektar			
	km	2	km	6	hektar			
	unit		unit	2	hektar			
	unit		unit	2	hektar			
	buah		buah	1	hektar			
	unit		unit		unit	0		
	dokumen		dokumen		dokumen	0		
	juta m ³	321	buah	23	juta m ³	2	20%	1%
	juta m ³	320	buah	11	juta m ³	0,994	64	
	juta m ³	0,8	buah	12	juta m ³	0,665	20	
			dokumen		dokumen	0		
	km	158	km	21,64	km	22	10%	14%
	km	1,25	km	17,64	km	17,64		
	km	156,43	km	4	km	4		
	dokumen	0	dokumen		dokumen	0		
							30%	3%
	hektar	14067	km	7,15	hektar	476,67	70%	3%
	km	149	km	6	hektar			
	km	60	km	1,15	hektar			
	km	2	km		hektar			
	unit		unit		hektar			
	unit		unit		hektar			
	buah		buah		hektar			
	juta m ³	100,2	buah		juta m ³	0,82	20%	1%
	juta m ³	100	buah	10	juta m ³	0,82	20	
	juta m ³	0,2	buah		juta m ³		5	
	km	3	km		km	0	10%	4%
	km	2,55	km	0,11	km	0,11		
	km	0,1	km	0	km	0		
							10%	100%
	%	100				100	100%	100%
			N/S/P/K		N/S/P/K			
	BBWS/BWS	34	BBWS/BWS	34	BBWS/BWS	34		

Sasaran Strategis/sasaran Program/indikator Program/sasaran Kegiatan/ Kegiatan/indikator Sasaran Kegiatan	
1	
SK8. Peningkatan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA	
Kegiatan 5038. Peningkatan Tatakelola Pengelolaan SDA Terpadu	
1. Peningkatan indeks RBO	
Diukur berdasarkan 14 indikator dan parameter RBO Benchmarking yang ditetapkan oleh Network of Asian River Basin Organization (NARBO)	
SK9. Peningkatan layanan pembinaan tata kelola pengelolaan SDA terpadu	
Kegiatan 2420. Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya Air	
Tingkat layanan pembinaan tata kelola pengelolaan SDA terpadu	
a. Dokumen NSPK bidang tata kelola pengelolaan SDA terpadu	
b. BBWS/BWS yang dibina dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pusat	
c. BBWS/BWS yang dibina dalam pengelolaan kelembagaan pengelolaan SDA	
d. BBWS/BWS yang dibina dalam pemanfaatan sumber daya air	
e. BBWS/BWS yang dibina dalam pengelolaan hidrologi, kualitas air, dan lingkungan SDA	
f. Draft peraturan pengelolaan SDA	
SK10. Peningkatan layanan manajemen BBWS/BWS	
Kegiatan 5030. Dukungan Manajemen BBWS/BWS	
Tingkat layanan manajemen BBWS/BWS	
a. Rencana dan program kerja BBWS/BWS	
b. Dokumen ketatalaksanaan BBWS/BWS (kepegawaian, BMN, keuangan, dll)	
SK11. Peningkatan layanan kesekretariatan Dewan SDA Nasional	
Kegiatan 2418. Dukungan Manajemen Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	
Tingkat layanan kesekretariatan Dewan SDA Nasional	
a. Dokumen konsep kebijakan dan program pengelolaan SDA nasional	
b. Layanan data dan informasi Sekretariat Harian DSDAN	
SK12. Peningkatan kinerja layanan irigasi	
Kegiatan 5036. Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak	
1. Tingkat layanan jaringan irigasi	
Jumlah luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun	
a. Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat dan Daerah yang dibangun	
c. Jaringan irigasi rawa yang dibangun	
d. Jaringan irigasi tambak yang dibangun	
e. Jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang dibangun	
f. Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa	
g. Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dibangun	
h. Bendung irigasi kewenangan Daerah yang dibangun	
2. Tingkat pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi	
Jumlah luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang direhabilitasi/ditingkatkan	
a. Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat dan Daerah yang direhabilitasi/ditingkatkan	

	Target Outcome (Pembandingan : Renstra Atau PK)		Realisasi Output		Realisasi Outcome		Bobot	Capaian
	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume		
	2	3	4	5	6	7	8	9
							80%	25,1%
							30%	84%
	indeks	3,29	indeks	2,75	indeks	2,75		
							10%	100%
							100%	100%
			N/S/P/K		N/S/P/K			
	BBWS/BWS	34	BBWS/BWS	34	BBWS/BWS	34		
	BBWS/BWS	34	BBWS/BWS	34	BBWS/BWS	34		
	BBWS/BWS	34	BBWS/BWS	34	BBWS/BWS	34		
	BBWS/BWS	34	BBWS/BWS	34	BBWS/BWS	34		
			Draft		Draft		8%	100%
							100%	100%
	Dokumen		Dokumen		Dokumen	0		
	Dokumen		Dokumen		Dokumen	0%		
							2%	100%
							100%	100%
	Layanan	1	Dokumen Layanan	1	Dokumen Layanan	1		
							90%	25%
							65%	20%
	hektar	236.848	km	0	hektar	48.123		
			km		hektar	39.111		
			km		hektar	4.839		
			km		hektar	2.661		
			km		hektar	1.512		
			Dokumen		Dokumen			
	bendung	3	Bendung	11	Bendung	11		
	bendung	14	Bendung	6	Bendung	6		
							30%	23%
	hektar	644.548	km		hektar	146.556		
			km		hektar	109.961		

Sasaran Strategis/sasaran Program/indikator Program/sasaran Kegiatan/ Kegiatan/indikator Sasaran Kegiatan	
1	
c. Jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi/ditingkatkan	
d. Jaringan irigasi tambak yang direhabilitasi/ditingkatkan	
e. Jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang direhabilitasi/ditingkatkan	
f. Bendung irigasi kewenangan Pusat yang direhabilitasi / ditingkatkan	
g. Bendung irigasi kewenangan Daerah yang direhabilitasi / ditingkatkan	
h. Kawasan rawa yang dikonservasi	
3. Tingkat potensi layanan irigasi bersumber dari waduk	
Persentase jumlah potensi luas layanan irigasi yang bersumber dari waduk	
a. Bendungan yang selesai pada tahun berjalan	
SK13: Peningkatan layanan pembinaan bidang irigasi dan rawa	
Kegiatan 2422. Pembinaan Irigasi, Rawa, dan Tambak	
Tingkat layanan pembinaan bidang irigasi dan rawa	
a. Dokumen NSPK bidang irigasi dan rawa	
b. BBWS/BWS yang dibina dalam bidang irigasi dan rawa	
SK14: Peningkatan kinerja layanan OP sarana prasarana sumber daya air	
Kegiatan 5300. Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA	
1. Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	
Jumlah debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku yang dioperasikan dan dipelihara	
a. Sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara	
b. Embung air baku yang dioperasikan dan dipelihara	
c. Unit air baku	
d. Sumur JIAT yang dioperasikan dan dipelihara	
e. Mata air yang dipelihara	
2. Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air	
Jumlah kapasitas tampung bangunan air (bendungan, embung, bangunan penampung air lainnya) yang dioperasikan dan dipelihara	
a. Bendungan yang dioperasikan dan dipelihara	
b. Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara	
c. Danau yang dipelihara	
3. Terjaganya luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	
Jumlah luas kawasan yang selalu terlindungi dari daya rusak air, oleh sarana prasarana pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara	
a. Tanggul dan tebing yang dioperasikan dan dipelihara	
b. Kanal banjir yang dioperasikan dan dipelihara	
c. Stasiun pompa banjir yang dioperasikan dan dipelihara	
d. Polder / kolam retensi yang dioperasikan dan dipelihara	
e. Sungai yang dipelihara	
Jumlah debris/lahar yang ditampung oleh sarana prasarana pengendali sedimen/lahar gunung berapi yang dioperasikan dan dipelihara	
a. Bangunan sabo yang dipelihara	
b. Checkdam yang dioperasikan dan dipelihara	
Jumlah panjang pantai yang dilindungi oleh sarana prasarana pengamanan pantai yang dioperasikan dan dipelihara	
a. Breakwater / seawall dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dipelihara	

	Target Outcome (Pembanding : Renstra Atau PK)		Realisasi Output		Realisasi Outcome		Bobot	Capaian
	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume		
	2	3	4	5	6	7	8	9
			km		hektar	24.740		
			km		hektar	9.920		
			km		hektar	1.935		
bendung	9		Bendung	5	Bendung	5		
bendung	6		Bendung	0	Bendung	-		
	-		km	0	hektar	-		
			%				5%	99%
%	12.60				%	12,44		
Bendungan			Bendungan	10.00	hektar	889.174		
							10%	100%
							100%	100%
			N/S/P/K		N/S/P/K			
BBWS/BWS	34		BBWS/BWS	34	BBWS/BWS	34		
							90%	83%
							25%	100%
m ² /det	77,00				m ² /det	77,00		
titik	30		titik	30	m ² /det			
buah	1.087		buah	143	m ² /det			
km	108		km	108	m ² /det			
titik	1.735		titik	1.735	titik			
mata air	3		mata air	3	mata air			
							25%	32%
juta m ³	13.803				juta m ³	4.393		
bendungan			bendungan	173	juta m ³			
buah			buah	1.087	juta m ³			
danau			danau		danau			
							23%	100%
hektar	259.443				hektar		70%	100%
km	2.490		km	2.490	hektar	259.443		
km	158		km	158	hektar			
unit	42		unit	42	hektar			
buah	8		buah	8	juta m ³			
sungai	220		sungai	220	sungai	220		
juta m ³	469				juta m ³	469	20%	100%
buah	90		buah	90	juta m ³	450		
buah	473		buah	473	juta m ³	19		
km	167				km	167	10%	100%
	167		km	167	km	167		

Sasaran Strategis/sasaran Program/indikator Program/sasaran Kegiatan/ Kegiatan/indikator Sasaran Kegiatan	
1	
4. Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi	
Jumlah luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	
a. Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara	
c. Jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara	
d. Jaringan irigasi tambak yang dioperasikan dan dipelihara	
e. Jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang dioperasikan dan dipelihara	
f. Bendung irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara	
g. Sumur JIAT yang dioperasikan dan dipelihara	
h. Kawasan rawa yang dipelihara	
5. Terlaksananya kegiatan pendukung operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA	
Tingkat layanan kegiatan pendukung operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA	
a. Unit pengelola irigasi	
b. Unit pengelola bendungan	
c. Alokasi air yang disusun	
d. Kegiatan tanggap darurat akibat bencana	
e. Peralatan dan fasilitas pendukung O&P yang dioperasikan dan dipelihara	
SK15: Peningkatan pembinaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA	
Kegiatan 2423. Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	
Tingkat layanan pembinaan bidang operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA	
a. Dokumen NSPK bidang operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA	
b. BBWS/BWS yang dibina dalam bidang operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA	
c. Penda yang dibina dalam bidang operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA	
d. Peralatan pendukung OP	
e. Layanan tanggap darurat akibat bencana	
LEARNING AND GROWTH	
SK16: Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA : (SDA)	
Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA : (PPLS)	
Kegiatan 2419. Pembinaan Program dan Anggaran Ditjen SDA	
Tingkat pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA (Program SDA)	
Tingkat pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA (Program PPLS)	
a. Dokumen NSPK bidang pemrograman dan penganggaran Ditjen SDA	
b. BBWS/BWS yang dibina dalam bidang pemrograman dan penganggaran Ditjen SDA	
SK17: Peningkatan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya : (SDA)	
Peningkatan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya : (PPLS)	
Kegiatan 2421. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen. Sumber Daya Air	
Tingkat dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya (Program SDA)	
Tingkat dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya (Program PPLS)	
a. BBWS/BWS yang dibina dalam manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	

	Target Outcome (Pembanding : Renstra Atau PK)		Realisasi Output		Realisasi Outcome		Bobot	Capaian
	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume		
	2	3	4	5	6	7		
							25%	100%
	hektar	3.053.595			hektar	3.053.595		
	km	25.975	km	25.975	hektar			
	km	13.812	km	13.812	hektar			
	km	755,31	km	755,31	hektar			
	km	440,81	km	440,81	hektar			
	bendung		bendung		bendung			
	Titik		Titik		Titik			
	km		km		hektar			
							2%	100%
							100%	100%
	unit	2	unit	2	unit	2		
	unit	0	unit	0	unit	0		
	unit	58	unit	58	kegiatan	58		
	unit	4	unit	4	kegiatan	4		
	unit	150	unit	150	unit	150		
							10%	100%
							100%	100%
	N/S/P/K		N/S/P/K		N/S/P/K			
	BBWS/BWS	34	BBWS/BWS	34	BBWS/BWS	34		
	Pemda		Pemda		Pemda			
	Unit		Unit		Unit			
	Layanan		Layanan		Layanan			
							80%	100%
							20%	100%
							100%	100%
							100%	100%
	N/S/P/K		N/S/P/K		N/S/P/K			
	BBWS/BWS	34	BBWS/BWS	34	BBWS/BWS	34		
							80%	100%
							20%	100%
							100%	100%
							100%	100%
	BBWS/BWS	34	BBWS/BWS	34	BBWS/BWS	34		

Sasaran Strategis/sasaran Program/indikator Program/sasaran Kegiatan/ Kegiatan/indikator Sasaran Kegiatan	
1	
SP3. Meningkatnya pengendalian lumpur Sidoarjo	
Indikator:	
a. Tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo (%)	
Didukung oleh SK 18 dan 19	
Learning & Growth	
Tingkat pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA	
Didukung oleh SK 16	
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	
Didukung oleh SK 17	
SK18: Peningkatan layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo	
Kegiatan 2407. Pembinaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	
Tingkat layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo	
a. NSPK pengendalian lumpur	
b. Layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo	
c. Dampak sosial yang ditangani	
d. Layanan dukungan manajemen Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo	
SK19: Peningkatan layanan sarana prasarana Pengendali Lumpur Sidoarjo	
Kegiatan 2408. Pengendalian Lumpur Sidoarjo	
1. Tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo	
Jumlah panjang tanggul dan infrastruktur lainnya yang ditinggikan	
a. Rencana teknis untuk pengendalian lumpur Sidoarjo	
b. Tanggul dan infrastruktur lainnya yang dibangun	
c. Kawasan di luar PAT yang ditata	
2. Tingkat pengembalian fungsi layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo	
Jumlah panjang tanggul dan infrastruktur lainnya yang direhabilitasi / ditingkatkan	
a. Tanggul dan infrastruktur lainnya yang direhabilitasi/ditingkatkan	
3. Terjaganya fungsi layanan sarana prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo	
Jumlah panjang tanggul dan infrastruktur lainnya yang dioperasikan dan dipelihara	
a. Tanggul dan infrastruktur lainnya yang dipelihara	
b. Peralatan dan fasilitas pendukung yang dioperasikan dan dipelihara	
4. Teralirkannya luapan lumpur ke Kali Porong	
Jumlah volume luapan lumpur yang dialirkan ke Kali Porong	
a. Luapan lumpur yang ditangani	
5. Tertatanya kawasan diluar PAT	
Jumlah luas kawasan di luar PAT yang ditata	
a. Kawasan di luar PAT yang ditata	

	Target Outcome (Pembanding : Renstra Atau PK)		Realisasi Output		Realisasi Outcome		Bobot	Capaian
	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume		
	2	3	4	5	6	7	8	9
							95%	100,00%
							2%	20,00%
							3%	20,00%
							25%	100%
							100%	100%
	N/S/P/K		N/S/P/K		N/S/P/K			
	layanan		layanan		layanan			
	berkas		berkas		berkas			
	layanan	1	layanan	1	layanan	1		
							75%	100%
							10%	100%
	dokumen		dokumen		dokumen			
	km		km		km			
	kawasan		kawasan		hektar			
							5%	100%
	km		km		km			
							10%	100%
	km		km		km			
	unit		unit		unit			
							70%	100%
	juta m ³		juta m ³		juta m ³			
							5%	100%
	hektar		hektar		hektar			

Lampiran 6 Tabel Matriks Target Dan Alokasi Pendanaan 2015-2019

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/indikator	Satuan	Review Capaian Target		
			2015	2016	2017
			Capaian	Capaian	Capaian
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat					
	Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi	%	52,56%	53,14%	54,51%
	(1) Tingkat dukungan ketahanan air	%	39,45%	42,61%	45,32%
	(2) Tingkat dukungan pengendalian lumpur Sidoarjo		-	-	-
Program : Pengelolaan Sumber Daya Air					
Sasaran Program : Meningkatkan Ketahanan Air Nasional					
	1. Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku	%			
	2. Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air	%			
	3. Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak	%			
	4. Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA	%			
	5. Tingkat kinerja layanan irigasi	%			
	6. Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan	%			
	7. <i>Learning & Growth</i>				
	Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA	%			
	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%			
2418	Kegiatan 1.1 : Dukungan Manajemen Dewan Sumber Daya Air (DSDAN)				
	Unit Organisasi : Dewan Sumber Daya Air Nasional				
	Sasaran Kegiatan 1.1 : Peningkatan Layanan Kesekretariatan Dewan SDA Nasional				
	1 Tingkat layanan kesekretariatan Dewan SDA Nasional	%	100,00	100,00	100,00
	2418.001 Kebijakan dan program pengelolaan SDA nasional	dokumen	1,00	1,00	1,00
	2418.002 Layanan data dan informasi	layanan			1,00
	2418.951 Layanan internal (overhead)	layanan			1,00
	2418.970 Layanan dukungan manajemen satker	layanan			
	2418.994 Layanan perkantoran	bulan	12,00	12,00	12,00
2419	Kegiatan 1.2 : Pembinaan Program Dan Anggaran Ditjen SDA				
	Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Jaringan SDA				

	Review Capaian Target		Anggaran (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Rencana Target	Rencana Target 2019	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Alokasi	Perkiraan Alokasi
	82,94%		31.101.850	28.294.304	33.267.631	37.309.552	39.749.276
	82,70%		31.101.850	28.294.304	33.267.631	36.903.454	39.324.276
	85,75%		-	-	-	406.098	425.000
			31.101.849,80	28.294.303,84	33.267.631,17	36.903.453,53	39.324.275,83
			12.906,00	13.288,32	9.302,70	10.207,71	10.020,39
	100,00	100,00					
	4,00	1,00	5.410,39	1.307,06	3.718,97	3.625,56	3.943,02
	1,00	1,00	4.498,95	8.437,38	2.499,18	2.986,40	2.490,00
	1,00	1,00	2.996,67	3.543,88	1.677,21	1.620,90	200,00
							1.631,44
	12,00	12,00			1.407,34	1.974,85	1.755,93
			61.790,50	70.170,17	69.702,97	83.085,01	224.465,31

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/indikator	Satuan	Review Capaian Target		
			2015	2016	2017
			Capaian	Capaian	Capaian
	Sasaran Kegiatan 1.2 : Peningkatan Pembinaan Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pengelolaan SDA				
	1 Tingkat pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA	%	100,00	100,00	100,00
	2419.001 NSPK perencanaan dan pemrograman SDA	N/S/P/K	1,00	-	-
	2419.002 Layanan pemrograman dan penganggaran Ditjen SDA	BBWS/BWS	22,00	33,00	33,00
	2419.951 Layanan internal (overhead)	layanan	1,00	1,00	1,00
	2419.970 Layanan dukungan manajemen satker	layanan			
	2419.994 Layanan perkantoran	bulan	12,00	12,00	12,00
2420	Kegiatan 1.3 : Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya Air				
	Unit Organisasi : Bina Penatagunaan SDA				
	Sasaran Kegiatan 1.3 : Peningkatan Layanan Pembinaan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu				
	1 Tingkat layanan pembinaan tata kelola pengelolaan SDA terpadu	%	100,00	100,00	100,00
	2420.001 NSPK tata kelola pengelolaan SDA terpadu	N/S/P/K		9,00	4,00
	2420.002 Pembinaan tata kelola pengelolaan SDA	BBWS/BWS	33,00	33,00	33,00
	2420.003 Draft peraturan pengelolaan SDA	dokumen			4,00
	2420.951 Layanan internal (overhead)	layanan	1,00	1,00	1,00
	2420.970 Layanan dukungan manajemen satker	layanan			
	2420.994 Layanan perkantoran	bulan	12,00	12,00	12,00
2421	Kegiatan 1.4 : Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya Air				
	Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal SDA				
	Sasaran Kegiatan 1.4 : Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
	1 Tingkat dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	%	100,00	100,00	100,00
	2421.950 Layanan dukungan manajemen Eselon I	layanan	1,00	1,00	1,00
	2421.951 Layanan internal (overhead)	layanan	1,00	1,00	1,00
	2421.970 Layanan dukungan manajemen satker	layanan			
	2421.994 Layanan perkantoran	bulan	12,00	12,00	12,00

	Review Capaian Target		Anggaran (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Rencana Target	Rencana Target 2019	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Alokasi	Perkiraan Alokasi
	100,00	100,00					
	-		-	-			
	36,00	33,00	39.296,53	35.687,30	39.495,87	55.986,11	39.985,00
	1,00	1,00			5.058,82	3.714,44	900,00
							159.381,37
	12,00	12,00	22.493,97	34.482,87	25.148,28	23.384,46	24.198,93
			94.682,27	84.554,88	78.793,13	49.418,33	45.516,31
	100,00	100,00					
	-	4,00	2.183,74	10.980,00	5.052,38	760,00	300,00
	33,00	33,00	74.098,74	45.360,97	40.235,92	17.915,96	18.775,96
	4,00	4,00			8.216,00	5.947,87	5.947,87
	1,00	1,00				3.538,01	864,00
							2.712,26
	12,00	12,00	18.399,79	28.213,91	25.288,83	21.256,48	16.916,22
			565.664,78	617.224,50	652.372,78	644.350,92	582.127,83
	100,00	100,00					
	1,00		27.964,61	35.169,03	39.965,02	35.303,76	35.303,76
	1,00		537.700,18	582.055,47	3.912,77	13.128,36	9.554,25
	12,00				608.494,99	595.918,81	535.334,46

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Review Capaian Target			
			2015	2016	2017	
			Capaian	Capaian	Capaian	
2422	Kegiatan 1.5 : Pembinaan Irigasi, Rawa, Dan Tambak					
	Unit Organisasi: Direktorat Irigasi Dan Rawa					
	Sasaran Kegiatan 1.5 : Peningkatan Layanan Pembinaan Bidang Irigasi Dan Rawa					
	1 Tingkat layanan pembinaan bidang irigasi dan rawa	(%)	100,00	100,00	100,00	
	2422.001 NSPK irigasi permukaan, irigasi rawa, dan irigasi tambak	N/S/P/K		19,00	10,00	
	2422.002 Layanan pembinaan irigasi rawa, dan tambak	BBWS/BWS	33,00	33,00	33,00	
	2422.951 Layanan internal (overhead)	layanan	1,00	1,00	1,00	
	2422.970 Layanan dukungan manajemen satker	layanan				
	2422.994 Layanan perkantoran	bulan	12,00	12,00	12,00	
2423	Kegiatan 1.6 : Pembinaan Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana					
	Unit Organisasi: Direktorat Bina Operasi Dan Pemeliharaan					
	Sasaran Kegiatan 1.6 : Peningkatan Pembinaan Operasi Dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA					
	1 Tingkat layanan pembinaan bidang operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA	%	100,00	100,00	100,00	
	2423.001 NSPK pelaksanaan OP sarana prasarana SDA	N/S/P/K	5,00	4,00	18,00	
	2423.002 Layanan pembinaan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA	BBWS/BWS	33,00	33,00	33,00	
	2423.003 Layanan pembinaan pelaksanaan OP oleh Pemerintah Daerah	Pemda	20,00	20,00	20,00	
	2423.004 Fasilitasi penyediaan peralatan pendukung OP	unit		-	10,00	
	2423.005 Layanan tanggap darurat akibat bencana	BBWS/BWS	1,00	1,00	1,00	
	2423.951 Layanan internal (overhead)	layanan	1,00	1,00	1,00	
	2423.970 Layanan dukungan manajemen satker	layanan				
	2423.994 Layanan perkantoran	bulan	12,00	12,00	12,00	
2424	Kegiatan 1.7 : Pembinaan Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama, Dan Pengamanan Pantai (Semula : Pembinaan Konservasi, Sungai, Pengendalian Banjir/lahar Dan Pengaman Pantai)					
	Unit Organisasi: Direktorat Sungai Dan Pantai					
	Sasaran Kegiatan 1.7 : Peningkatan Layanan Pembinaan Bidang Sungai Dan Pantai					
	1 Tingkat layanan pembinaan bidang sungai dan pantai	%	100,00	100,00	100,00	
	2424.001 NSPK pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai	N/S/P/K	-	1,00	1,00	

	Review Capaian Target		Anggaran (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Rencana Target	Rencana Target 2019	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Alokasi	Perkiraan Alokasi
			172.933,68	201.867,20	190.428,98	271.097,04	257.153,10
	100,00	100,00					
	-		6.063,17	2.500,00	14.241,51		
	34,00	33,00	117.141,15	96.482,28	70.899,63	168.993,13	164.907,63
	1,00	1,00			400,00	1.232,67	
							2.115,62
	12,00	12,00	49.729,36	102.884,93	104.887,85	100.871,24	90.129,85
			822.783,85	475.400,00	651.831,79	624.810,05	571.218,28
	100,00	100,00					
	2,00	10,00	17.594,07	3.500,00	18.143,93	6.195,00	2.984,16
	34,00	33,00	85.360,13	65.000,00	65.941,17	123.085,49	88.333,53
	34,00	20,00	337.894,66	250,00	5.722,37	8.250,00	4.814,54
	10,00	33,00		132.347,46	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	1,00	1,00	316.900,45	175.251,42	397.724,59	310.484,99	308.642,02
	1,00	1,00	65.034,55	99.051,12	626,87	2.087,54	554,14
							2.131,84
	12,00	12,00			92.672,85	103.707,04	92.758,05
			122.789,24	221.365,00	139.532,26	157.329,32	199.906,18
	100,00	100,00					
	-	1,00	-	1.200,63	300,00	300,00	300,00

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Review Capaian Target		
			2015	2016	2017
			Capaian	Capaian	Capaian
	2424.002 Layanan pembinaan pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengamanan pantai	BBWS/BWS	33,00	33,00	33,00
	2424.951 Layanan internal (overhead)	layanan	1,00	1,00	1,00
	2424.970 Layanan dukungan manajemen satker	layanan			
	2424.994 Layanan perkantoran	bulan	12,00	12,00	12,00
5030	Kegiatan 1.8 : Dukungan Manajemen BBWS/BWS				
	Unit Organisasi : BBWS/BWS				
	Sasaran Kegiatan 1.8 : Peningkatan Layanan Manajemen Bbws/bws				
	1 Tingkat layanan manajemen BBWS/BWS	%			100,00
	5030.001 Rencana dan program kerja BBWS/BWS	dokumen			143,00
	5030.002 Layanan ketatalaksanaan BBWS/BWS	layanan			54,00
	5030.951 Layanan Internal (Overhead)	layanan			37,00
	5030.970 Layanan dukungan manajemen satker	layanan			
	5030.994 Layanan perkantoran	bulan			12,00
5035	Kegiatan 1.9 : Penyelenggaraan Keamanan Bendungan (Semula : Pembinaan Keamanan Bendungan)				
	Unit Organisasi: Balai Bendungan				
	Sasaran Kegiatan 1.9 : Peningkatan Layanan Pembinaan Bidang Keamanan Bendungan				
	1 Tingkat layanan pembinaan bidang keamanan bendungan	%	100,00	100,00	100,00
	5035.001 NSPK keamanan bendungan	N/S/P/K	1,00	1,00	1,00
	5035.002 Rencana dan program kerja Balai Bendungan	dokumen	20,00	33,00	1,00
	5035.003 Layanan teknis keamanan bendungan	instansi		35,00	29,00
	5035.951 Layanan Internal (Overhead)	layanan			1,00
	5035.970 Layanan dukungan manajemen satker	layanan			
	5035.994 Layanan perkantoran	bulan	12,00	12,00	12,00
5036	"Kegiatan 1.10 : Pengembangan Dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa Dan Tambak (Semula : Pengembangan Dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa Dan Tambak)"				
	Unit Organisasi: BBWS/BWS				
	Sasaran Kegiatan 1.10 : Peningkatan Kinerja Layanan Irigasi				

	Review Capaian Target		Anggaran (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Rencana Target	Rencana Target 2019	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Alokasi	Perkiraan Alokasi
	34,00	33,00	48.533,62	113.428,25	40.706,48	58.388,56	115.399,97
	1,00	1,00			3.820,54	3.935,53	664,27
			74.255,62	106.736,11			4.088,00
	12,00	12,00			94.705,23	94.705,23	79.453,95
			-	-	631.397,74	629.475,69	730.603,15
	100,00	100,00					
	146,00	33,00			40.645,11	32.333,57	32.864,14
	243,00	54,00			84.134,29	74.491,83	69.389,17
	37,00	37,00			170.545,85	153.843,68	82.105,03
							244.603,18
	12,00	12,00			336.072,49	368.806,60	301.641,62
			17.180,00	15.332,84	13.124,58	21.304,53	26.704,13
	100,00	100,00					
	3,00	1,00	2.262,08	755,04	855,04	1.379,82	829,50
	2,00	1,00	8.411,95	5.285,66	368,16	446,16	554,16
	33,00	29,00	-	4.892,14	7.171,61	13.399,14	19.290,50
	1,00	1,00			1.007,72	1.449,06	625,00
							2.220,06
	12,00	12,00	6.505,97	4.400,01	3.722,05	4.630,35	3.184,90
			8.884.275	6.273.151	9.780.831	10.054.177	10.081.683,93

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/indikator	Satuan	Review Capaian Target		
			2015	2016	2017
			Capaian	Capaian	Capaian
1	Tingkat layanan jaringan irigasi				
	Jumlah luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun	hektar	273.532,00	138.661,00	227.748,00
	Kewenangan Pusat		155.382,00	52.519,00	63.253
	a. Pembangunan jaringan irigasi permukaan		107.922,00	44.663,00	51.347
	b. Pembangunan jaringan irigasi rawa		40.242,00	3.963,00	7.950
	c. Pembangunan jaringan irigasi tambak		4.238,00	1.850,00	1.750
	d. Pembangunan jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT)		2.980,00	2.043,00	2.206
	Kewenangan Daerah (DAK)		118.150,00	86.142,00	164.495
	e. Pembangunan jaringan irigasi		4.028,00	1.718,00	6.767
	f. Peningkatan jaringan irigasi		114.122,00	84.424,00	157.728
2	Tingkat pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi				
	Jumlah luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang direhabilitasi/peningkatan	hektar	1.176.934,00	581.800,00	560.959,00
	Kewenangan Pusat		491.901,00	291.171,00	266.143
	a. Rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi permukaan		302.270,00	244.780,00	197.552
	b. Rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi rawa		151.249,00	28.459,00	49.708
	c. Rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi tambak		33.099,00	13.727,00	17.218
	d. Rehabilitasi/peningkatan jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT)		5.283,00	4.205,00	1.665
	Kewenangan Daerah (DAK)		685.033,00	290.629,00	294.816,00
	e. Rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi		685.033,00	290.629,00	294.816
3	Tingkat potensi layanan irigasi bersumber dari waduk	%	11	12	12
5036.001	Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa	dokumen	200,00	236,00	255,00
5036.002	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dibangun	km	400,00	682,00	467,39
5036.003	Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dibangun	bendung	10,00	16,00	11,00
5036.004	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang dibangun	km	10,00	30,00	114,12
5036.005	Bendung irigasi kewenangan Daerah yang dibangun	bendung	-	4,00	6,00
5036.006	Jaringan irigasi rawa yang dibangun	km	318,20	195,30	343,80
5036.007	Jaringan irigasi tambak yang dibangun	km		10,70	30,75
5036.008	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang direhabilitasi / ditingkatkan	km		1.283,60	1.503,27

	Review Capaian Target		Anggaran (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Rencana Target	Rencana Target 2019	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Alokasi	Perkiraan Alokasi
	225.453,00	140.008,50					
	40.267,00	42.598,50					
	30.682,00	38.301,00					
	6.746,00	3.000,00					
	2.511,00	700,00					
	328,00	597,50					
	185.186,00	97.410,00					
	35.274,00	8.442,00					
	149.912,00	88.968,00					
	331.131,00	370.281,00					
	162.986	120.281					
	124.044	90.246,00					
	21.868	23.550,00					
	9.920	6.205,00					
	7.154	280,00					
	168.145,00	250.000,00					
	168.145	250.000,00					
	12	12					
	162,00	98,00	3.997.071	364.704	445.013	311.173	310.755
	506,48	108,00		1.785.743	3.293.177	3.889.334	3.536.614
	6,00	14,00		671.817	557.961	655.022	1.106.777
	103,00	21,00		319.551	568.732	399.567	108.489
	5,00	2,00		101.116	278.811	180.333	68.500
	220,90	2,00	493.682	77.799	137.058	107.930	71.620
	34,65	3,00	112.642	11.138	33.165	34.384	59.330
	745,87	156,00		2.448.186	3.507.854	3.770.943	3.996.972

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Review Capaian Target		
			2015	2016	2017
			Capaian	Capaian	Capaian
	5036.009 Bendung irigasi kewenangan Pusat yang direhabilitasi / ditingkatkan	bendung	40,80	3,00	5,00
	5036.010 Jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang direhabilitasi / ditingkatkan	km		30,30	25,78
	5036.011 Bendung irigasi kewenangan Daerah yang direhabilitasi / ditingkatkan	bendung	2.641,22	3,00	
	5036.012 Jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi / ditingkatkan	km	1.355,88	867,32	1.617,68
	5036.013 Jaringan irigasi tambak yang direhabilitasi / ditingkatkan	km	222,50	248,78	206,55
	5036.014 Kawasan rawa yang dikonservasi	km	-	-	10,00
	5036.951 Layanan Internal (Overhead)	layanan		1,00	1,00
	5036.970 Layanan dukungan manajemen satker	layanan			
5037	"Kegiatan 1.11 : Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, Dan Pengamanan Pantai (Semula : Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, Dan Pengaman Pantai)"				
	Unit Organisasi: BBWS/BWS				
	Sasaran Kegiatan 1.11 : Peningkatan Kapasitas Pengendalian Daya Rusak Air				
	1 Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air				
	Jumlah luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air oleh sarana prasarana pengendali banjir yang dibangun	hektar	20.343,50	16.083,11	14.912,94
	Jumlah debris/lahar yang ditampung oleh sarana prasarana pengendali sedimen/lahar gunung berapi yang dibangun	juta m3			
	Jumlah panjang pantai yang dilindungi oleh sarana prasarana pengamanan pantai yang dibangun	km	66,88	49,52	20,42
	2 Tingkat pengembalian luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air prasarana penyediaan air baku seperti semula				
	Jumlah luas kawasan yang kembali terlindungi dari daya rusak air, oleh sarana prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi	hektar			
	Jumlah debris/lahar yang ditampung oleh sarana prasarana pengendali sedimen/lahar gunung berapi yang direhabilitasi	juta m3			
	Jumlah panjang pantai yang dilindungi oleh sarana prasarana pengamanan pantai yang direhabilitasi	km	0,92	0,19	0,20

	Review Capaian Target		Anggaran (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Rencana Target	Rencana Target 2019	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Alokasi	Perkiraan Alokasi
	21,00	6,00	3.379.322	25.559	88.479	160.841	101.211
	-	1,00		70.483	92.983	77.941	129.800
	15,00		641.424	6.733		-	
	1.281,74	17,00		221.823	499.223	299.877	371.090
	84,00	3,00	190.513	105.901	193.476	78.163	120.543
	10,00		-	-		-	-
	1,00	1,00	69.620	61.782	84.899	88.668	
							99.983
			7.854.594	5.794.518	6.914.557	6.771.714	5.995.588
	5.282,24	5.282,24					
	22,45	11,60					
	0,11	-					

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/indikator	Satuan	Review Capaian Target		
			2015	2016	2017
			Capaian	Capaian	Capaian
5037.001	Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase utama perkotaan, dan pengaman pantai	dokumen		116,00	198,00
5037.002	Sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun / ditingkatkan	km		118,34	123,73
5037.003	Bangunan perkuatan tebing yang dibangun/ditingkatkan	km		57,58	34,58
5037.004	Pintu air / bendung pengendali banjir yang dibangun / ditingkatkan	unit	304,36		4,00
5037.005	Kanal banjir yang dibangun / ditingkatkan	km		21,56	3,40
5037.006	Stasiun pompa banjir yang dibangun / ditingkatkan	unit		1,00	1,00
5037.007	Polder / kolam retensi yang dibangun / ditingkatkan	buah		5,00	1,00
5037.008	Saluran drainase yang dibangun / ditingkatkan	km		14,90	15,24
5037.009	Bangunan sabo yang dibangun / ditingkatkan	buah	7,00	5,00	8,00
5037.010	Checkdam yang dibangun / ditingkatkan	buah	143,00	39,00	23,00
5037.011	Breakwater yang dibangun / ditingkatkan	km		4,27	4,94
5037.012	Seawall dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun / ditingkatkan	km	66,88	45,25	15,06
5037.013	Flood Forecasting & Warning System (FFWS) yang dibangun / ditingkatkan	BBWS/BWS		-	-
5037.014	Tanggul yang direhabilitasi	km		28,88	26,08
5037.015	Bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi	km		1,37	1,26
5037.016	Pintu air / bendung pengendali banjir yang direhabilitasi	unit	135,78		-
5037.017	Kanal banjir yang direhabilitasi	km		-	1,00
5037.018	Stasiun pompa banjir yang direhabilitasi	unit		-	1,00
5037.019	Polder/kolam retensi yang direhabilitasi	buah		-	-
5037.020	Saluran drainase yang direhabilitasi	km			
5037.021	Bangunan sabo yang direhabilitasi	buah	21,00	1,00	10,00
5037.022	Checkdam yang direhabilitasi	buah		1,00	1,00
5037.023	Breakwater yang direhabilitasi	km	0,92	0,19	0,20
5037.024	Seawall dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang direhabilitasi	km		-	-
5037.025	Sungai yang direstorasi	sungai			-
5037.026	Mata air yang dilindungi	mata air		1,00	2,00
5037.951	Layanan Internal (Overhead)	layanan	1,00	1,00	1,00
5037.970	Layanan dukungan manajemen satker	layanan			

	Review Capaian Target		Anggaran (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Rencana Target	Rencana Target 2019	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Alokasi	Perkiraan Alokasi
	38,00			135.830	230.117	91.735	67.816
	171,51	93,00		2.183.771	2.198.041	2.315.449	2.149.870
	25,03	7,00		788.359	921.329	1.016.755	893.738
	1,00	2,00	4.827.552		217.213	118.078	147.560
	22,32	36,84		502.212	859.386	593.944	678.347
	1,00	-		51.500	115.609	223.289	678.896
	-	2,00		244.820	357.485	223.447	241.570
	3,10			106.826	156.096	41.400	38.200
	17,00	7,00	444.617	88.510	169.745	300.878	305.972
	11,00	20,00		173.487	174.058	233.860	345.719
	2,95	9,00		120.015	129.540	175.305	303.710
	19,50	11,00	1.713.122	1.008.210	769.347	994.298	678.896
	-			-		-	-
	58,00	0,37		205.955	313.937	168.670	15.200
	0,60	0,01		26.483	11.538	2.000	
						-	-
			551.568	-	8.000	-	-
				-	500	-	-
	2,00			-		-	-
						-	-
	10,00	1,00	255.017	88.018	194.309	183.028	7.600
	-			6.313	1.100	-	-
	-	-	9.774	2.691	6.433	4.050	-
	0,11		-	-	-	-	
				-		-	
	1,00		-	1.407	11.252	4.399	
	1,00		52.943	57.682	69.522	81.129	
							71.289,43

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Review Capaian Target		
			2015	2016	2017
			Capaian	Capaian	Capaian
5038	Kegiatan 1.12 : Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan Sda Terpadu				
	Unit Organisasi: BBWS/BWS				
	Sasaran Kegiatan 1.12 : Peningkatan Keterpaduan Tata Kelola Pengelolaan SDA				
	1 Peningkatan indeks RBO (indeks)	indeks	2,25	2,57	2,84
	5038.001 Data informasi dan komunikasi publik BBWS/BWS	layanan	34,00	34,00	34,00
	5038.002 Pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pusat yang disusun/direview	dokumen	14,00	14,00	5,00
	5038.003 Hidrologi dan kualitas air yang dikelola	layanan	34,00	34,00	34,00
	5038.004 Kelembagaan pengelolaan SDA yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga	34,00	34,00	34,00
	5038.005 Rekomtek pemanfaatan SDA yang disusun	dokumen	34,00	34,00	34,00
	5038.951 Layanan Internal (Overhead)	layanan	1,00	1,00	1,00
	5038.970 Layanan dukungan manajemen satker	layanan			
5039	Kegiatan 1.13 : Pengelolaan Bendungan, Danau, Dan Bangunan Penampung Air Lainnya (Semula : Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Bangunan Penampung Air Lainnya)				
	Unit Organisasi: BBWS/BWS				
	Sasaran Kegiatan 1.13 : Peningkatan Kapasitas Tampung Sumber-sumber Air				
	1 Tingkat kapasitas tampung sumber air				
	Jumlah kapasitas tampung bangunan air (bendungan, embung, bangunan penampung air lainnya) yang dibangun				
	Jumlah kapasitas tampung bangunan air (bendungan, embung, bangunan penampung air lainnya) yang dibangun	juta m3	1.012,13	16,73	32,36
	2 Tingkat pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air prasarana penyediaan air baku seperti semula				
	Jumlah kapasitas tampung bangunan air (bendungan, embung, bangunan penampung air lainnya) yang direhabilitasi	juta m3	377	4,3	5,44
	3 Tingkat potensi energi sumber air				
	Jumlah kapasitas tampung bangunan air (bendungan, embung, bangunan penampung air lainnya) yang dibangun	juta m3	1.012,13	16,73	18,60

	Review Capaian Target		Anggaran (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Rencana Target	Rencana Target 2019	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Alokasi	Perkiraan Alokasi
			1.191.515	1.141.164	317.742	251.793	261.474
	2,94						
	34,00		593.384	78.613	39.618	32.246	31.572
	5,00			85.614	33.409	27.561	17.393
	34,00			115.015	137.268	114.709	117.573
	34,00			125.810	81.060	57.227	62.047
	34,00			20.227	13.856	19.637	21.059
	1,00			686.796	12.532	413	
			6.400.876	7.010.823	7.527.653	9.698.930	12.001.890
	226,93	878,78					
		750,51					

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Review Capaian Target			
			2015	2016	2017	
			Capaian	Capaian	Capaian	
5039.001	Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan dan bangunan penampung air lainnya	dokumen	-	171,00	142,00	
5039.002	Bendungan baru yang dibangun	bendungan	13,00	8,00	6,00	
5039.003	Bendungan dalam tahap pelaksanaan (on going)	bendungan	16,00	24,00	30,00	
5039.004	Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun	buah	342,00	387,00	117,00	
5039.005	Bendungan yang direhabilitasi	bendungan	5,00	5,00	2,00	
5039.006	Embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi	buah	64,00	71,00	73,00	
5039.007	Danau yang direvitalisasi	danau	3,00	7,00	12,00	
5039.951	Layanan Internal (Overhead)	layanan	1,00	1,00	1,00	
5039.970	Layanan dukungan manajemen satker	layanan				
5040	Kegiatan 1.14 : Penyediaan Dan Pengelolaan Air Tanah Dan Air Baku (Semula : Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku)					
	Unit Organisasi: BBWS/BWS					
	Sasaran Kegiatan 1.14 : Peningkatan Layanan Sarana Dan Prasarana Air Baku		81%	51%	37%	
1	Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku					
	Jumlah debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku yang dibangun	m3/detik	6,97	6,15	4,34	
2	Tingkat pengembalian fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku seperti semula					
	Jumlah debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku yang direhabilitasi	m3/detik	7,97	0,92	0,70	
5040.001	Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku	dokumen	71,00	167,00	141,20	
5040.002	Sumur air tanah untuk air baku yang dibangun	titik	4,00	54,00	128,00	
5040.003	Embung air baku yang dibangun	buah	17,00	87,00	28,00	
5040.004	Unit air baku yang dibangun	km	554,00	936,28	665,47	
5040.005	Sumur JIAT yang dibangun/ditingkatkan	titik	243,00	193,00	282,00	
5040.006	Jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang dibangun / ditingkatkan	km		120,04	147,02	
5040.007	Sumur air tanah untuk air baku yang direhabilitasi	titik	50,00	303,00	59,00	
5040.008	Embung air baku yang direhabilitasi	buah	17,00	29,00	8,00	
5040.009	Unit air baku yang direhabilitasi	km		160,45	61,41	
5040.010	Sumur JIAT yang direhabilitasi	titik	295,00	197,00	186,00	
5040.011	Jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang direhabilitasi	km		66,90	77,24	
5040.951	Layanan Internal (Overhead)	layanan	1,00	1,00	1,00	
5040.970	Layanan dukungan manajemen satker	layanan				

	Review Capaian Target		Anggaran (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Rencana Target	Rencana Target 2019	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Alokasi	Perkiraan Alokasi
	106,00	3,00	-	239.485	201.835	271.668	200.217
	13,00	10,00	5.873.859	1.601.641	112.153	113.907	126.650
	34,00	41,00		3.499.182	5.500.855	7.491.153	9.152.364
	99,00	80,00	199	996.422	822.904	658.473	1.452.285
	2,00	2,00	133.292	230.915	290.386	147.790	121.453
	13,00	19,00	158.180	219.265	174.063	166.244	260.741
	9,00	2,00	206.322	180.689	378.885	775.708	587.677
	1,00		29.025	43.224	46.572	73.987	
							100.504,68
			2.736.806	3.104.815	2.815.799	3.544.058	3.168.524
	57%	23%					
	7,46	5,00					
	0,33	1,15					
	41,00		-	182.398	153.268	61.228	64.765
	222,00	198,00	15.220	71.501	161.118	297.143	579.571
	7,00	8,00	1.997.066	250.991	155.152	398.949	486.978
	359,09	315,20	-	1.873.150	1.470.683	1.824.712	1.418.459
	-		204.550	156.245	257.615	92.446	31.198
	28,75			101.090	159.838	191.442	51.311
	43,00	38,00	378.419	29.810	32.069	38.411	26.568
	-	-	-	33.130	2.600	850	82.207
	32,30	34,30	-	281.658	221.373	469.915	309.431
	-	121,00	141.551	60.441	86.264	52.480	48.569
	565,76			64.403	115.820	87.497	37.633
	1,00		19.514	55.372	33.097	28.984	
							31.982,27

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Review Capaian Target		
			2015	2016	2017
			Capaian	Capaian	Capaian
5300	Kegiatan 1.15 : Operasi Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana SDA				
	Unit Organisasi: BBWS/BWS				
	Sasaran Kegiatan 1.15 : Peningkatan Kinerja Layanan Op Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air				
	1 Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	m3/detik	34,90	60,92	87,66
	2 Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air	juta m3	12.679,00	4.673,00	10.211,00
	3 Terjaganya luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	hektar			
	4 Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi	hektar	3.357.420,00	3.402.053,00	3.216.285
	5 Terlaksananya kegiatan pendukung operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA				
	5300.001 Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara	km	23.371,29	25.524,23	25.974,62
	5300.002 Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara	bendung	409,00	575,00	588,00
	5300.003 Jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara	km	14.770,37	14.402,53	13.811,66
	5300.004 Jaringan irigasi tambak yang dioperasikan dan dipelihara	km	610,10	744,72	755,31
	5300.005 Unit pengelola irigasi yang difungsikan	unit	-	4,00	25,00
	5300.006 Tanggul dan tebing yang dioperasikan dan dipelihara	km		4.333,00	3.731,12
	5300.007 Kanal banjir yang dioperasikan dan dipelihara	km	2.490,16	112,53	158,21
	5300.008 Stasiun pompa banjir yang dioperasikan dan dipelihara	unit		54,00	67,00
	5300.009 Polder/kolam retensi yang dioperasikan dan dipelihara	buah		-	14,00
	5300.010 Bangunan sabo yang dipelihara	buah	87,00	33,00	33,00
	5300.011 Checkdam yang dioperasikan dan dipelihara	buah		408,00	540,00
	5300.012 Breakwater / seawall dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dipelihara	km	116,22	161,00	148,99
	5300.013 Sungai yang dipelihara	sungai	-	157,00	334,00
	5300.014 Mata air yang dipelihara	mata air	-	-	3,00
	5300.015 Bendungan yang dioperasikan dan dipelihara	bendungan	160,00	166,00	166,00
	5300.016 Unit pengelola bendungan	unit	-	9,00	15,00
	5300.017 Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara	buah	852,00	860,00	1.112,00
	5300.018 Danau yang dipelihara	danau	29,00	47,00	56,00
	5300.019 Sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara	titik	-	-	34,00

	Review Capaian Target		Anggaran (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Rencana Target	Rencana Target 2019	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Alokasi	Perkiraan Alokasi
			2.152.067	3.206.993	3.422.912	4.028.547	5.095.012
	131,38	84,72					
	2.947.789,30	3.090.052,26					
	23.729,73	51.312,41	679.789	911.050	1.395.115	1.920.093	2.911.483
	593,00	3,00	224.242	237.028	251.519	207.503	211.087
	11.855,84	8.871,53	223.804	245.349	258.730	244.169	231.222
	852,49	987,59	37.436	42.697	40.892	36.688	33.916
	10,00	23,00	-	-	30.813	4.054	4.114
	3.637,09	3.746,50	356.792	607.550	224.657	211.440	213.302
	165,68	2,00		42.814	18.661	22.776	26.810
	74,70	8,00		5.800	13.424	21.582	27.365
	14,00	6,00		10.741	8.256	8.393	8.995
	49,00	367,00		12.668	14.212	19.951	15.856
	501,00	160,00	30.806	41.864	45.756	36.410	41.188
	163,86	174,30	59.088	112.435	87.511	73.750	84.598
	337,00	20,00	-	175.339	252.649	291.842	272.258
	4,00	15,00	-	-	344	1.903	2.203
	160,00	167,00	350.771	179.214	152.843	284.145	355.958
	13,00	82,00	-	4.428	6.990	7.408	8.464
	1.034,00	1.100,00	-	241.186	209.067	214.396	195.963
	55,00		22.235	20.879	27.876	31.647	29.376
	27,00	30,00	80.454	1.293	3.087	3.483	3.261

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/indikator	Satuan	Review Capaian Target			
			2015	2016	2017	
			Capaian	Capaian	Capaian	
	5300.020	Embung air baku yang dioperasikan dan dipelihara	buah	-	-	140,00
	5300.021	Sumur JIAT yang dioperasikan dan dipelihara	titik	-	-	1.723,00
	5300.022	Jaringan Irigasi Air Tanah yang dioperasikan dan dipelihara	km	-	132,11	440,81
	5300.023	Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara	unit	34,90	60,92	100,65
	5300.024	Alokasi air yang disusun	dokumen	-	50,00	77,00
	5300.025	Kegiatan tanggap darurat akibat bencana	kegiatan	-	-	20,00
	5300.026	Peralatan dan fasilitas pendukung O&P yang dioperasikan dan dipelihara	unit	-	-	266,00
	5300.027	Kawasan rawa yang dipelihara	kawasan			
	5300.951	Layanan Internal (Overhead)	layanan			1,00
	5300.970	Layanan dukungan manajemen satker	layanan			
5301	Kegiatan 1.16 : Pembinaan Waduk, Embung, Dan Bangunan Penampung Air Lainnya (Semula : Pembinaan Waduk, Embung, Dan Bangunan Penampung Air Lainnya)					
	Unit Organisasi: Pusat Bendungan					
	Sasaran Kegiatan 1.16 : Peningkatan Layanan Pembinaan Bidang Bendungan, Danau, Dan Bangunan Penampung Air Lainnya					
	1	Tingkat layanan pembinaan bidang bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya	%	100,00	100,00	100,00
	5301.001	NSPK bendungan dan bangunan penampung air lainnya	N/S/P/K	1,00	8,00	2,00
	5301.002	Layanan pembinaan bendungan, embung, penampung air lainnya	BBWS/BWS	33,00	33,00	33,00
	5301.951	Layanan Internal (overhead)	layanan			1,00
	5301.970	Layanan dukungan manajemen satker	layanan			
	5301.994	Layanan perkantoran	bulan	12,00	12,00	12,00
5302	Kegiatan 1.17 : Pembinaan Pengelolaan Air Tanah Dan Air Baku (Semula : Pembinaan Pengelolaan Air Baku Dan Air Tanah)					
	Unit Organisasi : Pusat Air Tanah Dan Air Baku					
	Sasaran Kegiatan 1.17 : Peningkatan Layanan Pembinaan Bidang Air Tanah Dan Air Baku					
	1	Tingkat layanan pembinaan bidang air tanah dan air baku	(%)	100,00	100,00	100,00
	5302.001	NSPK air tanah dan air baku	N/S/P/K	1,00	14,00	1,00
	5302.002	Layanan pembinaan air tanah dan air baku	BBWS/BWS	33,00	33,00	33,00
	5302.951	Layanan Internal (overhead)	layanan			1,00
	5302.970	Layanan dukungan manajemen satker	layanan			
	5302.994	Layanan perkantoran	bulan	12,00	12,00	12,00

	Review Capaian Target		Anggaran (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Rencana Target	Rencana Target 2019	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Alokasi	Perkiraan Alokasi
	201,00	25,00	-	6.968	31.798	42.223	42.562
	1.484,00	1.735,00	-	37.954	53.142	46.513	44.671
	478,00	440,81	61.507	31.437	24.618	20.285	25.252
	320,00	183,00	-	83.658	68.149	73.327	81.008
	38,00	-		37.434	36.422	20.976	16.023
	60,00	-		448	32.308	25.878	30.743
	443,00	26,00	-	33.675	29.722	38.971	49.311
	3,00	25,00	-	-	-		-
	1,00	12,00	25.143	83.085	104.350	118.740	
							127.516
			6.693	29.822	27.942	37.532	27.254
	100,00						
	2,00	2,00	-	5.442	2.027	30.849	
	34,00	33,00	4.051	16.133	18.699	2.824	20.248
	1,00	1,00			3.357	1.000	45
			2.641	8.247			4.107,72
	12,00	12,00			3.859	2.859	2.853
			4.294	33.814	23.709	25.624	22.374
	100,00						
	1,00	1,00	-	12.672	2.000	1.124	1.124
	34,00	33,00	1.953	11.769	15.720	20.165	16.806
	1,00	1,00			1.359	1.877	1.332
							1.041,21
	12,00	12,00	2.340	9.373	4.630	2.457	2.071

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Review Capaian Target		
			2015	2016	2017
			Capaian	Capaian	Capaian
Program : Pengendalian Lumpur Sidoarjo					
Sasaran Program : Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo					
	1 Tingkat dukungan pengendalian lumpur Sidoarjo				
	2 Learning & Growth Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	% %			
2407	Kegiatan 1.18 : Pembinaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo				
	Unit Organisasi : Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo				
	Sasaran Kegiatan 1.18 : Peningkatan Layanan Pembinaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo				
	1 Peningkatan layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo		100,00	100,00	100,00
	2407.001 NSPK pengendalian lumpur	N/S/P/K			
	2407.002 Layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo	BBWS/BWS			
	2407.003 Dampak sosial yang ditangani	berkas			
	2407.004 Layanan dukungan manajemen Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo	layanan			
	2407.951 Layanan internal (overhead)	layanan			
	2407.970 Layanan dukungan manajemen satker	layanan			
	2407.994 Layanan perkantoran	bulan			
2408	Kegiatan 1.19 : Pengendalian Lumpur Sidoarjo				
	Unit Organisasi : Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo				
	Sasaran Kegiatan 1.19 : Peningkatan Layanan Sarana Prasarana Pengendalian Lumpur Sidoarjo				
	1 Peningkatan penanganan luapan lumpur				
	2408.001 Rencana teknis untuk pengendalian lumpur Sidoarjo	dokumen			
	2408.002 Luapan lumpur yang ditangani	juta m3		100,00	
	2408.003 Tanggul dan infrastruktur lainnya yang dibangun	km			
	2408.004 Tanggul dan infrastruktur lainnya yang direhabilitasi/ditingkatkan	km			
	2408.005 Tanggul dan infrastruktur lainnya yang dipelihara	km			
	2408.006 Kawasan di luar PAT yang ditata	hektar			
	2408.007 Peralatan dan fasilitas pendukung yang dioperasikan dan dipelihara	unit			
	2408.951 Layanan internal (overhead)	layanan			
	2408.970 Layanan dukungan manajemen satker	layanan			

	Review Capaian Target		Anggaran (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Rencana Target	Rencana Target 2019	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Alokasi	Perkiraan Alokasi
			-	-	-	406.098	425.000
						89.642	86.063
	100,00	100,00					
	3,00					2.428	1.600
	7,00					13.080	3.054
	40,00					49.193	32.163
	1,00					6.709	14.086
						1.988	19.100
						16.243	16.060
						316.456	338.937
	2,00					4.113	11.716
	33,97					150.065	157.186
	1,77					52.022	36.701
	4,15					58.396	107.525
	13,50					17.984	12.000
	10,00					33.875	13.708
	-						
	1,00						100,00



DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Halaman ini sengaja dikosongkan